

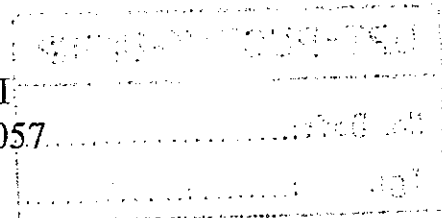
**KEMANDIRIAN LEMBAGA KEPOLISIAN  
DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI  
PENEGAKAN HUKUM**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

SRI HARTINI  
NIM. B4A 097 057



PEMBIMBING:  
PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**

344.052  
SR1  
u e 1

KEMANDIRIAN LEMBAGA KEPOLISIAN  
DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI  
PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok)


Disusun Oleh:

SRI HARTINI  
NIM. B4A 097 057

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 16 April 2001

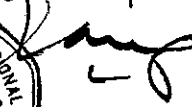
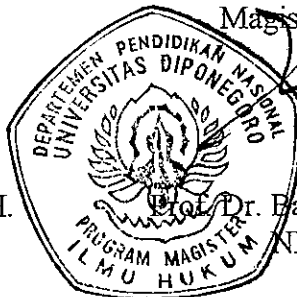
Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.  
NIP. 130 324 239

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130 350 519

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **“Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum”** (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok) sebagaimana direncanakan.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat petunjuk dan arahan dari pembimbing, baik dari segi materi maupun teknis penulisan. Tanpa adanya bantuan tersebut besar kemungkinan karya tulis ini sulit untuk diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H., Guru Besar dan sekaligus Pembimbing, yang banyak memberikan bimbingan dan arahan serta koreksi terhadap karya tulis ini.
2. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro beserta staf, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini.
3. Prof. Drs. Suyanto, Phd. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Drs. M Subardi, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta serta Drs. Muchson AR, Mpd. Ketua Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Pendidikan Pascasarjana pada Universitas Diponegoro ini.
4. Beberapa Informan, yang memberikan kontribusi penting tersusunnya karya tulis ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada:
  - a. Bapak Kolonel (Kombes Pol) Drs. Toto Sunyoto. Kadit Serse Polda DIY, Bapak Leda (Ipda) Singgih Suhartoyo, S.H. Kaur Bin.Ops. Polres Sleman dan Bapak Leda (Ipda) Riyanto. Kanit Serse Depok, yang secara gamblang telah

---

memberikan informasi yang banyak sehingga lebih mempermudah penulis dalam analisis. Bapak Mayor (Kom Pol) Drs. Feri A.J. Kabag Sersum Polda DIY, dan rekan-rekan polisi lainnya yang ikut repot mencari data yang diinginkan penulis.

- b. Bapak Bambang Prisantosa, S.H. sebagai Jaksa di Kejaksaan Sleman yang telah membantu memberikan informasi guna penyusunan karya tulis ini.
- c. Bapak Arifin, S. H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu memberikan informasi guna penyusunan karya tulis ini.
- d. Bapak Suparlan Marzuki, S.H, Msi. Selaku Direktur LKBH UII dan Bapak Artidjo Alkostar, S.H. Penasehat Hukum dari LKBH UII, membantu memberikan informasi guna penyusunan karya tulis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan kepercayaan yang terus menerus dari suami Joko Setiono dan anak-anak tercinta Febrianto Ari Nugroho dan Jayanti Dwi Rahayu yang selama ini dengan sabar dan penuh pengertian menunggu penulis menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya tak lupa penulis memanjatkan doa, semoga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis akan mendapat imbalan kebaikan dari Allah Swt. serta semoga karya tulis berupa Tesis ini akan bermanfaat adanya, Amin ya Robal alamin.

Semarang, 16 April 2001

Penulis

Sri Hartini



## RINGKASAN

Pada saat ini penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai demokrasi, antara lain jaminan terhadap ketertiban warga negara dan pengambilan keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian lembaga peradilan, agar asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada suara kebenaran dan rasa keadilan tidak pada kekuasaan tekanan.

Kemandirian lembaga kepolisian yang merupakan sub sistem dari lembaga peradilan pidana sangat diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan. Secara yuridis formal diakui bahwa dari segi kelembagaan sudah mandiri dalam arti terpisah dari TNI sejak 1 Juli 2000, yakni dengan keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 sejak 18 Agustus 2000. Dalam realitas secara substansial/operasional belum terwujud, karena masih terdapat kendala yang bersifat intern dan ekstern. Kendala yang bersifat intern berupa perilaku polisi reserse belum memperlihatkan perilaku polisi sipil melainkan masih memperlihatkan perilaku yang militeristik cenderung menggunakan kekerasan, melakukan pelanggaran hak-hak tersangka, diskriminatif, tidak transparan dan tidak akomodatif serta belum memperlihatkan kinerja yang profesional. Sedang kendala yang bersifat ekstern berupa instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum memadai, intervensi yang bersifat vertikal (atasan) dan horizontal (kekuasaan politik/pemerintah, ekonomi, "saudara tua", teman sejawat, masyarakat), keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung operasional penyidikan.

Terwujudnya kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana diperlukan beberapa aspek penunjang: instrumen hukum yang memadai, struktur organisasi yang baik, *political will* pemerintah, SDM reserse yang mumpuni, anggaran, sarana dan prasarana serta kesejahteraan reserse, kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat, integritas moral reserse dan aspek kultur yakni polisi reserse yang berperilaku sipil. Untuk itu segera diwujudkan komisi pengawas terhadap kerja polisi reserse yang bersifat vertikal dan horizontal, dilembagakannya pelaporan dari polisi reserse kepada korban/pelapor/pengadu/masyarakat yang terkait dengan penyidikan serta menampilkan polisi reserse yang bersahabat. Di samping itu perlu segera dilakukan perubahan yang menyangkut instrumen hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana, yakni KUHAP dan peraturan pelaksanaannya/juklak/juknis serta yang terkait dengan polisi sebagai bagian dari ABRI.

# **THE INDEPENDENCE POLICE INSTITUTION IN THE LAW ENFORCEMENT**

By: Sri Hartini  
Post Graduate Program in Law  
Diponegoro University

## **ABSTRACT**

Law enforcement is a *conditio sine qua non* for the implementation of democracy, it is necessary for maintaining law and order, securing political decision making process, guaranteeing individual freedom, and protecting human rights. Beside, in the context of law enforcement process, the independence of judiciary system is necessary for the materialization of the principle of law based State. The judiciary system would be independent as long as the stakeholders of that institution are independent and truth and justice oriented.

The independence of the police institution as sub-system of the judiciary is necessary in the investigation of crime. Normatively it was recognized that institutionally the police is independent and separated from the TNI since 1 July 2000, that is with the promulgation of the President Decree Number 89 of 2000, and confirmed by the Decision of the People Assembly Number: VI/MPR/2000. However, in operational level there are external and internal shortcomings. Internal shortcomings is the behavior of the criminal investigator police which are militaristic, unprofessional, discrimination, not transparent and tends to use violent actions. External shortcomings are problem related with the existing legal instruments, vertical and horizontal interventions, from the colleagues, public, "old brother", limited budget, and limited means and facilities to support investigation process.

The independence of the police as the criminal investigating institution in the criminal justice system requires supporting aspects such as: available legal instrument, well organized institution, political will of the government, capable human resources, budget, means, personnel investigator police and cultural aspect of the criminal investigating police as civil police. For the reasons, monitoring commission is needed to supervise the performance of the criminal investigating police both vertically and horizontally. Beside, the works of the criminal investigating police have to be reported to the concerned victims. Apart from that the existing legal instruments such as the law of criminal procedure and related regulations have to be reviewed and amended.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBARA .....	x
 BAB. I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	9
E. Metode Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	29
 BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA .....	 31
A. Selintas Perkembangan Lembaga Kepolisian Menurut .....	31
1. Masa Penjajahan Belanda .....	31
2. Masa Penjajahan Jepang .....	32
3. Masa UUD 1945 (18-8-1945 S/D 27-12-1949) .....	33
4. Masa UUD RIS (27-12-1949 S/D 17-8-1950) .....	36
5. Masa UUDS (17-8-1950 S/D 5-7-1959) .....	37
6. Masa Kembali Ke UUD 1945 (5-7-1959 S/D 11-3-1966) .....	38
7. Masa Orde Baru (11-3-1966 S/D Sekarang) .....	40
B. Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian Dalam .....	43

1. Konsep Penegakan Hukum dalam Konteks .....	43
2. Struktur Organisasi Penegakan Hukum .....	52
3. Konsep Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam .....	100
BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	111
A. Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian Dalam .....	111
1. Penjabaran Kemampuan Teknis Proses Penyidikan .....	111
2. Gambaran Umum Lembaga Kepolisian Dalam .....	138
a. Sumber Daya Manusia Polisi Penyidik .....	138
b. Sarana dan Prasarana Sebagai Pendukung Polisi .....	146
3. Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian Dalam .....	152
a. Kendala yang bersifat intern terhadap kemandirian .....	155
b. Kendala yang bersifat ekstern terhadap kemandirian .....	198
B. Aspek-Aspek Yang Berperan Menunjang Dalam Kemandirian...	215
1. Aspek Hukum atau Peraturan Perundang-undangan .....	215
2. Aspek Struktur Organisasi .....	216
3. Aspek Pemerintah ( <i>Political Will</i> ).....	219
4. Aspek Sumber Daya Manusia Penyidik .....	220
5. Aspek Anggaran, Sarana dan Prasarana .....	221
6. Aspek Personil Polisi Penyidik .....	222
7. Aspek Masyarakat .....	224
8. Aspek Moral .....	227
9. Aspek Kultur .....	228
BAB. IV. PENUTUP .....	238
A. Kesimpulan .....	238
B. Saran .....	242

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARI

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Pejabat yang berwenang menahan dan lamanya penahanan .....	74
Tabel 2: Jenjang Kepangkatan Personil Penyidik Polres Sleman .....	143
Tabel 3: Kejahatan Per Polres Sejawaran Polda DIY Tahun 2000 (3 bulan terakhir, yakni Januari, Februari dan Maret) ....	168
Tabel 4: Kriminalitas Di Wilayah Hukum Polres Sleman selama Tahun 1999/2000 Per Pidana dari Bulan Januari S/D Bulan Nopember 2000 .....	170
Tabel 5: Data Kriminalitas Di Wilayah Hukum Sleman Tahun 1999/2000 Per Polsek.....	172
Tabel 6: Data Rekapitulasi Hasil Penyidikan Kesatuan Serse Polres Sleman Tahun 2000 .....	195
Tabel 7: Kemampuan Polisi Penyidik Menyelesaikan Perkara Per Bulan ...	197

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Penjabaran Kemampuan Teknis Proses Penyidikan Polisi Reserse...	113
Gambar 2: Struktur Organisasi Ditserse Polda DIY .....	160
Gambar 3: Struktur Organisasi Satserse Polres Sleman .....	160
Gambar 4: Struktur Organisasi Unit Serse Polsek Depok .....	161

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Di mana masyarakat semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya tingkat pendidikan yang semakin meningkat, sehingga masalah penegakan hukum mendapat respon dari masyarakat.

Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain : jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para

pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan, tidak pada kekuasaan tekanan.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas kemandirian lembaga kepolisian yang merupakan sub sistem dari lembaga peradilan dalam penegakan hukum mempunyai daya tarik tersendiri. Hal ini disebabkan karya kepolisian itu tersebar secara jelas di mana-mana selama dua puluh empat jam.<sup>2</sup> Dengan demikian dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa kepolisian merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Di samping sebagai tokoh utama penegak hukum, fungsi utama polisi mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan masyarakat. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lain, misalnya Kejaksaan dan pengadilan serta petugas pemasyarakatan, tugas polisi berlangsung di lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain hal tersebut dalam tugas penegakan hukum dan ketertiban, polisi dilengkapi dengan hak untuk menggunakan kekuatan-kekuatan penekan. Hak dan wewenang ini ditemukan di seluruh kepolisian negara-negara modern, baik di negara yang menganut sistem politik yang terbuka dan demokratis maupun yang tertutup dan otoriter. Kenyataan ini menunjukkan bahwa wewenang dan hak polisi memiliki dimensi universal dan bersifat netral, baik secara politik maupun moral. Sifat universal mengandung implikasi adanya standar profesional polisi yang seharusnya, juga bersifat universal.

Cara bertindak polisi dalam menegakkan hukum dan ketertiban disebut sebagai upaya pemolisian (*policing*). Satjipto Rahardjo merumuskan konsep pemolisian (*policing*) sebagai cara bertindak yang khas dan tunduk pada prosedur tertentu. Dalam arti, cara bertindak polisi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan "hasil akhir", melainkan juga menekankan arti pentingnya proses

---

<sup>1</sup> I. S. Susanto, *Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman*, Pidato Dies Natalis pada Rapat Senat Terbuka UNDIP Semarang dalam Rangka Memperingati Dies Natalis UNDIP Ke 40, tanggal 15 Oktober 1997, hlm. 9.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 147.



(cara-cara) untuk mendapatkan hasil tersebut. Peristiwa pembantaian yang terjadi di Inggris di lapangan Peterloo pada tahun 1819, hanya menangkap seorang orator, yang akhirnya menewaskan dan melukai sejumlah besar penonton, sering diangkat sebagai contoh pemolisian bukan dengan cara polisi, melainkan dengan cara militer.<sup>3</sup>

Pemolisian dan gaya pemolisian dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Fungsi pemolisian sendiri dapat ditemukan di banyak masyarakat kuno dan masyarakat tradisional, sekali pun dalam bentuk yang tidak dikenal seperti kepolisian saat ini. Pada pemolisian lama, pemolisian dilakukan dengan lebih banyak menggunakan metode dan alat kekerasan. Seiring dengan perkembangan hukum dan tata hidup kemasyarakatan pendekatan pemolisian semakin bergeser ke arah cara-cara yang lebih beradab, lebih menghargai hak-hak asasi manusia, dengan dasar kerja perangkat hukum yang lebih jelas dan lebih adil, serta dilengkapi metode yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang lingkup tugas polisi mencakup persoalan-persoalan umum maupun persoalan-persoalan yang sangat sensitif, baik bagi masyarakat, petugas polisi itu sendiri, maupun bagi pemerintah. Dalam sistem peradilan pidana polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyidikan banyak bersinggungan dengan masalah kebebasan, karena dalam tugasnya polisi sering harus melakukan operasi penahanan, penangkapan maupun interogasi, penyitaan dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih jauh lagi, salah satu peranan polisi adalah juga mencakup pengamanan kekuasaan pemerintah. Tugas tersebut menuntut polisi untuk memasuki percaturan politik secara lebih lugas, yaitu dengan melakukan kontrol dengan berbagai cara, seperti pencekalan, penahanan dan pengaturan perizinan. Dalam melakukan semua fungsi tersebut, polisi diharapkan tetap melakukannya dalam batas-batas yang diakui dan ditolelir oleh nilai-nilai hak-hak asasi manusia.

Dalam realitanya selama lebih dari 30 tahun polisi dalam menjalankan tugas penyidikan sering melakukan penyimpangan terhadap hukum dan sering

---

<sup>3</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil*, dalam KOMPAS, 1 Juli 1999, hlm. 4.

mengabaikan kemanusiaan yang berdampak negatif pada hubungan antara polisi dengan masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh polisi, menunjukkan kurang berfungsinya mekanisme pengawasan atau kontrol terhadap bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Selama ini polisi hanya digunakan sebagai alat kekuasaan oleh penguasa untuk menjaga ketertiban dan keamanan semata, sehingga melupakan fungsi utama sebagai penegak hukum itu sendiri, yakni perdamaian dalam masyarakat atau tercapainya keserasian antara kaidah-kaidah hukum yang ada dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Terlepasnya polisi dari ABRI (TNI) sejak 1 April 1999 dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, di mana Polri berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, terhitung sejak 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi berpisah dari Departemen Pertahanan, yang selanjutnya akan langsung berada di bawah wewenang presiden. Dengan demikian Kepala Kepolisian RI juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>4</sup> Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 pemisahan Kepolisian Negara RI dari Tentara Nasional Indonesia secara tegas dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000, dan sejak saat itu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.<sup>5</sup>

Pemisahan kepolisian dari Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tersebut tentu saja perlu kita sambut gembira. Namun apakah terpisahnya polisi dari Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tersebut akan membawa polisi menjadi lebih mandiri dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum?.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 butir 3 Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara peraturan perundang-undangan (pranata) yang mengatur bekerjanya lembaga kepolisian yang masih berlaku merupakan produk pemerintahan Orde Baru, di mana polisi digunakan sebagai alat kekuasaan oleh penguasa untuk mendukung rezim yang berkuasa. Di samping itu lebih dari 30 tahun kultur militer sudah tertanam melekat pada Polri sehingga tidak mudah untuk merubah menjadi polisi sipil. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada peradilan pidana.

Meskipun sudah 1 tahun lebih sejak terlepasnya polisi dari TNI, namun dalam kenyataan belum banyak terjadi perubahan perilaku polisi dalam menangani suatu kasus masih menunjukkan adanya diskriminasi dalam menyelenggarakan penyidikan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam peradilan pidana. Hal ini dapat terlihat dalam suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil atau wong cilik (kejahatan warungan) polisi cepat bertindak untuk melakukan penyidikan. Namun apabila dalam kasus tersebut diduga ada pejabat yang terlibat polisi enggan untuk melakukan penyidikan dan bahkan menghentikannya. Hal tersebut juga dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa pada tingkat penyidikan dapat disaksikan bagaimana sopan santun dan prosedur KUHAP dilaksanakan oleh petugas kepolisian apabila menanggapi tersangka preman jalanan dan tersangka dengan status sosial-ekonomi tinggi, sering dijumpai rekayasa ketentuan undang-undang sehingga tersangka yang berasal dari status sosial-ekonomi tinggi lebih “beruntung” nasibnya daripada mereka yang berasal dari strata sosial-ekonomi rendah.<sup>6</sup> Sependapat dengan uraian tersebut adalah Amin Rais mengemukakan, bahwa sampai saat ini belum ada niat sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum. Hukum masih berpihak pada yang kuat dan berkuasa, sehingga belum membela rakyat yang lemah.<sup>7</sup> Contoh kasus aktual: Cara Polri memproses pengaduan Jaksa

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 61.

<sup>7</sup> Amien Rais, *2001 KKN Bisa Lebih Canggih*, Kedaulatan Rakyat tanggal 2 Januari tahun 200, Hlm 12.

Agung Andi Muhammad Ghalib terhadap Teten Masduki dan Bambang Widjojanto atas tuduhan penghinaan. Menjadikan keduanya sebagai tersangka, sementara posisi kasus Andi Muhammad Ghalib yang ditangani oleh Polisi Militer dihentikan dengan alasan tidak ada bukti. Kemudian dalam kasus skandal Bank Bali dan kasus dana Yanatera Bulog atau "Bullogate" dan "Bruneigate", banyak pejabat yang diduga terlibat sebagaimana telah diputuskan oleh Panitia Khusus DPR, namun Polisi tidak menindaklanjuti keputusan tersebut. Di samping kasus aktual tersebut di atas masih banyak kasus yang sampai sekarang belum diketahui tindak lanjut dari polisi, misalnya kasus terbunuhnya Udin dan kasus terbunuhnya Marsinah. Sehingga banyak masyarakat yang melapor suatu tindak pidana kepada Polisi sering mengeluh, karena tidak jelas bagaimana laporannya ditangani. Di samping itu masyarakat juga sering bertanya sampai di mana kasus yang dilaporkan itu telah ditindaklanjuti oleh penyidik. Hal ini menunjukkan kurang adanya suatu kejelasan pertanggungjawaban polisi kepada masyarakat.

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena perangkat perundang-undangan (pranata) yang mengaturnya tidak mendukung polisi untuk mandiri dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam peradilan pidana, sehingga masih dimungkinkan adanya intervensi dari luar lembaga judicial. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain : Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 2 tahun 1988 tentang Keprajuritan ABRI. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut Polri merupakan bagian integral dari ABRI, Kapolri bertanggung jawab kepada Menhankam dan Pangab. Demikian pula dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih meletakkan Polri bagian dari ABRI.

Berkaitan dengan bekerjanya lembaga kepolisian, Laporan Penelitian tentang Studi Ekploratif Profesionalisme Dan Kinerja Polri oleh Kerjasama Dinas Penelitian Dan Pengembangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan Pusat

Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa profesionalisme dan kinerja Polri didukung dan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu : (1) profil dasar kepolisian; (2) profil kelembagaan kepolisian; (3) profil pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; (4) konteks sosial budaya; serta (5) konteks kebijakan Nasional.<sup>8</sup> Berkaitan dengan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian tersebut peranan ilmu pengetahuan dan pendidikan tetap memberikan sumbangan penting kepada kepolisian dalam rangka kemandiriannya.<sup>9</sup> Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ani Purwanti, bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia personil reserse, pendidikan kesersean merupakan hal yang mutlak harus diperoleh bagi setiap reserse. Disamping itu untuk meningkatkan profesionalisme polisi di bidang penyidikan, maupun optimalisasi di bidang penyidikan, maupun optimalisasi pada tugas-tugas lainnya, kepada lembaga kepolisian perlu diberikan otonomi yang luas untuk memberdayakan polisi di segala bidang.<sup>10</sup>

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas perlu kiranya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana sangat menarik untuk dikaji, agar dapat mengetahui gambaran tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

---

<sup>8</sup> Kerjasama Dinas Penelitian Dan Pengembangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan Pusat Studi Keamanan Dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, *Studi Eksploratif Profesionalisme dan Kinerja POLRI*, Yogyakarta, tanpa tanggal April Tahun 1999, hlm. 222-223.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Indonesia Mandiri*, dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 1, September 1999-April 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 23-28.

<sup>10</sup> Lihat Ani Purwanti, *"Profesionalisme Polisi di bidang Penyidikan"*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana UNDIP, Perpustakaan UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 234-235.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang mendasar yang saling berkaitan yang diajukan, yaitu :

1. Bagaimana kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana ?.
2. Aspek-aspek apakah yang berperan dalam menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari segi teoritis, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.
2. Memperoleh gambaran tentang aspek-aspek yang berperan dalam menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

Dari segi praktis, penelitian ini berguna untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep-konsep penegakan hukum di bidang penyidikan dan pengembangan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kebijakan tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Sehingga Polri di masa yang akan datang adalah polisi yang mandiri, profesional dan memiliki kinerja yang handal dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Realita menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia dewasa ini masih merupakan isu aktual yang menjadi fokus perhatian baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa selama 32 tahun pemerintah Orde Baru, 517 hari pemerintah era reformasi (transisi) berkuasa dan sampai sekarang (pemerintah hasil pemilu 1999) yang berkuasa, penegakan hukum belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat atau masih terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari dimensi pelaku kriminalitas dan dimensi korban kriminalitas. Ketidakadilan dari dimensi pelaku kriminalitas tampak dari upaya penerapan hukum yang bersifat diskriminatif sehingga prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) tidak terpenuhi baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan serta pada tingkat pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan ketidakadilan dari dimensi korban kriminalitas tampak dari gejala akhir-akhir ini terlihat di mana terdapat kecenderungan baru dalam peanggualangan kriminalitas khususnya terhadap mereka yang disangka preman. Penanggulangan (pemberantasan) terhadap preman yang terjadi karena kematian seorang anggota polisi oleh sekelompok pemuda di Jakarta telah diantisipasi dan ditangani secara menyeluruh di seluruh Polda di Indonesia, sedangkan tindakan serupa belum secara optimal dilaksanakan dalam kasus kejahatan lainnya.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, ditegaskan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh lembaga eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 62.

proses peradilan. Penegakan hukum belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.<sup>12</sup>

Bentuk ketidakadilan sebagaimana dikemukakan di atas cenderung akan menumbuhkan kecemburuan dalam penegakan hukum atau *judicial jealousy* (kecemburuan yudisial) yang pada gilirannya akan melahirkan dan menumbuhkembangkan kekerasan, mafia peradilan dan krisis kewibawaan hukum di mata masyarakat.

Masyarakat sebagai kekuatan inti dalam penegakan keamanan dan ketertiban, sering hanya merupakan slogan dan kurang didukung oleh sikap dan penghargaan aparaturnya terhadap masyarakat. Sebagai contoh, misalnya : perlakuan dan sikap aparaturnya terhadap saksi pelapor yang dalam kenyataan sering memperoleh perlakuan menjengkelkan, bahkan kadang-kadang diperlakukan sebagai tersangka.

Untuk terwujudnya suatu proses peradilan yang sesuai dengan negara yang berdasar atas hukum (bukan negara kekuasaan), kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) merupakan syarat dan kondisi agar asas-asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal ini mengandung arti bahwa peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga tersebut juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan tekanan. Untuk itu perlu adanya dukungan dari aparat pelaksana/penegak hukum/para pelaku lembaga tersebut yang mempunyai kualitas dan dedikasi yang tinggi. Karena secara konseptual penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum atau hukum yang masih abstrak menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Adanya keinginan hukum tersebut dikarenakan penegakan hukum bukan

---

<sup>12</sup> Lihat huruf C tentang Hukum pada Bab II tentang Kondisi Umum, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998.

<sup>13</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 98.



semata-mata pelaksanaan perundang-undangan. Sebab ada kemungkinan penegak hukum yang dalam melaksanakan hukum tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum namun justru mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Sementara itu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah dapat dicapainya, sedangkan yang dimaksud dengan kedamaian masyarakat berarti bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern, dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan pengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari segi keseluruhannya, maka penegkan hukum merupakan suatu sistem. Artinya, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dianut dengan kaidah hukum selaku penjabarannya serta dengan perilaku manusia sebagai pelaksanya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

<sup>15</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan Sosiologis)*, Cetakan keempat, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm. 34. Lihat Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 188-189.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Kelima faktor tersebut diatas satu dengan yang lain saling berkaitan erat di dalam mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas I.S. Susanto mengemukakan, bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu di samping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara kongkret melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.<sup>17</sup>

Dimensi perundang-undangan antara lain perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh “cacat” yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan-keuntungan/manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap undang-undang, korban/masyarakat, dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya. Sedangkan dimensi aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam proses bekerjanya hukum sangat menonjol, karena dia merupakan aparat penegak

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> I. S. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 9 Tahun 1992, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 17.

<sup>18</sup> *Ibid.*

hukum yang berada paling depan dalam sistem peradilan pidana, artinya di tangan polisilah mesin formal hukum mulai digerakkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam suatu penegakan hukum adalah sangat tergantung aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Setiap lembaga penegak hukum tersebut akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di muka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan tahap-tahap tersebut merupakan usaha untuk mencapai tujuan penegakan hukum melalui peradilan pidana.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dalam perkara pidana jalannya proses perkara pidana melewati empat tahap (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan). Masing-masing tahap proses tersebut merupakan sub sistem dari keseluruhan peradilan pidana. Jadi dalam sistem peradilan pidana yang terpadu terdiri dari empat sub sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Untuk itu masing-masing tahap (sub sistem) itu, undang-undang menetapkan pengalokasian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.<sup>20</sup> Dalam sistem tersebut menurut KUHAP diadakan penentuan batas-batas fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum tersebut tetap terjalin dalam satu ikatan kerja sama dan koordinasi fungsional instansional dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.<sup>21</sup>

Sejalan dengan dua pendapat tersebut di atas Anton Tabah mengemukakan bahwa secara prinsipiil pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legeslatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, tanggal 20 Desember Tahun 1997, hlm. 6.

<sup>21</sup> Harun M. husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 53.

aparatus penegak hukum dan karena itu di dalam pelaksanaannya mutlak disyaratkan peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Sehingga bermuara dalam apa yang disebut "*integrated criminal justice system*", yang memandang proses penyelesaian perkara pidana adalah suatu mata rantai dari keyakinan kesatuan penyidikan, penuntutan, penyidikan, pemutusan perkara dan pelaksanaannya secara terpadu.<sup>22</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum dalam *integrated criminal justice system*, KUHAP mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggung jawab serta menguasai pengetahuan, keterampilan bidang masing-masing secara profesional. Karena hanya dengan kemampuan profesional masing-masing aparat penegak hukum, pelaksanaan penegakan hukum dalam peradilan pidana akan berjalan sesuai dengan cita-cita hukum dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pembidangan tugas, fungsi dan wewenang, sebagaimana telah diuraikan di atas bukan berarti pengkotak-kotakan, tetapi merupakan suatu mata rantai koordinasi Polri sebagai penyidik tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan, yang secara keseluruhan akan memerlukan koordinasi fungsional dalam pelaksanaannya.

Adanya beberapa lembaga penegak hukum sebagaimana telah dikemukakan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda di dalam proses peradilan pidana, memerlukan pengorganisasian agar seluruh lembaga tersebut mengabdikan kepada tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian aparat penegak hukum tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen. Manajemen bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memanfaatkan keseluruhan

---

<sup>22</sup> Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik*, Sahabat, Klaten, 1996, hlm. 42.

sumber daya lembaga, dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik, informasi serta dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.<sup>23</sup>

Pengorganisasian lembaga-lembaga penegak hukum itu dilakukan di dalam struktur, prosedur-prosedur dan pembagian fungsi yang dirancang terlebih dahulu. Berdasarkan pengorganisasian yang telah dirancang, setiap lembaga penegak hukum akan berusaha menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Untuk keperluan tersebut, setiap lembaga penegak hukum kemudian berusaha mengembangkan pengorganisasian dalam bentuk pedoman, prosedur, tata kerja yang berlaku pada lingkup lembaga itu. Upaya setiap lembaga penegak hukum dalam rangka memaksimalkan penggunaan sumber daya merupakan proses adaptasi, yaitu strategi yang dikembangkan untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan sehingga mempunyai kemandirian dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Proses adaptasi setiap lembaga penegak hukum tersebut tergambar dari berkembangnya hukum-hukum kelembagaan yang tampak secara formal dan secara informal di dalam kehidupan lembaga penegak hukum.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas Satjipto Raharjo mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan sebagainya akan mengembangkan perlengkapan lembaga yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan pekerjaan. Pengembangan perlengkapan lembaga bisa berupa pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah kelembagaan, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Terbentuknya budaya di dalam lembaga yang mengelilingi bekerjanya lembaga ini, selanjutnya akan memberikan arah yang semakin jelas, yang disebut sebagai “menjalani kehidupan sendiri”. Hal tersebut terjadi karena lembaga-lembaga tersebut :

1. Menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Barang tentu tujuan tersebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Dengan dirumuskannya tujuan-tujuan seperti itu, maka lembaga pun lalu dapat menjalankan pekerjaannya secara seksama.

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 16.

2. Ke dalam, lembaga-lembaga hukum itu nanti akan membentuk sub-sub bagian sesuai dengan prinsip pembagian pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan pembentukan sub-sub bagian ini per kehidupan lembaga itu menjadi semakin rumit pula. Dari sini semakin jelas pula apa yang di muka dikatakan tentang terjadinya pergeseran perhatian terhadap masalah-masalah keorganisasian. Alih-alih memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakan hukum, orang disibukkan oleh berbagai persoalan organisasi.
3. Mengembangkan nilai-nilai sendiri. Pengembangan nilai-nilai ini dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga telah membagi diri ke dalam sub-sub bagian, maka penciptaan pola ini menjadi penting, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan menciptakan pengintegrasian yang demikian itu.
4. Menciptakan kaidah-kaidah sendiri. Ini merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkret dari pada nilai-nilai tersebut".<sup>24</sup>

Organisasi-organisasi dalam masyarakat modern disusun secara birokratis berdasarkan maksud untuk mencapai tingkat rasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis. Menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, terdapat empat ciri dasar organisasi birokratis, yang meliputi faktor spesialisasi, hirarkhi wewenang, sistem peraturan, dan hubungan yang tidak bersifat pribadi.<sup>25</sup> Selanjutnya analisis dimensi-dimensi terhadap birokrasi meliputi :

1. Dimensi peranan (*role dimension*), pada tingkatan ini perhatian terutama ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi;
2. Dimensi kelompok (*group dimension*), dimensi ini ada kalanya disebut dimensi struktural. Pada tingkatan ini perhatian ditujukan kepada pengaruh aktivitas seseorang atau kelompok orang terhadap tingkah laku orang lain, biasanya juga

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>25</sup> Lihat Peter M. Blau, Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, UI-Press, 1987, Hlm. 13.

ditujukan pada proses-proses sosial yang mewarnai organisasi informasi dalam kelompok kerja;

3. Dimensi organisasi (*organizational dimension*), pada tingkat ini organisasi terpusat pada organisasi secara utuh, bukan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok kerja.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa mesin administrasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu sistem yang didukung oleh tata manajemen yang menjurus ke arah birokrasi dan satu kesatuan kerja yang efisien untuk menanggulangi kejahatan. Setiap alat perlengkapan yang terlibat penegakan hukum mempunyai kedudukan menjadi sub sistem proses setiap alat perlengkapan mesin administrasi penegakan hukum menjadi komponen instrumental sistem atau linier sistem.<sup>27</sup>

Pengorganisasian lembaga-lembaga penegakan hukum atas dasar diferensiasi fungsional merupakan suatu bentuk pemberian otonomi pada masing-masing lembaga. Otonomi yang diberikan kepada setiap lembaga itu akan memberikan ruang gerak untuk mengolah sumber daya dalam rangka menjalankan fungsinya, sehingga kehidupan setiap lembaga menggambarkan respon organisasi terhadap beban tugas yang dihadapinya. Setiap lembaga akan berusaha untuk mengembangkan efisiensi kerja dengan cara merumuskan tata kerja dalam berbagai peraturan yang mengikat bekerjanya lembaga tersebut. Persoalan yang secara potensial akan muncul adalah apakah otonomi yang dikembangkan secara dinamis pada setiap lembaga akan selalu paralel dengan tujuan pokok dari seluruh lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dalam penegakan hukum polisi merupakan tokoh utama atau ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, karena

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 111-112.

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar teori - asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hml. 289.

polisilah yang paling pertama kali menangani suatu perkara (tindak pidana) yang bekerjanya atas dasar hukum formal. Oleh karena itu di tangan polisilah hukum formal pertama kali bekerja.

Sebagai landasan hukum bekerjanya polisi/tugas pokok polisi tersebut secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok polisi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 :

Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (1) :



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
- j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 :

Pasal 30 ayat (4)

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan;

- c. Membimbing bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (4) ini.

Berdasarkan rincian tugas polisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas polisi mencakup pelbagai aspek yang memerlukan tenaga, sumber daya manusia dan dedikasi yang tinggi guna mendukung tugas-tugas tersebut. Di samping itu guna menunjang terciptanya suatu penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terwujudnya kedamaian dan keadilan dalam masyarakat perlu polisi yang mandiri dan profesional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya. Kemandirian yang ditandai profesional khas kepolisian, yang menjamin tidak akan ada lagi intervensi terhadap tugas-tugas kepolisian utamanya tugas penegakan hukum. Dengan perkataan lain kemandirian polisi sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan politik polisi untuk menciptakan iklim kerja yang kritis, patriotik, independen dan partisipatif. Kemandirian yang sesungguhnya adalah polisi bebas dari tekanan kekuasaan.<sup>28</sup>

Berbicara masalah kemandirian dan profesionalisme polisi menurut Kunarto, kemandirian adalah kewenangannya tidak diintervensi oleh kekuatan apapun.<sup>29</sup> Sedangkan profesionalisme polisi adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan. Dengan demikian rasa aman, kebenaran dan keadilan adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan profesionalisme Polri tanpa kecuali.<sup>30</sup> Intervensi terhadap

---

<sup>28</sup> Lihat Erlangga Masdiana, *Pemisahan Polisi Menuju Masa Depan*, dalam KOMPAS, 19 April 1999, hlm. 23.

<sup>29</sup> Kunarto, *Beberapa Faktor Penentu Kultur Polri*, Permasalahan dan Pemetaan Pemikiran, Makalah Pada Seminar Nasional Membangun Kultur Baru Polri, Di UGM, Yogyakarta, tanggal 23 September, 1999, hlm. 18.

<sup>30</sup> Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Buku I, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm. 325.

pekerjaan kepolisian datang dari bermacam pihak dan kepentingan, bukan hanya militer melainkan juga politik, ekonomi, bahkan pemerintah.<sup>31</sup>

Berhubungan dengan kemandirian dan profesionalisme Polri tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa:

“dorongan ke arah kemandirian” adalah tafsiran Indonesia untuk pengertian “dorongan ke arah profesionalisme”. Melalui wacana kemandirian Polri ingin diteguhkan, bahwa bagi Indonesia, profesionalisme Polri adalah masalah kemandirian organisasi dan kemandirian substansi, dalam hal ini perpolisian yang tidak militeristik. Lepas dari pola, perilaku dan dominasi militer adalah credo Indonesia untuk kemandirian.”<sup>32</sup>

Sependapat dengan uraian tersebut Nurfaizi mengemukakan, bahwa kata kunci yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat madani adalah Polri Baru yaitu Polri yang mandiri dan profesional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya. Kemandirian yang ditandai profesionalisme khas kepolisian, yang menjamin tidak akan ada lagi intervensi terhadap tugas-tugas kepolisian utamanya tugas penegakan hukum.<sup>33</sup>

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas dikaitkan dengan kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana adalah mandiri baik organisasi maupun substansi dalam arti polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan ditandai profesionalisme yang tidak diintervensi oleh kekuatan militer, politik, ekonomi dan pemerintah. Di samping itu dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada peradilan pidana yang dilandasi sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebenaran dan rasa keadilan lepas dari pola dan perilaku serta dominasi militer.

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Indonesia Mandiri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: I, september 1999-April 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 21.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>33</sup> Nurfaizi, *Membangun Kultur Polri Yang Berorientasi Publik (persepsi dan komitmen Polri)*, Makalah pada Seminar Nasional Membangun Kultur Baru Polri di UGM Yogyakarta tanggal 23 September 1999, hlm. 5.

Dalam operasionalisasi tugas-tugas kepolisian terutama dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum di masyarakat, masih dijumpai banyak kendala, antara lain :

1. Instrumen hukum yang belum memadai.
2. Keterpaduan penegak hukum yang belum baik.
3. Sarana dan prasarana kepolisian yang minim.
4. Political will penyelenggara negara yang belum sepadan.
5. Sistem peradilan dan penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya.
6. Budaya ewuh pakewuh dan mikul duwur mendhem jero yang keliru penempatannya.
7. Kesadaran hukum dan disiplin masyarakat yang masih rendah.
8. Mutu profesionalisme Polri yang belum sesuai harapan.
9. Mental sebagian oknum Polri yang masih harus dibenahi.
10. Kemampuan managerial tingkat Kapolsek masih rendah.<sup>34</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mengetahui gambaran tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan aspek-aspek yang berperan terhadap kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana, kiranya dapat digunakan konsep-konsep pemikiran atau sistematika sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa pendapat tersebut di atas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Di samping itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang menjadi dasar pola-pola perilaku polisi sebagai

---

<sup>34</sup> Anton Tabah, *op cit.*, hlm. 63.

penyidik dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>35</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologi.<sup>36</sup> Hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan teknis-teknis pelaksanaan penegakan hukum dari faktor-faktor yuridis, yakni menyangkut struktur, substansi lembaga kepolisian. Di sisi lain mengingat penelitian ini langsung berhubungan dengan subjek penelitian/informan (masyarakat) dalam hal ini perilaku polisi (reserse) dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesis.<sup>37</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok, sebagai tempat pengambilan subyek penelitian/informan. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, pengambilan subyek penelitian/informan juga akan dilakukan pada: lembaga kejaksaan (Kekayaan Negeri Sleman), lembaga peradilan (Pengadilan Negeri Sleman), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dengan pertimbangan faktor dana dan waktu. Di samping itu lokasi penelitian tersebut cukup lengkap dan memadai dalam menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-

---

<sup>35</sup> Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 3.

<sup>36</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 49.

<sup>37</sup> Lihat Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 4-5.

proses sosial. Hal ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, yaitu untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam dan rinci.<sup>38</sup>

### 3. Penentuan Subjek Penelitian/Informan

Penentuan subjek penelitian/informan ini disesuaikan dengan cara metode penelitian kualitatif, yaitu usaha untuk memperoleh informasi yang ingin diketahui. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Untuk itu peneliti memilih subjek penelitian/informan dengan cara purposive sampling, yakni memilih sampel atau subjek penelitian /informan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>39</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek penelitian didasarkan pada tujuan tertentu, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>40</sup>

Adapun kriteria atau pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang benar-benar mengetahui dan memahami fenomena sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan sumber informasi (informan) yang diperlukan dalam penelitian. Untuk itu sebagai subjek penelitian (informan) awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kaditserse Polda DIY.
- b. Salah seorang penyidik di lingkungan Polda DIY.
- c. Kasatserse Polres Sleman.

---

<sup>38</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hal. 22.

<sup>39</sup> Lihat Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 67.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1988, hlm. 51.

- d. Salah seorang penyidik di lingkungan Polres Sleman.
- e. Kanit Polsek Depok.
- f. Salah seorang penyidik di lingkungan Polsek Depok.
- g. Salah seorang Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Sleman.
- h. Salah seorang Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman.
- i. Salah seorang advokat di lingkungan LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- j. Salah seorang tersangka yang sedang menjalani tahanan di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok.

Pengambilan sampel berikutnya dilakukan dalam proses penelitian dengan mengikuti prinsip “bola salju”, pilihan sampel akan berakhir setelah ada indikasi tidak munculnya variasi informasi yang baru.<sup>41</sup>

#### 4. Sumber Data

Mengingat objek penelitian ini menyangkut struktur dan substansi lembaga kepolisian serta proses kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum yang melibatkan berbagai aspek yang berperan di dalamnya, sehingga sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum, yaitu polisi (reserse) yang menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana sebagai data utama, aparat penegak hukum yang lain, yaitu jaksa, hakim dan advokat serta tersangka yang terkait di dalam tugas proses bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dalam peradilan pidana.

---

<sup>41</sup> Sanapiah Faisal, *op cit.* hlm, 158,159.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini peneliti memilih metode wawancara, karena penelitian ini lebih menekankan kepada bekerjanya lembaga kepolisian. Bekerjanya lembaga kepolisian yang melibatkan beberapa aspek pendukungnya merupakan suatu proses pengorganisasian fungsi kepolisian, sehingga untuk menggambarkan kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada peradilan pidana lebih banyak menyangkut tindakan perilaku aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di samping itu, apa yang ditanyakan kepada subjek penelitian /informan bisa mencakup hal yang bersifat lintas waktu berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur dan mendalam. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat secara garis besar pertanyaan yang diajukan, sedang proses dan isi wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sedangkan wawancara mendalam merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan yang dikemukakan secara bebas dan berterus terang.<sup>43</sup> Wawancara mendalam tersebut digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menekankan kepada bekerjanya suatu lembaga yang banyak diwarnai oleh tindakan dan perilaku aparat penegak hukum sebagai organ yang menjalankan lembaga tersebut sebagai data primer.

### b. Observasi

Pada tahap observasi peneliti hanya melakukan pengamatan dengan tidak berpartisipasi aktif, dimana peranan peneliti sebagai pengamat yang tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi masih melakukakn pengamatan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit.*, hlm 61.



Pengamatan tersebut dilakukan sejak proses penyidikan awal, yakni pemanggilan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan lain-lain.

### c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi.<sup>44</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi dan memperjelas hasil informasi dari wawancara maupun observasi yang berkaitan dengan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana, aspek-aspek yang berperan menunjang terhadap kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana..

## 6. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa induktif yang dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. Analisa induktif ini digunakan untuk menilai dan menganalisa data yang telah difokuskan tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dalam peradilan pidana, aspek-aspek yang berperan menunjang terhadap kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana.

Analisa induktif dalam penelitian ini digunakan dengan cara menganalisa hal-hal yang khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta. Adapun prosedur atau langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini, sebagai berikut:<sup>45</sup>

### 1. Reduksi data

---

<sup>44</sup> Lihat Harsimi Arikunto, Mencari data menggunakan hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 188.

<sup>45</sup> Lihat Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-PRESS, Jakarta, 1992, Hlm. 16-21.

Data yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan merupakan data yang masih mentah yang masih bersifat acak-acakan dan kompleks. Untuk itu peneliti melakukan seleksi data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan cara memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan memilih data yang mampu menjawab permasalahan penelitian, selanjutnya data disederhanakan.

## 2. Unitisasi dan kategorisasi

Data yang telah direduksi atau telah disederhanakan tersebut kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang pokok dan penting. Unit-unit yang telah terkumpul tersebut dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil wawancara dan pengamatan.

## 3. Display data/penyajian data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Penyajian data dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana dan aspek-aspek yang berperan menunjang terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

## 4. Kesimpulan/verifikasi

Data yang telah difokuskan tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang masih bersifat kaku dan sangat tentatif tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektivitasnya terjamin.

## 7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembanding terhadap data melalui sumber lainnya.<sup>46</sup> Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah “teknik triangulasi dengan sumber”. Melalui teknik ini peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana dan aspek-aspek yang berperan dalam menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di sini dibagi menjadi empat bab. **Bab Pertama** merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. **Bab Kedua** merupakan Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Selintas Perkembangan Lembaga Kepolisian Menurut Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang. Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana meliputi konsep penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana, struktur organisasi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan konsep kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana.

Selanjutnya dalam **Bab Ketiga**, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan atas permasalahan yang diteliti. Terdapat dua pembahasan, yaitu pertama pembahasan tentang Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm. 178.

Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum dalam Peradilan Pidana dan Aspek-aspek yang Berperan Menunjang terhadap Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum dalam Peradilan Pidana

**Bab Keempat**, merupakan Penutup yang memuat Kesimpulan serta Saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Selintas Perkembangan Lembaga Kepolisian Menurut Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.**

Dalam sejarah ketatanegaraan kedudukan Lembaga/Organisasi Kepolisian sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang sampai dengan masa-masa kemerdekaan dan hingga kini banyak mengalami perubahan. Walaupun tujuan utama dan hakikatnya tetap yaitu “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keselamatan negara”. Namun dalam perkembangan sejarahnya terutama kedudukan dan struktur organisasi di dalam pemerintahan mengalami proses perkembangan, sesuai dengan situasi dan kebutuhan tugas serta bentuk pemerintahan yang dianut. Untuk memperjelas, berikut ini akan dikemukakan lembaga/organisasi kepolisian dari masa ke masa.

##### **1. Masa Penjajahan Belanda.**

Lembaga Kepolisian/organisasi Kepolisian telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa ini, kepolisian tidak sepenuhnya berada di bawah Departemen Dalam Negeri (Departemen *Van Binnen Landsze*). Meskipun kepolisian berkantor di Departemen Dalam Negeri dengan sebutan *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie*, namun hanya bertugas di bidang administrasi, pembinaan dan pendidikan kepegawaian serta perlengkapan.

Teknis operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu oleh asisten residen dan bertanggung jawab kepada *Procureur General* (Jaksa Agung). Oleh karena itu dalam bidang penegakan hukum pada masa penjajahan Belanda, polisi merupakan pembantu jaksa dalam hal penyidikan. Pada masa tersebut, juga terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti Polisi Kota (*Stads Politie*), Polisi

lapangan (*Veld Politie*), Polisi Perkebunan (*Cultur Politie*) dan Polisi Pangreh Praja (*Bestuurs Politie*).<sup>1</sup>

Pada masa penjajahan Belanda itu, peran polisi semata-mata adalah sebagai alat kolonial. Selanjutnya mengenai wewenang, hak dan kewajiban atau tugas polisi diatur secara terperinci dalam HIR (*Het Herziene Inlandsch Relement*) Staatsblad Tahun 1941 No. 44.

Keadaan kepolisian sebagaimana telah dikemukakan di atas berlangsung hingga tahun 1942 yakni pada waktu Jepang menduduki Indonesia dan memaksa Pemerintah Hindia Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

## 2. Masa Penjajahan Jepang.

Struktur organisasi kepolisian pada masa penjajahan Jepang melanjutkan dan berpegang pada struktur organisasi kepolisian pada masa penjajahan Belanda dengan sedikit perubahan. Pada masa penjajahan Jepang ini, di daerah-daerah terdapat kantor polisi yang dipimpin oleh seorang pejabat kepolisian Bangsa Indonesia, namun selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang dalam praktik jauh lebih berkuasa dari kepala polisinya. Menurut M. Faal perubahan yang dimaksud antara lain:

1. Kepolisian di Sumatera, Jawa dan Madura dipimpin oleh *Cianbucho* (Kepala Bagian Keamanan) di kantor *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Pendudukan Daerah Sumatera, Jawa dan Madura) di Jakarta. Secara hierarchi ia membawahi *Cianbucho* dari kantor *Syuchokan* (Kepala Pemerintahan Pendudukan sekaresidenan).
2. Urusan Kepolisian dan Kejaksaan dipersatukan dalam satu tangan yaitu di tangan *Chianbucho* tersebut di atas.
3. Pamongpraja tidak diberi wewenang kepolisian, tidak lagi berwenang menangkap dan melakukan penyidikan.

---

<sup>1</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 47.

4. Pimpinan atas organisasi *Keibodan* (semacam Hansip) dipegang oleh kepolisian.
5. Latihan kemiliteran di kepolisian lebih ditingkatkan dan dalam tubuh organisasi kepolisian dibentuk satuan baru, yaitu pasukan *Tokubetsu Keisatsutai* (Polisi Istimewa) yang merupakan pasukan tempur guna membantu dan memperkuat satuan Polisi Umum.

Kalau Jawa, Madura dan Sumatera dikuasai pendudukan Angkatan Darat Jepang, sedang urusan kepolisian berpusat di Jakarta, maka untuk wilayah timur besar (Wilayah Indonesia Timur) yang urusan kepolisiannya berpusat di Makasar dan Kalimantan ini diduduki oleh Angkatan Laut Jepang. Kepala pemerintahan pendudukan Angkatan Laut dinamakan *Ninseifu Tyokan*.<sup>2</sup>

Di masa penjajahan Jepang ini, tidak seperti *Herzeine Indische Regeling* (HIR) yang mana polisi hanya sebagai pembantu Jaksa. Akan tetapi, polisi diberi tugas untuk mengadakan penyidikan dalam perkara pidana, selain memimpin organisasi *Keibodan* (Hansip).<sup>3</sup>

### 3. Masa UUD 1945 ( 18-8-1945 s/d 27-12-1949).

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan sebutan Jawatan Kepolisian Negara. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia waktu itu secara administratif sama dengan Dinas Polisi Umum pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun tidak merupakan angkatan bersenjata, pada masa awal kemerdekaan tugas utama para anggota Polisi Negara Republik Indonesia adalah melakukan pertempuran untuk melucuti (merebut) senjata tentara Jepang dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>3</sup> Awaludin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, Cetakan kedua, YKTI, Jakarta, 2000, hlm. 34.

menghadapi tentara sekutu yang mendarat di Indonesia dengan diboncengi tentara Belanda. Sebagai satu-satunya kekuatan inti berdasarkan atas kesadaran diri sebagai bagian dari rakyat yang sedang berjuang untuk melawan Belanda.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1946 keluar Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 yang menetapkan Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri dan dijadikan Jawatan tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri. Penetapan pemerintah tersebut merupakan peraturan yang mengadakan pembaharuan terhadap status polisi yang merupakan pula permulaan titik terang ke arah perkembangan kepolisian di Indonesia.

Dengan diletakkannya Kepolisian Negara di bawah Perdana Menteri, secara kelembagaan Polri adalah lembaga pemerintah yang sederajat departemen dan kedudukan Kapolri setingkat menteri. Itulah sebabnya mengapa “Hari Kepolisian” diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada saat itu Jawatan Kepolisian Negara mencatat jumlah anggota Polri sebanyak 31.620 dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta. Dengan demikian *police population ratio* atau dikenal *police hazard* waktu itu adalah 1 : 500. Hal tersebut merupakan suatu angka perbandingan yang ideal untuk waktu sekarang ini.

Pada saat itu Polri di samping melaksanakan tugasnya sebagai Penegak Hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia dan menyatakan diri sebagai “*Combatan*”, kedudukan Polri berubah di bawah Presiden/Wakil Presiden melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 4 Februari 1948.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas menurut Kunarto, pada masa berlakunya UUD 1945 tersebut, perkembangan organisasi kepolisian dibedakan menjadi dua masa, yaitu :

---

<sup>4</sup> Kunarto, *Perkembangan Kepolisian Dalam Sistem Administrasi Negara Pada Era Reformasi*, Bahan Seminar pada Kepolisian Negara RI di Sespim Polri Lembang, tanggal 29 Juli 1998, hlm. 1.

<sup>5</sup> Tim Pokja Reformasi Polri Mabes Polri, *Reformasi Menuju Polri Yang Profesional*, Jakarta, 1999, hlm. 12.



1. Masa sebelum Agresi I Belanda tanggal 21 Juli 1947, pengembangan yang dilakukan adalah:
  - a. Membentuk Dinas Pengawasan Aliran Masyarakat (DPAM);
  - b. Menyusun dan membentuk kembali Polantas;
  - c. Membentuk kekuatan pemukul Brigade Mobil Polri pada tanggal 14 Nopember 1946.
  - d. Mendirikan Akademi Polisi pindah ke Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi pertama RI.
2. Masa setelah terjadi Agresi I, pengembangan organisasi yang terjadi di lingkungan Polri, berupa :
  - a. Polisi dimiliterisasikan oleh Dewan Pembaharuan Negara dengan Penetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor 112 tertanggal 1 Agustus 1947.
  - b. Mulai 1 Desember 1947 Polri di bawah Perdana Menteri;
  - c. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 4 Februari 1948 Polri dikendalikan oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri/Wakil Perdana Menteri;
  - d. Dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1949 tanggal 15 Juli 1949 Polri membawahi pada Menhankam.<sup>6</sup>

Dalam kurun waktu I berlakunya UUD 1945 tersebut, struktur organisasi kepolisian mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat situasi negara yang tidak menentu. Namun dalam kedudukan polisi sebagai aparat penegak hukum dia tetap berada di bawah kendali Kejaksaan Agung sesuai dengan HIR.

Permasalahan yang timbul kemudian, harapan masyarakat untuk menciptakan polisi yang profesional sebagai pengayom dan penjaga keamanan masyarakat serta aparat penegak hukum yang handal menjadi tidak tercapai. Sebab, di satu sisi Polri dituntut untuk segera mungkin membenahi organisasinya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Akan tetapi di lain sisi struktur organisasi polisi selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan dinamika saat itu. Sementara dalam melaksanakan beban tugas yang berat, Polri seolah-olah memiliki dua kepala. Sebagai aparat penegak hukum, Polri adalah pembantu jaksa dalam melakukan tugas penyidikan, berarti bertanggung jawab kepada Kejaksaan Agung. Sedangkan sebagai

---

<sup>6</sup> Kunarto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

penjaga keamanan, ketertiban dan pengayom masyarakat, Polri rentan terhadap perubahan struktur organisasinya.

#### 4. Masa UUD RIS ( 27-12-1949 s/d 17-8-1950).

Setelah dilakukan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berlaku Undang Undang Dasar RIS. Pada masa berlakunya UUD RIS tersebut di Indonesia terdapat dua bentuk kepolisian, yaitu kepolisian negara bagian dan kepolisian RIS. Di samping itu di beberapa daerah terdapat Polisi Swapraja, misalnya di Sulawesi Selatan, sedangkan untuk daerah Bali Pemerintah Dewan Raja Raja (Federal Bali) mempunyai polisi sendiri yang disebut Polisi daerah. Sebagai Kepala Jawatan Kepolisian RIS adalah R.S. Soekanto dan R. Sumarto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang berkedudukan di Yogyakarta.<sup>7</sup>

Pada masa RIS tersebut Jawatan Kepolisian Negara dalam kebijaksanaan politik polisionil dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kepolisian Negara bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri (Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1950). Selanjutnya dengan Penetapan Perdana Menteri No. 3/MP/1950 Polri berstatus di bawah Menteri Pertahanan. Mengingat usia RIS hanya beberapa bulan, sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Ketetapan Presiden RIS Nomor 150 Tahun 1950 organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administrasi, organisatoris.

Dalam hubungan tersebut, disusunlah syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pimpinan tertinggi dalam hal menggerakkan organisasi dan pemeliharaan peralatan berada dalam satu tangan.

---

<sup>7</sup> Lihat Awaloedin Djamin, *Perkembangan Kepolisian Dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Disampaikan dalam Diskusi Panel "Reformasi Kepolisian di Indonesia", diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas hukum UNDIP Semarang, 27 Juni 1998, hlm. 5.

2. Adanya penetapan pembagian kekuasaan yang terang dan tegas antara kekuasaan kepolisian sipil dengan posisi militer dan lain-lain instansi sipil.
3. Perlunya undang-undang baru untuk mengganti undang-undang lama yang tidak sesuai dengan perubahan dasar polisi tersebut di atas. Misalnya, undang-undang yang merubah HIR dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Ditetapkannya syarat-syarat tersebut di atas menunjukkan suatu kemajuan bagi perjuangan status kepolisian untuk mengadakan pembatasan yang jelas dan tegas mengenai fungsi dan kewenangannya dengan militer.

#### 5. Masa UUDS (17-8-1950 s/d 5-7-1959).

Pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuknya Negara Kesatuan dan berlakunya UUDS sudah dapat diwujudkan suatu organisasi kepolisian untuk seluruh Indonesia dengan nama Jawatan Kepolisian Indonesia yang kemudian diubah Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, Polri adalah independen, baik operasional maupun pembinaan. Pada kabinet (kantor) Perdana Menteri terdapat Biro Keamanan yang membantu Perdana Menteri di bidang Kepolisian. Dari kriminalitas, sampai spionase, terorisme dan lain-lain ditangani polisi tanpa ada intervensi dari instansi lain. Di samping itu sebagai aparat penegak hukum, pejabat atasan Polri juga tidak boleh mengintervensi bila ada kasus penyidikan yang ditangani bawahan. Kesatuan atasan hanya memberi bantuan teknis bila diperlukan. Dalam pembinaan Kepala Kepolisian Negara menetapkan susunan organisasi perencanaan kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan, kebutuhan materiil (seperti laboratorium, identifikasi forensik, komunikasi elektronik, kapal patroli polisi, pesawat udara dan lain-lain).<sup>9</sup>

Selanjutnya pada tanggal 8 April 1959 Kepolisian Negara RI dimiliterisasikan lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Awaludin Djamin, Op. Cit., hlm. 39.

<sup>9</sup> Awaludin Djamin, *Kemandirian Polri Pascapemisahan Dari Dephankam*, Jurnal Polisi Indonesia Tahun 1, September 1999-April 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, hlm. 5.

Peraturan Pemerintah tersebut Polri dimiliterisasikan dalam rangka keamanan dan ketertiban umum (KAMTIBUM) dan pertahanan berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa pada masa UUDS, Kepolisian bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, Polri melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat dan ikut secara aktif dalam penumpasan pemberontakan dan operasi-operasi militer.

#### 6. Masa Kembali Ke UUD 1945 (5-7-1959 s/d 11-3-1966).

Pada masa kembali ke UUD 1945, yakni setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana pada masa itu berlaku Demokrasi Terpimpin dan pemerintahan presidensiil, terjadi integrasi dari ABRI dan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Secara kronologis prosesnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Juli 1959 keluar Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1959, yang intinya menyatakan Polri dimasukkan di bidang pertahanan dan keamanan dan pimpinannya disebut Menteri Muda Kepolisian yang duduk sebagai anggota kabinet. Selanjutnya militerisasi Polri setelah tahun 1960 dilakukan dengan mengintegrasikan Polri ke dalam ABRI. Hal ini dilakukan karena pertahanan nasional juga merupakan tugas pokok Polri dan melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diganti dengan "Menteri". Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 dinyatakan bahwa Angkatan Bersenjata kita terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara.<sup>10</sup> Ketetapan MPRS tersebut kemudian diikuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, menentukan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Di samping itu Pasal 7 dan Pasal 8 secara tegas menyebutkan bahwa status Polri berada

---

<sup>10</sup> Lihat Lampiran A, Pasal 54 butir c Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

di bawah Departemen Kepolisian Negara yang dipimpin oleh Menteri Kepolisian/Pangak.<sup>11</sup>

Selanjutnya pada tanggal 12 April 1962, dengan Keputusan Presiden No. 134 Tahun 1962 sebutan Menteri/Kepala Kepolisian Negara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1962 diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara. Berdasarkan Surat Deputi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara Nomor Pol. 3/3/3 tanggal 30 April 1962 sebutan Kepolisian Negara diubah menjadi Angkatan Kepolisian Negara.

Kemudian pada tanggal 12 Nopember 1964 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 1964 yang antara lain menyatakan bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia disingkat AKRI sebagai anggota angkatan bersenjata adalah sama dan sederajat dengan tiga angkatan lainnya. Di samping melaksanakan tugas kepolisian, AKRI mempunyai tugas turut serta secara fisik aktif dalam usaha pertahanan negara guna mencapai potensi maksimal rakyat di dalam pertahanan total serta pengamanannya.<sup>12</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa integrasi Polri ke dalam ABRI yang dilakukan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 maupun Pasal 3, 7, dan 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 baru dijalankan setengah-setengah (50%). Hal ini dapat diketahui dari pernyataan bahwa Kepolisian Negara adalah antara sipil dan militer. Di samping itu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 1964 tentang kedudukan AKRI, tugas-tugas dan tanggung jawab AKRI sebagai angkatan bersenjata sebagaimana disebutkan di atas, maka secara yuridis formal terjadi integrasi penuh AKRI dalam ABRI.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 1964.

## 7. Masa Orde Baru (11-3-1966 s/d Sekarang).

Pada masa Orde Baru, integrasi AKRI dalam ABRI diperkuat dengan alasan apabila ABRI pecah, maka negara bisa pecah. Kedudukan Menteri dan sebutan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri dihapus. Kemudian pada tahun 1967 diciptakan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI.<sup>13</sup>

Integrasi AKRI dalam ABRI pasca G 30 S/PKI pada mulanya dimaksudkan untuk menyatukan mental kejuangan dan militansi ABRI. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1969 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1969 yang mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 1964. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut diadakan perubahan sebutan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Kepolisian RI. Kepolisian RI ini berkedudukan organik dalam Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1969 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969 yang kemudian disusul Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1969 tentang ABRI sebagai bagian organik Departemen Pertahanan Keamanan. Dalam Keputusan Presiden tersebut ditentukan bahwa ABRI yang merupakan bagian pokok Departemen Pertahanan Keamanan terdiri dari:

- (1). Angkatan Perang Republik Indonesia di singkat APRI yang meliputi Angkatan Darat Republik Indonesia yang disingkat ADRI, Angkatan Laut Republik Indonesia yang disingkat ALRI dan Angkatan Udara Republik Indonesia yang disingkat AURI.

---

<sup>13</sup> Awaloedin Djamin, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

(2). Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri.<sup>14</sup>

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikatakan sebagai karya agung, Polri diberi tugas sebagai aparat penyidik yang mandiri dalam pengertian tidak sebagai pembantu jaksa sebagaimana ketentuan HIR. Kemudian pada tahun 1982 terjadi perubahan status Polisi lagi, yakni terjadi integrasi Polri ke dalam ABRI, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Berdasar Undang-Undang tersebut, ABRI terdiri dari: (1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya; (2) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta cadangannya; (3) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta cadangannya dan (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Dengan demikian sejak berlakunya undang-undang tersebut Polri merupakan bagian integral dari ABRI dan berkedudukan langsung di bawah Panglima ABRI. Status tersebut lebih diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya, integritas “berlebihan” dengan segala ketentuan angkatan perang juga diberlakukan bagi Polri, seperti pendidikan, sistem anggaran dan keuangan, materiil dan lain-lain. Dengan demikian citra kepolisian semakin merosot, karena kekeliruan penjabaran integritas ABRI, Karena Polri tunduk pada Panglima ABRI, di mana Wakil Panglima ABRI merangkap Pangkobkamtib maka intervensi TNI dalam tugas operasional Polri tidak dapat dihindarkan, sehingga sikap dan perilaku anggota Polri sangat represif atau telah menjadi “militeristik”.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1969.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982.

Dengan demikian, mencermati perkembangan kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian dari masa penjajahan hingga masa Orde Baru tersebut di atas tersirat adanya pergeseran visi, misi dan tujuan kepolisian. Pergeseran tersebut utamanya disebabkan oleh kedudukan dan peran kepolisian dalam sistem politik negara yang memberikan beban pada kepolisian sebagai alat kekuasaan, yang jelas bertentangan dengan visi, misi dan tujuan kepolisian secara universal.

Tujuan menangkal bahaya, memberikan pelayanan dan pengayoman untuk mencapai ketertiban dan ketentraman serta memberikan jaminan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan menjadi terabaikan. Pada akhirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tidak mandiri dan profesional sehingga jauh dari masyarakat.

Menurut Awaloedin Djamin, sejak lama Polri menyatakan bukan angkatan perang melainkan alat negara penegak hukum yang harus mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, dan oleh karena itu Polri mengusulkan agar ia diberikan otonomi operasional (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Selain itu juga diusulkan agar diberikan otonomi pembinaan terutama perencanaan anggaran personil, pendidikan dan materiil.<sup>16</sup> Namun dalam kenyataan usulan tersebut tidak dapat menghasilkan "*political will*" Pemerintah, sementara itu para pakar, mahasiswa, tokoh dan masyarakat mulai menuntut agar Polri dikeluarkan dari ABRI.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagai akibat gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa yang berakibat lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sebagai penggantinya adalah Presiden B.J. Habibie yang dikenal pemerintahan transisi. Pada masa transisi tersebut pada bulan Oktober 1998 Menhankam/Pangab Jendral Wiranto menyatakan bahwa Polri akan dikeluarkan dari ABRI. Akhirnya sejak 1 April 1999 dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 Polri secara struktural dipisahkan dari ABRI.

---

<sup>16</sup> Awaloedin Djamin, *Op. Cit.*, hlm. 8.



Hal ini merupakan suatu proses menuju Polri mandiri.

Dalam masa transisi tersebut Polri diletakkan di bawah Menhankam, pemindahan wewenang pembinaan pertanggungjawaban yang selama ini dipegang Pangab. Sebagai tindak lanjut dari proses menuju Polri mandiri tersebut akhirnya pada tanggal 1 Juli 2000 bertepatan dengan peringatan hari Bhayangkara yang ke 56, dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 secara resmi lembaga kepolisian lepas dari TNI dan langsung berada di bawah presiden. Pada tanggal 18 Agustus 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.<sup>17</sup>

## **B. Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana.**

Berbicara tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana terlebih dahulu perlu diketahui mengenai konsep penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana dan struktur organisasi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

### *1. Konsep Penegakan Hukum Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana.*

Sesuai Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, Negara Indonesia ialah negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi “*center of action*”, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan-tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum harus

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Berkaitan dengan fungsi hukum, I.S. Susanto mengemukakan bahwa fungsi primer hukum adalah:

1. *Perlindungan*. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.
2. *Keadilan*. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
3. *Pembangunan*. Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual. Dengan demikian hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan adil.<sup>18</sup>

Berhubungan dengan uraian tersebut di atas Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan

---

<sup>18</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan, Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Oktober 199, hlm. 17-18. Lihat juga I.S. Susanto, *Mengembangkan Sistem Hukum Yang Berpihak pada Rakyat Banyak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Paradigma Ilmu Hukum Dalam Memasuki Milenium Ketiga", Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 18 November 2000, hlm. 2-3.

hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>19</sup>

Berkaitan dengan keadilan yang merupakan salah satu bagian dari fungsi hukum tersebut, maka setiap warga negara harus diperlakukan secara sama sebagaimana warga negara mempunyai hak hidup lainnya yang harus dilindungi oleh hukum dan pemerintah.<sup>20</sup>

Demikian juga dalam politik hukumnya yang menjadi kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, arah kebijakan hukum meliputi:

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
- b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
- c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
- d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
- e. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
- f. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
- g. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

---

<sup>19</sup> Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 134. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

<sup>20</sup> Lihat Ramly Hutabarat, *Persamaan Di hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 15-16.

- h. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- i. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
- j. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas secara teoritis, hukum di Indonesia sudah mengemas nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana yang dituntut oleh hukum. Namun apresiasi hukum dalam praktik di lapangan banyak menghadapi kendala. Dampaknya sangat luas antara lain: hukum menjadi sakit, instrumen hukum kurang memadai, aparaturnya penegak hukum kurang berwibawa dan sistem peradilan tidak efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan-pembuatan perundang-undangan (*law making proses*). Di sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).<sup>21</sup>

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat

---

<sup>21</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 69-70.

baik dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana diuraikan di atas serta asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa yang beradablah yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang, yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Hal tersebut relevan dengan Laporan Seminar Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979 yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.<sup>23</sup>

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum. Hal ini juga dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah.<sup>24</sup>

“ .... kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara, dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup”.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Huku Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 24.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm. 34. Lihat Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 188-189.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses, yakni proses untuk mewujudkan hukum yang masih abstrak menjadi konkrit. Artinya peraturan perundang-undangan tidak banyak arti apabila tidak diaplikasikan secara konkrit oleh petugas.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni:

1. Faktor hukumnya atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Dari kelima faktor tersebut satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi penyelenggaraan proses penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia. Meskipun demikian dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum atau manusialah yang lebih dominan dibandingkan dari keempat faktor lainnya. Betapa pun undang-undangnya sudah baik, didukung dengan sarana yang memadai serta partisipasi yang positif dari masyarakat, namun bila ditangani oleh aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab serta kurang memiliki moral yang baik, dapat dipastikan akan menghasilkan penegakan hukum yang bisa mengarah pada penyimpangan yang merugikan negara dan pencari keadilan.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Antonius Sujata, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Lebih lanjut Antonius Sujata yang mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne, mengemukakan bahwa “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.<sup>26</sup> Sependapat dengan uraian tersebut

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Antonius Sujato, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta, 2000, hlm. 7.

M. Dimiyati Hartono mengemukakan bahwa unsur aparat penegak hukum bersifat dominan terhadap tegaknya hukum.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut, dari tatahukum Indonesia secara skematis dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, dan tiap sistem penegakan hukum tersebut didukung oleh alat perlengkapan negara sendiri pula. Ketiga sistem penegakan hukum yang dimaksud ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana tersebut, secara mutatis mutandis akan membicarakan tentang masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat. Menurut Muladi,<sup>29</sup> di dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan dikenal istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan.

---

<sup>27</sup> Lihat M. Dimiyati Hartono, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Ind. Hill-Co, Jakarta, hlm. 5. Bandingkan dengan Nurfaizi yang berpandangan, bahwa keberhasilan Polri dalam menegakkan hukum, keadilan dan meningkatkan citra organisasi sangat ditentukan oleh perilaku anggotanya di lapangan. (Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, 1998, hlm. 11.

<sup>28</sup> Lihat Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 179.

<sup>29</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. vii.

Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan.<sup>30</sup>

Menurut M. Faal yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>31</sup> Hal tersebut juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Sistem Peradilan Pidana yang terpadu terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Masing-masing tahap (sub-sistem) tersebut, undang-undang menetapkan pengalokasian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Suatu Tinjauan Penyidikan Dikaitkan Dengan Pembuktian*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 20 Desember 1997, hlm. 1.

<sup>31</sup> M. Faal, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legeslatif Tentang Kewenangan Penyidik Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, tanggal 20 Desember 1997, hlm. 6

<sup>33</sup> Muladi, *Loc. Cit.*



Menurut Mardjono Reksodipeotro, tujuan sistem peradilan pidana mencakup:

- (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang terdiri atas 22 Bab yang meliputi 286 Pasal, sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana. Menurut Philipus Mandiri Hadjon, pada dasarnya bukanlah semata-mata soal pembagian wewenang kepada berbagai komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi yang paling penting adalah disatu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang oleh aparat masing-masing koniponen pada sisi lain dengan pembatasan tersebut, hak-hak tersangka/terdakwa terlindungi.<sup>35</sup>

Memperhatikan masih tampaknya gejala fragmentaris gerak operasional sub-sub sistem peradilan pidana pada satu pihak, dan adanya kebutuhan pemahaman pendekatan sistem (*system approach*), di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum pidana yang tampaknya kini sudah cukup menggejala sebagai suatu kebutuhan *internasional-disturbing issue* (tanpa menutup mata terhadap adanya gerakan-gerakan yang menyangsikan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan pada pihak lain). Hal demikian ini terjadi di Amerika Serikat, dalam menanggulangi kejahatan juga diperkenalkan dan

---

<sup>34</sup> Mardjono Reksodipeotro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH-UI, Jakarta, hlm. 84-85.

<sup>35</sup> Philipus Mandiri Hadjon, *Norma Hukum KUHAP Sebagai Norma Kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Rakyat(Tersangka/Terdakwa)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Dwi Windu KUHAP, Problematika dan Penegakannya. Surabaya 20 Desember 1997, hlm. 1.

dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban.

Adapun ciri-ciri pendekatan sistem tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*".<sup>36</sup>

Keterpaduan gerak sistemik sub-sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

## 2. Struktur Organisasi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana.

Apabila dilihat dari tingkat acara pidananya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- a. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Negara;
- b. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim;

---

<sup>36</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 9.

- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini dari empat komponen tersebut di atas, tanpa mengurangi fungsi dan peran dari lembaga pemasyarakatan pembahasan diutamakan pada kepolisian yang dilengkapi kejaksaan dan pengadilan. Hal ini berkaitan dengan maksud dari KUHAP yang lebih menonjol menyoroti proses penyelesaian perkara oleh ketiga organisasi tersebut.

Pembidangan tugas, fungsi dan wewenang, sebagaimana telah dikemukakan di atas bukan berarti pengkotak-kotakan, tetapi merupakan suatu mata rantai koordinasi Polri sebagai penyidik tidak terlepas dari fungsi penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan.

Adanya beberapa lembaga penegak hukum sebagaimana telah dikemukakan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda di dalam peradilan pidana, memerlukan pengorganisasian agar seluruh lembaga tersebut mengabdikan kepada tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian penegak hukum tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen. Manajemen bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memanfaatkan keseluruhan sumber daya lembaga, dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik, informasi serta dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.<sup>38</sup>

Pengorganisasian lembaga-lembaga penegak hukum itu dilakukan di dalam struktur, prosedur-prosedur dan pembagian fungsi yang dirancang terlebih dahulu. Berdasarkan pengorganisasian yang telah dirancang, setiap lembaga penegak hukum akan berusaha menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Untuk

---

<sup>37</sup> Lihat Boedi Dwi Yani Sri Marsita G, "*Sekilas Lintas tentang Penyidik, Psikologi dan Hak-hak Asasi Tersangka Dalam tahap Penyidikan Menurut KUHAP*", Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 22-23.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 16.

keperluan tersebut, setiap lembaga penegak hukum kemudian berusaha mengembangkan pengorganisasian dalam bentuk pedoman, prosedur, tata kerja yang berlaku pada lingkup lembaga itu. Upaya setiap lembaga penegak hukum dalam rangka memaksimalkan penggunaan sumber daya merupakan proses adaptasi, yaitu strategi yang dikembangkan untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan sehingga mempunyai kemandirian dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Proses adaptasi setiap lembaga penegak hukum tersebut tergambar dari berkembangnya hukum-hukum kelembagaan yang tampak secara formal dan secara informal di dalam kehidupan lembaga penegak hukum.

Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan sebagainya akan mengembangkan perlengkapan lembaga yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan pekerjaan. Pengembangan perlengkapan lembaga bisa berupa pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah kelembagaan, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Terbentuknya budaya di dalam lembaga yang mengelilingi bekerjanya lembaga ini, selanjutnya akan memberikan arah yang semakin jelas, yang disebut sebagai “menjalani kehidupan sendiri”. Hal tersebut terjadi karena lembaga-lembaga tersebut:

1. Menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Barang tentu tujuan tersebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Dengan dirumuskannya tujuan-tujuan seperti itu, maka lembaga pun lalu dapat menjalankan pekerjaannya secara seksama.
2. Ke dalam, lembaga-lembaga hukum ini nanti akan membentuk sub-sub bagian sesuai dengan prinsip pembagian pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan pembentukan sub-sub bagian ini kehidupan lembaga itu semakin menjadi rumit pula. Dari sini semakin jelas pula apa yang di muka dikatakan tentang terjadinya pergeseran perhatian terhadap masalah-masalah keorganisasian. Alih-alih memuaskan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakan hukum, orang disibukkan oleh berbagai persoalan organisasi.
3. Mengembangkan nilai-nilai sendiri. Pengembangan nilai-nilai ini dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga telah membagi diri ke dalam sub-sub bagian, maka penciptaan pola ini menjadi penting, yaitu untuk menciptakan suatu

- sistem terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan menciptakan pengintegrasian yang demikian.
4. Menciptakan kaidah-kaidah sendiri. Ini merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkret dari pada nilai-nilai tersebut.<sup>39</sup>

Organisasi-organisasi di dalam masyarakat modern disusun secara birokratis berdasarkan maksud untuk mencapai tingkat rasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis. Suatu organisasi modern mempunyai ciri ketetapan, kesinambungan, disiplin, dan keajegan (*reliabilitas*). Perkembangan bentuk-bentuk organisasi modern di semua bidang, yaitu negara, tentara, gereja, partai, ekonomi, kelompok-kelompok kepentingan, perkumpulan-perkumpulan suka rela, secara sederhana identik dengan perkembangan dan peningkatan organisasi yang berkesinambungan dengan administrasi birokrasi.<sup>40</sup>

Birokratisasi merupakan ciri khas dalam penegakan hukum masyarakat modern, sehingga diciptakanlah diferensiasi ke dalam fungsi-fungsi serta peraturan hukum. Setiap lingkungan pekerjaan yang tersusun di dalam organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Tujuan-tujuan ini ditetapkan dalam hukum positif untuk menentukan hubungan organisasi satu dengan organisasi yang lain. Haluan-haluan itu dijalankan atas dasar aturan yang dirumuskan secara sengaja. Kepolisian diberi wewenang menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Secara teoritik, birokrasi ini meniadakan favoritisme pribadi dan hak-hak istimewa yang sifatnya subjektif.<sup>41</sup>

Memahami keberadaan organisasi penegak hukum dalam peradilan pidana di Indonesia serta tujuannya, tidak terlepas dari proses dan birokratisasi, yang dibangun

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>40</sup> Max Weber, *Batas-Batas Tentang Birokrasi*, Dalam Martin Albrow, *Birokrasi*, Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hlm. 34

<sup>41</sup> Lihat Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 13.

melalui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang dijadikan dasar bekerjanya organisasi dalam rangka mencapai keberhasilan. Sebagai dasar bekerjanya kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksanaan berdasar pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan pengadilan berdasar pada Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Organisasi-organisasi dalam masyarakat modern disusun secara birokratis berdasarkan maksud untuk mencapai tingkat rasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis. Menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, terdapat empat ciri dasar organisasi birokratis, yang meliputi faktor spesialisasi, hirarkhi wewenang, sistem peraturan, dan hubungan yang tidak bersifat pribadi.<sup>42</sup> Selanjutnya analisis dimensi-dimensi terhadap birokrasi meliputi:

1. Dimensi peranan (*role dimension*), pada tingkatan ini perhatian terutama ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi.
2. Dimensi kelompok (*group dimension*), dimensi ini ada kalanya disebut dimensi struktural. Pada tingkat ini perhatian ditujukan kepada pengaruh aktivitas seseorang atau kelompok orang terhadap tingkah laku orang lain, biasanya juga ditujukan pada proses-proses sosial yang mewarnai organisasi informal dalam kelompok kerja.
3. Dimensi organisasi (*organizational dimension*), pada tingkat ini organisasi terpusat pada organisasi secara utuh.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa mesin administrasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu sistem

---

<sup>42</sup> Peter M. Blau, Marshall W. Meyer, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.

yang didukung oleh tata manajemen yang menjurus ke arah birokrasi dan satu kesatuan kerja yang efisien untuk menanggulangi kejahatan. Setiap alat perlengkapan yang terlibat penegakan hukum mempunyai kedudukan menjadi sub sistem proses setiap alat perlengkapan mesin administrasi penegakan hukum menjadi komponen instrumental sistem atau lingkungan sistem.<sup>44</sup>

Pengorganisasian lembaga-lembaga penegakan hukum atas dasar diferensiasi fungsional merupakan suatu bentuk pemberian otonomi pada masing-masing lembaga. Otonomi yang diberikan kepada setiap lembaga itu akan memberikan ruang gerak untuk mengelola sumber daya dalam rangka menjalankan fungsinya, sehingga kehidupan setiap lembaga menggambarkan respon organisasi terhadap beban tugas yang dihadapinya. Setiap lembaga akan berusaha untuk mengembangkan efisiensi kerja dengan cara merumuskan tata kerja dalam berbagai peraturan yang mengikat bekerjanya lembaga tersebut. Persoalan yang secara potensial akan muncul adalah apakah otonomi yang dikembangkan secara dinamis pada setiap lembaga akan selalu paralel dengan tujuan pokok dari seluruh lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum.

Berkaitan dengan organisasi penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, agar dapat dipahami kiranya perlu diuraikan komponen dari masing-masing organisasi tersebut dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Kepolisian.

Berbicara mengenai tugas dan wewenang polisi dalam penegakan hukum dalam peradilan pidana sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Polri. Sebagian besar tugas Polri justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 289.

<sup>45</sup> Ada dua tugas Polri di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana "*penal*") dan penegakan hukum dengan sarana "*non penal*". Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi di bidang penegakan hukum pidana tersebut diatur dalam peraturan prundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini polisi terikat kepada Undang-Undang Kepolisian dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Untuk memahami tugas dan wewenang Polri, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai status dan peran Polri serta struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI Dan POLRI.

Berkaitan dengan status dan peran Polri serta struktur organisasi kepolisian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, menyebutkan :

- (1) Kepala Kepolisian RI memimpin Kepolisian Negara RI dan menyelenggarakan pimpinan teknis Kepolisian, menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya.
- (2) Kepala Kepolisian RI memimpin Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara RI.
  - b. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara RI.
- (3) Kepala Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri;
  - b. ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh panglima.



Dalam Pasal 10 dinyatakan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian secara hirarki.
- (2) Tanggung jawab secara hirarki sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Berkaitan dengan peran polri tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa Kepolisian Negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut menunjukkan bahwa peran polisi dalam masyarakat dari sisi kelembagaan mempunyai budaya organisasi dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tentara, jaksa, aparat pemerintah daerah sebagai pegawai negeri sipil berseragam dan bersenjata. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Artidjo Alkostar, bahwa secara institusional polisi memiliki langgam budaya organisasi dan karakteristik yang berbeda dengan tentara, jaksa, aparat pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Sebagai aparat negara Polisi berfungsi protektif bagi masyarakat, sehingga dengan otoritas dan kewenangannya yang dimilikinya Polisi wajib menanggulangi aksi dan sikap yang mengganggu dan merugikan masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>47</sup> Artidjo Alkostar, *Tuntutan Peran Polisi Dalam Mengatasi Perkembangan Kejahatan*, Dalam Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 93.

Selanjutnya mengenai susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Dalam rangka menjalankan peran kepolisian sebagaimana telah diuraikan di atas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut tugas dari lembaga kepolisian ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
  - i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
  - j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan dan pengaduan;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. mencari keterangan dan barang bukti;
- e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut di atas pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan pencegahan.<sup>50</sup>

Selanjutnya dalam keadaan darurat kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization-Interpol* dan membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>51</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kewajiban polisi dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni:

1. Kewajiban *preventif* (pencegahan).
2. Kewajiban *represif* (pemberantasan).

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban *preventif* ialah melaksanakan segala usaha, pekerjaan atau kegiatan dalam rangka menyelenggarakan dan melindungi negara dan badan hukum serta orang-orang dan harta benda terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan lain yang negatif, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan dan kesentosaan masyarakat. Sedangkan kewajiban *represif* ialah kewajiban untuk melakukan usaha dan pekerjaan serta kegiatan dalam penyelenggaraan tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan penyidikan, penangkapan serta penahanan terhadap yang bersalah, memeriksa, menggeledah, melakukan penyitaan dan lain-lain serta menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>52</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut di atas Kunarto mengemukakan bahwa secara universal tugas polisi termasuk Polri pada hakikatnya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian memberantas kejahatan atau *represif*, sedang tugas kedua mengandung pengertian mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau *preventif*.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pemhasan difokuskan pada kewajiban *represif* dari kepolisian yakni tugas dan wewenang lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana telah di kemukakan bahwa tahap pertama dalam peradilan pidana adalah tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini dibedakan menjadi dua tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa polisi adalah penyidik tunggal, karena tidak ada pejabat lain yang dituntut dalam undang-undang

---

<sup>52</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 2 Penyelidikan Dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hlm. 20.

<sup>53</sup> Lihat Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

sebagai penyidik selain polisi. Sedang penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2). Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>54</sup>

Selanjutnya atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan yang berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyidikan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut di atas penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum (Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Laporan atau pengaduan tersebut di atas dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Apabila laporan atau pengaduan tersebut diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Namun apabila laporan atau pengaduan tersebut diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Apabila pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, maka harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut (Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Selanjutnya penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Di samping itu penyelidik dalam melaksanakan penyelidikan, dikoordinasi diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (Polri).<sup>55</sup>

Selanjutnya apabila hasil penyelidikan yang dilakukan polisi ditemukan bukti/petunjuk yang kuat telah terjadi perbuatan pidana maka dilanjutkan penyidikan. Dengan demikian dalam proses penyidikan perkara pidana, penyelidikan memegang peranan penting, karena penyelidikan merupakan tindakan awal/pendahuluan dari tindakan-tindakan dalam rangkaian proses penyelesaian perkara tersebut di mana tindakan itu tergantung pada penyelidikan yang mengawalinya/mendahuluinya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah: 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan I/b atau yang disamakan dengan itu.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

<sup>56</sup> Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Di samping penyidik dan penyidik ada penyidik pembantu, yakni pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983). Adanya penyidik pembantu adalah untuk mengatasi hambatan penyelesaian penyidikan, karena tidak semua daerah di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil mempunyai penyidik yang memenuhi syarat kepangkatan sebagai penyidik. Hal ini selaras dengan peradilan cepat.

Dengan demikian tugas penyidik saat ini (berdasarkan KUHAP) dimonopoli oleh pejabat Kepolisian, kecuali penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan peralihan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan acara pidana lama (berdasar HIR), tugas-tugas penyidikan diberikan tidak hanya kepada kepolisian, tetapi juga kepada pejabat-pejabat lain seperti kepala desa, jaksa, kepala distrik, mantri polisi dan sebagainya.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP



Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa dasar pemeriksaan pendahuluan bagi penyelidik dan atau penyidik yakni adanya laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan atau pengaduan serta informasi yang disampaikan atau diterima oleh penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penyaringan.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan hukum sangat kuat. Polri diberi wewenang dari menerima laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana sampai pada mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk dapat menemukan tersangka untuk dilanjutkan pada penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan.

Untuk memperjelas penyidikan berikut ini diuraikan mengenai prosedur atau rangkaian tindakan-tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106).

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, namun apabila laporan atau pengaduan itu diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor, pengadu, dan penyidik, dan setelah menerima laporan atau pengaduan itu penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan atau laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Setelah menerima tersangka atau tertangkap tangan penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyelidik dan Penyidik yang menerima laporan segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di

---

<sup>58</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 106 ayat (4), (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

situ belum selesai. Terhadap pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat sampai pemeriksaan selesai ( Pasal 111 ayat (2), (3). Dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi tindak pidana yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan.<sup>60</sup>

Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Selanjutnya apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan penyidik dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa saat dimulainya penyidikan ialah sejak digunakannya upaya paksa dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana, yang merupakan suatu proses dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, yang mana tindakan tersebut terdiri dari:

a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP).

Tempat kejadian ialah tempat di mana telah dilakukan sesuatu tindak pidana. Sedang tindakan pertama di tempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk menyelamatkan nyawa korban, menangkap pelaku, menutup tempat kejadian, menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidikan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 128.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 110 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>62</sup> Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hlm. 104.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari dan bukti-bukti lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.<sup>63</sup> Namun dalam praktik sering terjadi penyidik menghilangkan barang bukti, seperti dalam kasus pembunuhan Udin, di mana Edi wuryanto selaku penyidik melarung darah sebagai barang bukti di Laut Selatan.

b. Penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penangkapan dalam KUHAP diatur pada Bab V Bagian Kesatu, dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, antara lain sebagai berikut:

Yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Penyelidik dapat juga melakukan penangkapan asal mendapat perintah dari penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981). Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam hal penangkapan biasa, maka penyidik yang menangkap tersangka harus membawa surat perintah penangkapan.

Adapun isi surat perintah penangkapan, antara lain memuat:

1. Identitas tersangka.

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 129.

2. Alasan penangkapan.
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.
4. Tempat tersangka diperiksa.<sup>64</sup>

Tembusan surat perintah penangkapan harus diserahkan pula kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan (Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Dalam hal tertangkap tangan, maka siapa saja berhak menangkap dengan tanpa surat perintah dan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu. Yang wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan adalah setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum untuk diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik (Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian setelah diserahkan oleh khalayak ramai bahwa ia yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>65</sup>

Selanjutnya mengenai lamanya penangkapan maximum satu hari artinya 1 x 24 jam. Bagi tersangka yang melakukan pelanggaran tidak boleh dilakukan penangkapan sebelum dua kali berturut-turut dipanggil secara sah dan tersangka tidak mau hadir (Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981).

---

<sup>64</sup> Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

### c. Penahanan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Berkaitan dengan penahanan tersebut di dalam KUHAP diatur dalam Bab V, Bagian Kedua dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31.

KUHAP menentukan bahwa ada 3 macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan yakni penyidik atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>66</sup>

Menurut KUHAP, jenis penahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

1. Penahanan rumah tahanan negara.
2. Penahanan rumah, yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Penahanan kota, yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor diri pada waktu-waktu yang ditentukan (Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain.<sup>67</sup>

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dengan alasan menurut pertimbangan penyidik atau penuntut umum atau hakim telah ada dugaan keras terhadap tersangka atau terdakwa akan

---

<sup>66</sup> Lihat ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>67</sup> Lihat Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

2. Surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penuntut umum atau surat penetapan hakim tentang penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa, memuat: identitas tersangka, alasan penahan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan dan tersangka atau terdakwa ditahan.

Tembusan surat perintah penahan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

3. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 No. 471), pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No. 8), pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 3086).

Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah waktu penahanan kota, pengurangan tersebut dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari lamanya waktu penahanan.

Tempat penahanan di dalam rumah tahanan harus dipisahkan menurut jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan. Yang ditempatkan dalam rumah tahanan

adalah mereka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.<sup>68</sup>

Tahanan dapat mengikuti kegiatan rohani (sembahyang, ceramah dan lain-lain) yang dilaksanakan oleh petugas Rumah Tahanan (RUTAN) atau petugas lain yang ditunjuk Departemen Agama RI (Pasal 13 Peraturan Menteri Kehakiman No. M04 UM 01.16 Tahun 1983).

Tahanan diperbolehkan memakai pakainnya sendiri dengan memperhatikan kepatuhan, kesopanan dan tidak mengganggu keamanan. Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian diberikan pakaian oleh RUTAN (Pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman No. M04 UM 01.16 Tahun 1983).

Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak dan jika perlu dilakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit di luar RUTAN, setelah mendapat izin dari instansi yang menahan dan atas nasehat dokter RUTAN (Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman No. M04 UM 01.16 Tahun 1983). Di samping itu tahanan dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan orang lain atau lembaga sosial setelah mendapat izin dari instansi yang menahan. Setiap tahanan diperbolehkan berolahraga dengan fasilitas yang ada dan disediakan fasilitas untuk penyaluran hobi di bidang kesenian. Para tahanan tidak diperkenankan wajib kerja, namun jika tahanan sendiri ingin bekerja secara sukarela, maka ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang menahan.<sup>69</sup>

Selanjutnya mengenai lamanya penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP<sup>70</sup> adalah sebagai berikut:

1. Penyidik dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari.

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No. M04 UM 01.06 Tahun 1983.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 14, 15, 18, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Kehakiman No. M04 UM 01.06 Tahun 1983).

<sup>70</sup> Lihat ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

2. Penuntut umum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama tiga puluh hari.
3. Hakim Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama enam puluh hari .
4. Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama enam puluh hari.
5. Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama lima puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

Untuk lebih jelasnya mengenai pejabat yang berwenang menahan dan lamanya penahanan menurut KUHAP dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pejabat yang berwenang menahan dan lamanya penahanan menurut KUHAP.

No.	Pejabat Yang Berwenang Menahan	Lamanya Penahanan
1	Penyidik atau pembantu penyidik	20 hari
2	Perpanjangan oleh penuntut umum	40 hari
3	Penuntut umum	20 hari
4	Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	30 hari
5	Hakim pengadilan negeri	30 hari
6	Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	60 hari
7	Hakim pengadilan tinggi	30 hari
8	Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi	60 hari
9	Mahkamah agung	50 hari
10	Perpanjangan oleh Mahkamah Agung	60 hari

Sumber : Data sekunder



Bertitik tolak pada tabel Tabel 1 tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.

Perlu diperhatikan bahwa permintaan perpanjangan penahanan dari masing-masing instansi/pejabat tersebut di atas harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Permintaan dibuat sebelum lewat masa penahanan yang diperkenankan.
2. Melampirkan resume hasil pemeriksaan sementara.
3. Disertai dengan alasan-alasan yang kuat.

Sebelum maximum penahanan tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Apabila lewat maximum penahanan, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum.

Apabila tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat atau perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka masa penahanan dapat diperpanjang maximum 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) hari. Terhadap hal ini tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika perkaranya ada pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau kepada Ketua Mahkamah Agung jika perkaranya ada pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1983).

Apabila penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian (Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

d. Penggeledahan.

Berkaitan dengan penggeledahan dalam KUHAP diatur dalam Bab I, Bagian Ketiga dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi berdasar ketentuan tersebut wewenang untuk melakukan penggeledahan hanya diberikan kepada penyidik. Hal ini dimaksudkan agar seseorang terhindar dari perlakuan aparat penegak hukum lainnya secara sewenang-wenang penggeledahan yang sama berulang kali.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Sedang penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Pembatasan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam KUHAP , antara lain:

1. Keharusan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat (1)).
2. Disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya (Pasal 33 ayat (3)).
3. Harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan apabila tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (4)).

Yang dimaksud ketua lingkungan adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

4. Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5)).
5. Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan (Pasal 36)).
6. Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita (Pasal 37 ayat (1)). Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 37 ayat (1)).

Apa yang dimaksud dengan “rongga badan” oleh penjelasan ini tidak jelas. Tentu ini tidak berarti rongga dada dan rongga perut. Mungkin yang dimaksud dengan “rongga badan” ialah lubang dubur atau alat kelamin wanita. Dalam praktik pernah terjadi di Polda DIY dalam tindak kejahatan narkoba dimana pelaku seorang mahasiswi menyembunyikan sabu-sabu di lubang alat kelaminya. Di Sulawesi Utara penyelundup dari Tawao ke Sangit Talaud menyembunyikan batangan emas di lubang duburnya.<sup>71</sup>

Dikecualikan dari pembatasan tersebut di atas, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak karena dikhawatirkan barang bukti akan dipindahtangankan atau dimusnahkan atau tersangka kemungkinan akan melarikan diri. Dalam keadaan demikian penyidik dapat melakukan penggeledahan: 1) pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal; berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; 2) pada setiap tempat lain tersangka

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

bertempat tinggal; 3) di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; 4) di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.<sup>72</sup>

Apabila yang melakukan penggeledahan bukan penyidik, maka petugas Kepolisian RI dapat memasuki rumah dengan syarat harus menunjukkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri atau surat tertulis dari penyidik (Pasal 33 ayat (2)).

Di samping hal tersebut di atas kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: 1) ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD; 2) tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan; dan 3) ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.<sup>73</sup>

#### e. Penyitaan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Pengertian penyitaan harus dibedakan dengan perampasan. Dalam perampasan, barang yang dirampas diambil alih dari pemiliknya dengan tujuan mencabut milik atas barang itu untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Sedang penyitaan bersifat sementara, apabila sudah tidak dipergunakan lagi akan dikembalikan pada yang berhak. Perbedaan lain, perampasan merupakan pidana tambahan, sedangkan penyitaan merupakan tindakan kepolisian.

Penyitaan dalam KUHAP diatur dalam Bab IV, Bagian Keempat dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sebagai berikut:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>73</sup> Lihat Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38).

Adapun benda-benda yang dapat dikenai penyitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang khusus dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 40 dan Pasal 41).

Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 43).

Selanjutnya mengenai penyimpanan benda sitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) dan penjelasannya, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBSAN). Apabila belum ada rumah

penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, maka penyimpanan benda sitaan dilakukan di kantor Kepolisian, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau di tempat semula benda sitaan itu disita.

Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. Hal ini merupakan sesuatu yang baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut “penyitaan pakai” (*rijden beslag*) terhadap kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaklumi, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dipelihara baik akan rusak berkarat.<sup>74</sup>

Dalam hal benda sitaan yang terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan dan tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka sejauh dengan persetujuan tersangka atau terdakwa dapat diambil tindakan bahwa benda tersebut:

- a. Dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum.
- b. Didiamkan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan.<sup>75</sup>

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2)). Sedang untuk benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4)).

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 155.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Selanjutnya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>76</sup>

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Pasal 46 ayat (2)).

f. Pemeriksaan Surat.

Tata cara pemeriksaan surat dalam KUHAP diatur dalam Bab IV, Bagian Kelima dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 49, sebagai berikut.

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)).

---

<sup>76</sup> Lihat Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Apabila sesudah dibuka dan diperiksa ternyata surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Namun apabila ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, maka surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik (Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)).

Selanjutnya penyidik membuat berita acara tentang tindakannya melakukan pemeriksaan surat tersebut dan turunan berita acaranya dikirim oleh penyidik kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan (Pasal 49).

g. Pemeriksaan Saksi-Saksi.

Penyidik di samping berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas juga berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan saat ia harus menghadap. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 butir 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).



Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pemeriksaan saksi adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan dari saksi tentang hal-hal yang ia dengar, ia lihat sendiri dalam suatu peristiwa pidana beserta alasan yang kemudian dicatat dalam berita acara.

#### h. Pemeriksaan Ahli.

Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Untuk mengetahui siapa yang dimaksud orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dapat kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 28, yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Untuk dapat dikatakan orang itu ahli atau mempunyai keahlian khusus atau tidak, haruslah dilihat dari segi pengetahuan dan pengalamannya dalam tugas dan jabatannya itu. Jadi harus ada kaitan antara tugas dan jabatannya dengan keahlian di bidang tugas dan jabatannya itu. Sedang orang memiliki keahlian khusus adalah orang yang secara umum telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tertentu, di samping itu secara khusus ia memiliki pula pengetahuan dan pengalaman yang menyangkut spesifikasi bidang tersebut. Misalnya seorang dokter memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bersifat umum di bidang kedokteran, tetapi seorang dokter yang memiliki pengetahuan khusus di bidang kedokteran kehakiman adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kedokteran kehakiman.

Mengingat dewasa ini kemajuan pesat yang telah dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan dengan modus operandi dan sarana canggih. Misalnya kejahatan di bidang komputer, pemalsuan dokumen dengan menggunakan alat-alat percetakan dengan teknologi canggih, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan

hak cipta yang dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana elektronis yang canggih dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan perkembangan kejahatan dunia yang mengikuti pula kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, peran para ahli dalam pemeriksaan pidana pasti akan menonjol. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan. Cara-cara tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, memaksakan untuk melibatkan para ahli sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki guna mengungkap suatu kejahatan.

i. Pemeriksaan Tersangka.

Dalam KUHAP terdapat dua golongan mengenai pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yakni:

1. Pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dengan sistem *inquisitoir* yang lunak, yang dilakukan oleh penyidik.
2. Pemeriksaan persidangan (*gerechtelijk onderzoek*) dengan sistem *acusatoir*, yang dilakukan oleh Hakim.<sup>77</sup>

Dengan demikian KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sebab jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan permulaan, maka untuk kelengkapan pemeriksaan ini Penuntut Umum wajib menyerahkan kembali berkas perkara dan meminta kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan diberikan kepadanya petunjuk-petunjuk

Dalam pemeriksaan permulaan sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan sistem *inquisitoir* yang lunak, artinya bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik, maka tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukumnya yang

---

<sup>77</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 4 Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni penasihat hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Hal tersebut didasarkan atas asas untuk memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, seperti termuat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum”.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, bahwa apabila seorang tersangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penasihat hukum yang mendampingi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Kecuali terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dalam pemeriksaan penyidikan dengan cara melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka tersebut (Pasal 115 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan dengan sistem *inquisitoir* yang lunak, maka dalam praktiknya, tersangka boleh meminta kepada penasihat hukum penjelasan-penjelasan tentang suatu pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami baik arti maupun arah pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak penyidik yang bersifat menjerat, maka penasihat hukum wajib

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

memberikan “peringatan” kepada tersangka akan adanya “jeratan” itu yang harus ia hindari atau ia tolak. Oleh karena itu dalam sistem *inquisitoir* yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai obyek atau sebagai barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan kejahatan/pelanggaran atau tidak.<sup>79</sup>

Dengan demikian dalam pemeriksaan dengan sistem *inquisitoir* ini tidak diperkenankan untuk memperoleh satu pengakuan salah, seperti dalam sisten HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak diperbolehkan melakukan pendorongan yang berupa penganiayaan terhadap tersangka. Hal ini menjadi jelas jika dihubungkan dengan Pasal 52 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>80</sup>

Selain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak-hak lain yang dipunyai oleh tersangka dalam tahap penyidikan antara lain dapat dilihat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagai berikut:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 butir a).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya bagi tersangka yang berkebangsaan asing (Pasal 57 ayat (2)).
6. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya atau mendapat pemeriksaan kesehatan (Pasal 58).
7. Hak untuk dikunjungi keluarga (Pasal 61).

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>80</sup> Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52). Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Dari kedua ketentuan ini, yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa dan bukan pengakuan tersangka atau terdakwa.

8. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
9. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
10. Hak untuk mengajukan saksi (Pasal 65).
11. Hak untuk menuntut ganti rugi Pasal 68).

Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP tersebut di atas maksudnya agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak tersebut dapat memberikan batas-batas yang jelas kewenangan bagi penyidik Polri, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi tujuan hukum acara pidana, pemberian jaminan dan perlindungan terhadap tersangka, terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materiil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.<sup>81</sup>

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 118 Undang-undang No. 8 Tahun 1981).

Berkaitan dengan uraian tersebut Harun M. Husein mengemukakan bahwa suatu pemeriksaan yang diarahkan sedemikian rupa untuk memperoleh pengakuan tersangka, adalah perbuatan yang sia-sia. Keterangan yang diberikan tersangka atau takut karena adanya tekanan dapat dicabutnya kembali dalam persidangan pengadilan. Dengan pencabutan itu, sepanjang pencabutan pengakuan tersebut beralasan, maka keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan menjadi kehilangan daya buktinya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Harun M. Husein, *Cp. Cit.*, hlm. 176-177.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dalam penyidikan, penyidik harus benar-benar menyadari bahwa penanganan perkara sejak awal sampai akhir menurut sistem KUHAP adalah "*Integrated Criminal Justice System*". Setiap tahap penanganan menjadi dasar bagi penanganan perkara pada tahap selanjutnya, setiap tahap terkait erat dan harus saling menunjang satu sama lain.

j. Penggalian dan Bedah Mayat.

Yang dimaksud penggalian mayat adalah penggalian mayat termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.<sup>83</sup> Dengan demikian penggalian mayat mengandung arti semua tindakan pengambilan mayat dari segala tempat penyimpanannya sebagai kuburan. Penggalian mayat yang dimaksud adalah penggalian mayat untuk kepentingan pemeriksaan yakni untuk pelaksanaan bedah mayat (otopsi). Sedang yang dimaksud dengan bedah mayat adalah pembedahan mayat oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya, untuk mengambil organ-organ tubuh tertentu guna kepentingan pemeriksaan sebagai usaha untuk mengetahui penyebab kematiannya.<sup>84</sup>

Apabila penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas dan tegas untuk pemeriksaan lika atau pemeriksaan mayat dan pemeriksaan bedah mayat tersebut. Selanjutnya mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman tersebut harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian badan mayat.<sup>85</sup>

Apabila bedah mayat terpaksa dilakukan, maka penyidik harus memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban, dan apabila keluarga korban

---

<sup>83</sup> Lihat Penjelasan Pasal 135 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>84</sup> Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hlm. 182.

<sup>85</sup> Lihat Pasal 133 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

merasa keberatan, penyidik wajib menerangkan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Seandainya dalam waktu 2 (dua) hari tidak diketemukan, maka penyidik menyerahkan sepenuhnya kepada ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan. Demikian juga untuk kepentingan mayat (Pasal 143 jo. Pasal 135 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

#### k. Rekonstruksi.

Rekonstruksi adalah visualisasi kejadian perkara yang diperagakan kembali berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh sebagai hasil penyidikan, guna meyakinkan kebenaran hasil penyidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tersangka memperagakan kembali tindakan pidana yang telah dilakukan di tempat kejadian perkara.<sup>86</sup>

Rekonstruksi dibedakan menjadi dua jenis yakni rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental.<sup>87</sup>

Rekonstruksi fisik berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik dalam rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau waktu atau benda-benda yang dipergunakan atau benda-benda yang tersentuh tersingkir, hancur dan sebagainya. Perlu diulangi lagi misalnya di mana letaknya suatu benda, di mana tempat-tempat gerakan para korban jika ada serta bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana aksi dan reaksi pada waktu itu.

Hasil rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori yang digunakan tersebut mengalami perubahan. Haruskah diperkuat atau dinyatakan batal. Pendapat-pendapat tersebut

---

<sup>86</sup> Harun M. Husein. *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>87</sup> Bawengan, G.W., *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 37-38.

harus selalu didukung dengan bukti-bukti yang diikuti alasan-alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Selanjutnya mengenai rekonstruksi mental dapat dipergunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai terjadinya peristiwa pidana. Misalnya dalam kasus pembunuhan, apakah pelaku dan korban mempunyai pertengkaran sebelumnya, apakah pelaku dalam keadaan mabuk atau marah, atau cemburu, apakah pelaku tergolong sadistik atau mengalami gangguan-gangguan seksual.

Hasil dari rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang sangat membantu dalam upaya pembuktian di persidangan. Karena dengan meneliti keterangan saksi-saksi atau ahli, keterangan tersangka/terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang diperiksa di persidangan dan mencocokkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan Berita Acara Rekonstruksi beserta lampirannya tersebut, akan diperoleh gambaran yang lengkap tentang tindak pidana yang terjadi.

Berkaitan dengan kewenagannya polisi sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas menunjukkan betapa sangat berkaitan erat dengan hak-hak azasi seorang warga masyarakat yang notabene harus dijunjung tinggi.

Seberapa jauh tingkat konsistensi Polisi dalam proses pelaksanaan berbagai macam wewenang tersebut di atas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan, penghormatan dan harmoni hubungan masyarakat dengan polisi. Pada gilirannya akan mempengaruhi proses memaksimalkan peran Polisi dalam menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan. Semakin tegas dan responsif Polisi dalam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat.<sup>88</sup> Oleh karena itu dalam kerangka ini secara fisik dituntut adanya Polisi yang mandiri, trampil dan profesional dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana.

Dari kajian sosiologis maupun politis menemukan, Polri adalah lembaga birokratis tertua di republik ini (dibentuk oleh PPKI tanggal 19 Agustus 1945).

---

<sup>88</sup> Artidjo Alkostar dalam Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 99.



Sebagai birokrasi tertua padat masalah dan sangat terbuka karena berhadapan dengan masyarakat. Bahkan satu-satunya lembaga birokrasi yang terlibat langsung dalam tiga sistem administrasi kenegaraan sekaligus yaitu administrasi kenegaraan, administrasi keamanan negara (*security system*), administrasi peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>89</sup>

Namun dalam realitasnya baik bidang administrasi maupun operasionalnya belum berhasil secara optimal. Akibat belum optimalnya kedua bidang tersebut berbagai gejala dapat dirasakan, antara lain: pelayanan publik belum membaik sementara kuantitas dan kualitas gangguan kamtibmas terus pasang naik. Prediksi ini diapresiasi minimal dengan tiga parameter pelayanan publik, yaitu meningkatkan penyelesaian laporan kejahatan (*crime clearance*), meningkatkan potensi dan partisipasi masyarakat dan mewujudkan kamtibmas yang baik dan mantab.

Anton Tabah mengemukakan bahwa, dengan jujur Polri dalam pelaksanaan tugas masih dihadapkan berbagai kendala internal maupun eksternal.<sup>90</sup> Kendala internal dapat dipahami antara lain minimal ada empat kelemahan mendasar. *Pertama*, Polri sebagai *crime hunter* kehilangan jati diri selaku pengemban fungsi intelijen yang handal. Ini terlihat lemahnya Polri melakukan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kamtibmas sejak masih embryonal. *Kedua*, Polri selaku *problem solver* kehilangan daya greget tanggap kesegaran menangkal problema kamtibmas yang muncul dalam pola *police hazard* sampai faktor korelatif kriminogennya bahkan sampai menjadi gangguan nyata (faktual) yang meresahkan masyarakat. *Ketiga*, profesionalisme Polri, terutama pada tugas pokok, mengabaikan jatidiri sebagai penyelidik tunggal. Akibatnya ragu bertindak yang mestinya sangat melekat pada fungsi dan tugas kepolisian. *Keempat*, lemahnya kemampuan managerial Polri. Dalam proses pengambilan keputusan, dalam mengantisipasi berbagai kendala, dalam menempatkan skala prioritas dan kualitas. Terutama di tingkat Polsek sebagai

---

<sup>89</sup> Anton Tabah, *Mengurai Titik-titik Lemah Polri*, Kedaulatan Rakyat, Tanggal 4 Oktober 2000, hlm. 6.

<sup>90</sup> *Ibid.*

basis deteksi dini dan Polres selaku ujung tombak KOD (Komando Operasional Dasar).

Sedangkan kendala eksternal, setidaknya ada delapan faktor dominan melemahnya operasionalisasi Polri. *Pertama*, instrumen hukum yang belum memadai. Berbagai perundangan kurang antisipatif terhadap perkembangan kejahatan. Contoh tentang pencurian kendaraan bermotor belum dikemas secara memadai dalam undang-undang. *Kedua*, keterpaduan penegakan hukum belum baik. *Ketiga*, sarana dan prasarana kepolisian yang minim. Dari berbagai peralatan vital sampai peralatan pendukung yang masih dihadapkan pada kekurangan serius, termasuk anggaran BBM patroli. *Keempat*, sistem peradilan pidana belum berjalan dengan baik. *Criminal Justice System* memang sudah dalam kerangka teori memudahkan penanganan perkara sekaligus untuk memperoleh kepastian hukum bagi yang berperkara, namun kenyataan jauh dari yang diharapkan. *Kelima*, kesadaran dan disiplin masyarakat rendah, mempengaruhi mekanisme penegakan hukum. *Keenam*, pengeterapan budaya mikul dhuwur mendhem jero yang kurang tepat, tumbuh praktik hukum yang mendua dan ewuh pakewuh. Ini terus tumbuh meski di era reformasi. Contoh kasus *Bulogate*, *Bruneigate* dan *Aryantigate*. *Ketujuh*, *political will* yang belum sepadan dengan perkembangan kamtibmas. Jika dilihat secara politis teori penegakan hukum telah menempatkan aparat penegak hukum pada kondisi yang baik perlu diperhatikan sarana, prasarana dan kesejahteraannya. Tetapi dalam praktik belum berjalan. *Kedelapan*, masih ada intervensi dari penguasa yang sangat mengganggu tugas Polri secara optimal. Contoh kasus perintah penangkapan tanpa bukti awal oleh Gus Dur terhadap Tomi Soeharto dalam kasus peledakan bom di BEJ, yang berakibat Kapolri Rusdihardjo diberhentikan dari jabatannya dan Mantan Pimpinan Pro Integrasi Indonesia Erico Guteres.

## b. Kejaksaan.

Sebagaimana telah dikemukakan Peter M. Blau, Marshall W. Meyer bahwa salah satu ciri dari organisasi birokrasi adalah adanya sistem peraturan, yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Demikian halnya dengan kejaksaan sebagai organisasi birokrasi tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk memahami tugas dan wewenang organisasi kejaksaan perlu diketahui dan dipahami landasan bekerjanya secara formal sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, sebagai berikut.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 menyatakan:

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
- (2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah dalam melakukan penuntutan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan:

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan wewenang jaksa dalam perkara pidana jaksa selaku penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang ini;
- h. melaksanakan penetapan hakim.<sup>92</sup>

Berdasarkan wewenang sebagaimana telah dikemukakan menunjukkan bahwa tugas jaksa terpecar dalam berbagai tingkatan penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian kejaksan berada pada posisi sentral dalam proses peradilan pidana.

Jaksa penuntut umum dalam rangka mempersiapkan atau melengkapi berkas perkara pidana, ditentukan dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Menurut Pasal 110 ayat (2), dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (3) ditentukan bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Dari ketentuan dalam pasal tersebut di atas tidak memberikan batasan berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Oleh karena itu kemungkinan selalu dapat terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan yang diserahkan penyidik dinyatakan belum lengkap dan sempurna, sehingga berkas perkara dapat berlarut-larut dan mondar-mandir atau bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Hal ini terjadi seperti dalam kasus pembunuhan wartawan Udin di bantul, Iwik sebagai tersangka. Di mana jaksa berulang kali mengembalikan BAP yang dibuat oleh polisi sebagai penyidik. Dalam kasus tersebut berakibat tuntutan bebas terhadap Iwik oleh jaksa.

---

<sup>92</sup> Lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Dengan demikian Polri selaku pejabat penyidik harus menjalin kerjasama yang baik dengan penuntut umum, karena hasil dari penyidikan adalah merupakan dasar dari keberhasilan suatu penuntutan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, jaksa selaku penuntut umum tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi sendiri secara langsung. Polri selaku penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Agar pelaksanaan peradilan dapat memperoleh hasil putusan yang adil dan tepat, maka suatu kerjasama yang terpadu akan sangat dibutuhkan. Walaupun ada pembagian tugas antara penyidik dan penuntut umum. Hal ini tidak berarti bahwa antara penyidik dengan penuntut umum dalam penegakan hukum pidana tidak berhubungan satu sama lain. Namun kerjasama ini harus bersifat sederajat. Janganlah sekali-kali diberikan kesan, bahwa kejaksan merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari pada sub sistem yang lain dari peradilan pidana.

Suatu kerjasama yang positif diharapkan ada dalam pelaksanaan setiap fungsi dengan tujuan untuk menghindarkan hal-hal yang kurang serasi, sebab pada akhirnya penuntut umumlah yang harus bertanggung jawab tentang berhasil tidaknya suatu penyidikan di sidang pengadilan.<sup>93</sup> Kerjasama yang baik antara penyidik dengan penuntut umum akan menghasilkan penyidikan yang lengkap dan sempurna. Hal ini selanjutnya jaksa penuntut umum adalah yang paling bertanggung jawab mengenai

---

<sup>93</sup> Lihat Marmosudjono Soekarton, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm.32.

berhasil atau tidaknya suatu penuntutan. Hasil penyidikan yang lemah atau tidak/kurang lengkap akan menyulitkan bagi jaksa selaku penuntut umum.<sup>94</sup>

Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dirasa sangat perlu, untuk mendapatkan kepastian hukum. Di samping itu juga untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban, masyarakat dan terdakwa. Pemeriksaan tambahan ini baik untuk menyempurnakan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan, dimaksudkan untuk tidak hanya melindungi saksi korban dan masyarakat melainkan juga untuk melindungi kepentingan terdakwa. Dengan demikian ada rasa keseimbangannya, yaitu kepentingan saksi korban dan kepentingan terdakwa. Jadi pemeriksaan tambahan sesungguhnya diperlukan oleh penuntut umum semata-mata untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya tidak disadari atau tidak diketahui.<sup>95</sup>

Pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum tersebut dalam Undang-undang Kejaksaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan pelaksanaan pasal tersebut harus memperhatikan penjelasan pasal yang bersangkutan, karena justru dalam penjelasan pasal itulah disebutkan pembatasan-pembatasannya. Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

---

<sup>94</sup> A.A. Oka Mahendra, *Undang-Undang Kejaksaan RI Memantapkan Kedudukan Dan Peranan Kejaksaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 51.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

Untuk lebih jelasnya, agar tidak salah menerapkan tentang pemeriksaan tambahan tersebut, pemeriksaan tambahan baru dapat dilakukan setelah penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan petunjuk-petunjuknya (pra penuntutan). Jadi kejaksaan tidak dapat secara langsung melakukan pemeriksaan tambahan, tanpa didahului pra penuntutan.

### c. Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu organisasi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sedang organisasi penegak hukum yang lain yakni organisasi kepolisian, kejaksaan dan pemasyarakatan.

Sebagai organisasi pengadilan mempunyai posisi yang terhormat dan strategis yakni sebagai benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan. Di samping itu sebagai organisasi pengadilan secara yuridis formal berperan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dengan tidak menyampingkan kemungkinan perkembangan dikemudian hari, maka Undang Undang Dasar 1945 dalam hal kekuasaan kehakiman memfokuskan tiga hal, yakni:

1. Ada suatu Mahkamah Agung yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama-sama badan-badan kehakiman lainnya, yang asumsinya tentu kewenangannya lebih rendah daripada Mahkamah Agung sendiri, berdasarkan undang-undang.



2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
3. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Persoalan yang timbul dalam sejarah kenegaraan, semenjak sebelum Montesquieu, sampai sekarang ialah, bagaimana kekuasaan kehakiman itu dapat berfungsi seadil-adilnya. Untuk itu diambil prinsip bahwa kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka atau mandiri.

Untuk memperjelas arti bebas dan merdeka atau mandiri ini, maka perlu diperhatikan apa yang dirumuskan di dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, dimana kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945 ialah undang-undang yang menentukan cara melakukan kekuasaan kehakiman tersebut Mahkamah Agung, undang-undang tentang susunan dan kekuasaan badan-badn kehakiman, dan undang-undang tentang syarat-syarat untuk diangkat dan untuk diberhentikan sebagai hakim.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebutkan dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.<sup>96</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut Bagir Manan mengemukakan bahwa, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna:

1. Kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial).
2. Larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan.
3. Diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat*).<sup>97</sup>

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan badan-badan legislatif dan eksekutif merupakan jaminan konstitusi, Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945, yang tidak saja melarang setiap campur tangan, instruksi tetapi bahkan juga, rekomendasi dari eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif dalam melaksanakan tugas-tugas peradilanannya.<sup>98</sup>

### *3. Konsep Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum Dalam Peradilan Pidana*

Berbicara tentang kemandirian lembaga/organisasi kepolisian di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara perkembangan politik, sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam sejarah perkembangan lembaga/organisasi kepolisian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

---

<sup>96</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

<sup>97</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPM-Universitas Bandung, Bandung, 1995, hlm. 10-12.

<sup>98</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 109.

Gerakan kemandirian pada kepolisian Indonesia bukan merupakan masalah yang khas Indonesia, melainkan juga merupakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa lain, dengan pengalaman sejarah yang khas pula.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan kemandirian lembaga/organisasi kepolisian tersebut berikut ini akan dikemukakan konsep kemandirian lembaga/organisasi kepolisian (polri) menurut beberapa ahli.

Kunarto menyatakan bahwa kemandirian polisi adalah kewenangannya tidak diintervensi oleh kekuatan apapun.<sup>100</sup> Hal tersebut juga dikemukakan oleh Erlangga Masdiana, bahwa kemandirian yang ditandai profesionalisme khas kepolisian yang menjamin tidak akan ada lagi intervensi terhadap tugas-tugas kepolisian utamanya tugas penegakan hukum.<sup>101</sup>

Selanjutnya menurut Awaloedin Djamin, mengemukakan bahwa “Polri mandiri dapat diartikan mandiri operasional dan pembinaan. Di samping itu cukup jumlah personil (menuju 1 : 750 misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota, kelengkapan peralatan, dan kesejahteraan anggota.”<sup>102</sup>

Berhubungan dengan kemandirian kepolisian tersebut di atas Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

“dorongan ke arah kemandirian” adalah tafsiran Indonesia untuk pengertian “dorongan ke arah *profesionalisme*”. Melalui wacana kemandirian Polri ingin diteguhkan, bahwa bagi Indonesia, profesionalisme Polri adalah masalah kemandirian organisasi dan kemandirian substansi, dalam hal ini perpolisian yang tidak militeristik. Lepas dari pola perilaku dan dominasi militer adalah credo Indonesia untuk kemandirian”.<sup>103</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum adalah kemandirian

---

<sup>99</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Polisi Indonesia Mandiri*, Dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: I, September 1999-April 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm. 13.

<sup>100</sup> Kunarto, *Loc. Cit.*

<sup>101</sup> Lihat Kompas tanggal 19 April 1999, hlm. 23.

<sup>102</sup> Awaloedin Djamin, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

organisasi dan kemandirian substansi dalam arti kewenangannya bebas dari intervensi militer, politik, ekonomi dan pemerintah yang ditandai khas profesionalisme terutama dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana lepas dari pola, perilaku dan dominasi militer.

Berbicara tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum sebenarnya berbicara mengenai profesionalisme lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Hal ini berkaitan juga yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kemandirian sebenarnya merupakan salah satu terminal dan suatu perjalanan panjang untuk menuju kepada profesionalisme Polri. Oleh karena itu kemandirian lembaga kepolisian merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk profesionalisme lembaga kepolisian (Polri), sebelum usaha lainnya dilakukan.<sup>104</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas Romli Atmasasmita<sup>105</sup> mengemukakan bahwa kemandirian Polri dalam arti luas mencakup kemandirian struktur dan pembinaan organisasi kepolisian yang mencakup *man*, *money* dan *material*. Dalam arti sempit kemandirian tersebut diartikan dari sisi eksternal yaitu kekuasaan kepolisian sebagai sub sistem dari kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif atau dari instansi lain. Sedangkan dari sisi internal, kemandirian harus diartikan sebagai profesional kepolisian yang mempunyai karakteristik, antara lain :

1. Memiliki integritas dan konsisten dalam berfikir dan berperilaku.
2. Bertindak dalam batas-batas rambu etika profesi dan tanggung jawab profesi.
3. Berorientasi kepada kebenaran bukan pembenaran.
4. Bersikap transparan dan menjauhi sikap apriori dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
5. Selalu mengembangkan sikap keingintahuan.
6. Menjauhi sikap berprasangka tanpa obyektivitas fakta dan data.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>105</sup> Romli Atmasasmita, *Kemandirian Polri Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, Dalam Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, diselenggarakan atas Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), Forum Komunikasi Kriminologi (FORKKRIM), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), di Hotel Horison Bandung, tanggal 3-4 Agustus 1998, hlm. 3.

7. Menjunjung tinggi asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam satu paket.

Secara umum pengertian profesionalisme menunjuk pada faktor-faktor yang ada di dalam individu Polri dan Lembaga Polri, baik yang mencakup aspek afeksi, kognisi dan aspek psikomotorik Hal ini juga dikemukakan oleh Kunarto, bahwa profesionalisme polisi adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya ketertiban, keamanan dan tegaknya hukum. Dengan demikian rasa aman, kebenaran dan keadilan adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan profesional Polri.<sup>106</sup>

Bertitik tolak dari ciri-ciri profesional tersebut di atas dapat ditarik makna lebih jauh, yaitu : 1) bahwa karakteristik polisi profesional jauh berbeda dengan karakteristik polisi justicial. Apalagi jika seluruh jajaran kepolisian masih beranggapan/berpandangan bahwa mereka adalah alat negara semata-mata dan bukan alat kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan; 2) bahwa karakteristik profesionalisme tersebut menuntut adanya otonomi dalam penyelidikan dan penyidikan dan otonomi tersebut hanya akan berhasil jika didukung oleh otonomi di bidang administrasi dan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka persoalan dan peran kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bukanlah semata-mata persoalan yuridis-formal ataupun konstitusional semata-mata melainkan juga merupakan persoalan struktur organisasai kepolisian modern yang didukung oleh manajemen penyelidikan dan penyidikan yang *scientific*. Sesuai dengan makna *scientific investigation* tersebut makna yang hendak ditemukan dari penyelidikan dan penyidikan adalah kebenaran bukan pembenaran. Kebenaran dari suatu hasil penyelidikan dan penyidikan hanya akan berhasil atau dapat dicapai dalam posisi kemandirian kekuasaan kepolisian

---

<sup>106</sup> Kunarto, *Tri brata Catur Prasetya Sejarah-Perspektif dan Prospeknya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 14-15.

yang bertanggung jawab bukan dalam posisi yang dipasung atau terkooptasi oleh doktrin-doktrin militer.

Di dalam era reformasi bidang-bidang politik, ekonomi, dan hukum dengan tujuan akhir adalah pembentukan suatu masyarakat sipil (*civil society*), maka perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana hanya dapat diwujudkan jika persoalan kemandirian kekuasaan kepolisian yang bertanggung jawab dapat dilembagakan secara merata dan menyeluruh ke dalam organisasi kepolisian Republik Indonesia.<sup>107</sup>

Berkaitan dengan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian/Polri dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, bukan berarti Polri akan melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri saja, tanpa berhubungan dengan lembaga penegak hukum yang lain (Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Pengacara). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Nurfaizi bahwa polisi sebagai penyidik merupakan pintu gerbang pertama (*gate keeper*) dalam proses penanganan suatu kasus pidana yang terkait serta dilaporkan masyarakat. Aparat penegak hukum lain diluar penyidik adalah Jaksa selaku penuntut umum, Hakim yang bertugas untuk mengadili, petugas lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap para narapidana dan rekan-rekan penasihat hukum selaku mitra kerja di dalam upaya penegakan hukum khususnya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri.<sup>108</sup>

Selanjutnya untuk terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana diperlukan beberapa aspek pendukung, sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Romli Atmasasmita, *Kedudukan Dan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam CJS*, Makalah disampaikan pada seminar "Kepolisian Negara RI", diselenggarakan oleh SESPI POLRI di Lembang, Bandung, tanggal 29-30 Juli 1998.

<sup>108</sup> Nurfaizi, "Peningkatan Kualitas Profesi Penyidik", Dalam Kunarto, *Polisi dan Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hlm. 106.

Ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan dan memberikan sumbangan penting kepada kepolisian dalam rangka kemandiriannya.<sup>109</sup>

Kemandirian dan profesional kepolisian niscaya menjadi semakin maju berkat sumbangan ilmu pengetahuan, atau dinyatakan secara negatif, tanpa bantuan dan sumbangan ilmu pengetahuan, profesionalisasi kepolisian akan berjalan lambat. Masuknya ilmu pengetahuan ke dalam perpolisian mengikuti tuntutan terhadap profesi yang menghendaki kemampuan dan keterampilan, artinya tak dapat diserahkan kepada sembarang orang. Ilmu pengetahuan yang dimaksud antara lain bidang administrasi dan teknik investigasi seperti pengembangan dalam teknologi sidik jari. Semakin maju dan berkembang ilmu pengetahuan kepolisian, maka orang akan semakin memberikan pengakuan terhadap keberadaan kepolisian dan perpolisian sebagai suatu kategori tersendiri. Pada gilirannya keadaan atau perkembangan yang demikian itu akan mendorong kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana, sehingga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka kemandirian lembaga kepolisian. Kemandirian Polri perlu ditopang oleh personil yang mampu menunjukkan sikap dan perilaku polisi yang tulen atau otentik. Untuk membentuk personil yang demikian itu peran pendidikan adalah nomor satu. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang terstruktur dan non formal yang berupa pelatihan. Hal ini terbukti dari penelitian di Amerika yang menunjukkan adanya kaitan erat antara pendidikan dengan kinerja polisi. Antara lain dibuktikan, bahwa polisi yang berpendidikan akademi lebih memiliki kepekaan terhadap rakyat, kemampuan berkomunikasi dan cara bertindak pada umumnya juga lebih baik.<sup>110</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas Nurfaizi mengemukakan bahwa wujud profesi penyidik dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

---

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Ci.*, hlm. 23-28.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

penyidik yang harus didukung oleh kecakapan taktis dan teknis penyidikan. Kecakapan teknis ini diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman-pengalaman tugas dan didukung oleh ilmu pengetahuan (Kepolisian).<sup>111</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan arus informasi bergerak dengan cepat, sehingga pengaruh globalisasi masuk ke setiap aspek kehidupan. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa penyidik akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks serta dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kemampuan penyesuaian diri tersebut akan dapat diwujudkan apabila sedini mungkin telah dipersiapkan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perkiraan ancaman (tindak pidana) yang akan dihadapi, sehingga dapat diperkirakan pula arah pengembangan kemampuan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tersebut.

Di sisi lain kualitas penyidik Polri masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa masalah seperti pra peradilan, bolak-baliknya berkas perkara yang dikirim ke penuntut umum, masih minimnya penyidik/penyidik pembantu yang mengikuti kejuruan reserse, serta rendahnya tingkat penyelesaian kasus yang terjadi. Di samping itu belum lagi dihadapkan kepada kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru seperti *white collar crime*, *money laundring*, kejahatan komputer, kejahatan bidang perbankan, moneter, pasar modal, korupsi, subversi, lingkungan hidup dan masalah perpajakan, kehutanan serta praktik penyelundupan hukum dan kejahatan-kejahatan lainnya yang berintensitas tinggi yang dibarengi dengan kekerasan dalam nuansa politik.<sup>112</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas kepolisian akan terus dihadapkan pada berbagai eskalasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih besar terutama di abad informasi sekarang ini atau era globalisasi. Kemajuan informasi bukan hanya

---

<sup>111</sup> Nurfaizi, *Op. Cit.*, hlm. 100.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 1001.



memacu lajunya teknologi tetapi juga mobilitas penduduk dunia dengan transformasi sosial, budaya, ekonomi, politik dan ideologi yang semakin berfrekuensi tinggi yang pada gilirannya akan sangat berpengaruh pada perkembangan kriminalitas dalam berbagai aspek. Dalam kondisi seperti ini, aparat keamanan terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat yaitu polisi senantiasa memacu diri untuk profesionalisme.

Untuk terwujudnya kepolisian yang profesional sekurang-kurangnya harus memenuhi lima syarat pokok. Menurut Sullivan yang dikutip oleh Anton Tabah, kelima syarat pokok tersebut adalah *well motivated* (motivasi yang melatarbelakangi setiap prajurit polisi), *well educated* (pendidikan umum maupun kepolisian yang memadai), *well trained* (latihan yang memadai), *well equipped* (sarana yang memadai) dan *well paid* (kesejahteraan hidup yang baik).<sup>113</sup> Semakin tinggi daya kemampuan dan profesionalisme, maka akan memperlancar proses kerja dan kinerja polisi dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Namun sebaliknya semakin rendah daya kemampuan dan profesionalisme akan menghambat tugas polisi dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.

Dari aspek kesejahteraan, dapat dilihat dari tinggi rendahnya gaji prajurit polisi. Sementara di pihak lain tugas kepolisian syarat resiko. Sebagai ilustrasi Anton Tabah mengemukakan:

Misal seorang polisi yang bertugas mengungkap suatu kejahatan harus melakukan observasi dan *surveillance* (pembuntutan dan pengintaian) yang biasanya memakan waktu sehari-hari. Hal ini membuat petugas polisi kurang tidur dan istirahat, karena itu mereka butuh makanan yang bergizi guna mengimbangi kekurangan istirahat. Padahal gaji hanya cukup untuk makan sehari-hari keluarganya dan bahkan masih ada yang menanggung uang sewa kontrak rumahnya. Karena tugas penyelidikannya itu maka tidak sedikit anggota polisi yang terpaksa berdapur ganda. Satu dapur untuk keluarganya, satu lagi dapur untuk makan dirinya sendiri selama bertugas.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 302.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan anggota polisi untuk bekerja baik apabila gaji yang diterima cukup memadai. Sehingga dengan kesejahteraan yang baik, dalam operasionalnya tidak mudah untuk diintervensi dari aspek ekonomi.

Tugas dan peran polisi senantiasa berkembang tidak hanya sebatas sebagai pemberantas kejahatan tetapi juga pelayanan masyarakat. Menurut Banurusman, kepolisian bukan hanya bertindak selaku *crime hunter* akan tetapi juga sebagai pemerhati sekaligus pemecah masalah sosial (*problem solver*, pemelihara sosial (*maintenance officer*) dan bahkan perekayasa sosial (*social engineering officer*) agar semua warga masyarakat patuh pada hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>115</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas peran polisi tidak lagi sederhana karena peran polisi diharapkan memiliki intelegensi yang baik dan kemampuan *managerial* yang tinggi, karena dihadapkan pada kapasitas tugasnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dalam arti polisi harus selalu berada selangkah lebih maju dari masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Mengingat para pelaku kejahatan melakukan kejahatannya dengan peralatan canggih, tidak lagi dengan cara konvensional. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Anton Tabah, bahwa indikasinya sudah jelas yakni tipologi kejahatan saat ini sudah berteknologi dan bermobilitas tinggi. Pencurian kini bukan saja menggunakan mobil tetapi juga menggunakan pesawat terbang.<sup>116</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas sudah waktunya apabila Polri mulai memacu teknologi dalam setiap operasionalnya untuk menangkal segala kejahatan yang terus berkembang. Dalam kenyataannya, Polri masih jauh ketinggalan di bidang teknologi terutama. Sebagai contoh aktual yang dihadapi Polri dalam mengungkap kasus peledakan bom baik di depan tempat tinggal Dubes Filipina dan peledakan

---

<sup>115</sup> Banurusman, *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>116</sup> Anton Tabah, *Op. Cit.*, hlm. 31.

bom di gedung BEJ Polri kesulitan untuk mengungkap jenis bahan peledak yang digunakan.

Di samping aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan, aspek kepercayaan masyarakat juga mempunyai peran yang penting terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Dalam kedudukannya selaku penyelidik dan penyidik Polisi merupakan ujung tombak yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penegakan hukum. Kewenangan Polisi sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana telah dikemukakan di atas menunjukkan betapa sangat berkaitan erat dengan hak-hak azasi seorang warga masyarakat yang notabene harus dijunjung tinggi.

Seberapa jauh tingkat konsistensi Polisi dalam proses pelaksanaan berbagai macam wewenang tersebut di atas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga tidak terjadi intervensi dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian.

Selanjutnya untuk terwujudnya kemandirian Polri dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang mengenai kewenangan dalam penegakan hukum tersebut. Meskipun kewenangan Polri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kewenangan Polri dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, dalam rangka terwujudnya kemandirian Polri perlu diadakan perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan yang masih mengkaitkan dengan status dan kedudukan Polri sebagai ABRI.<sup>117</sup>

Polisi yang hidup dalam suatu masyarakat juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dalam budaya Kepolisian yang menjadi lingkungannya. Dalam kultur

---

<sup>117</sup> Lihat Nurfaizi, *Hambatan dan Kesiapan Menuju Polri Berpostur Sipil*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional: Membangun Polisi Yang Berkarakter Sipil, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Dalam Rangka Menyambut Dies Natalis 1999, 8 Juli 1999, hlm.11.

polisi terdapat beberapa tanda-tanda khusus, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Jacob Chwast yang dikutip oleh Artidjo Alkotsar: *The uniform, ceremonials, stiquette, power and authority, a unique set of duties, strong kinship and solidarity among policemen, a sense of isolation from the rest of the community and other occupations, and dangers that are shared by all police.*<sup>118</sup> Jadi adanya pakaian seragam, seremonial, etiket, kekuasaan serta otoritas dan lain sebagainya yang dipunyai oleh polisi memberi ciri khas kepada organisasi kepolisian suatu kekuatan psikologis yang menarik, sehingga dengan itu para anggota kepolisian menerima dan memperkenalkan budaya polisi.

Ketidakmandirian Polri sebagai akibat belenggu undang-undang mengakibatkan Polri tidak utuh memerankan tugas institusionalnya yang hakiki. Dalam posisi yang demikian, Polri tidak leluasa untuk mengaplikasikan mandat hukum yang diberikan oleh undang-undang. Selama lebih dari 30 tahun, Polri berada di bawah pengaruh kultur politik yang terbentuk oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1997. Di mana kultur politik tersebut banyak bercirikan sentralisasi kekuasaan, padahal watak dasar tugas dan wewenang Polri adalah tegaknya hukum, bukan melindungi kewibawaan atau kekuasaan seorang penguasa. Jadi perlu adanya perubahan paradigma nilai dan perangkat undang-undang yang menyangkut Polri agar Polri berperan sesuai dengan hakikat keberadaanya.

---

<sup>118</sup> Artidjo Alkotsar, *Membangun Kultur Polri Yang Berorientasi Madani*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Membangun Kultur Baru Polri oleh Pusat Studi Keamanan Dan Perdamaian UGM Yogyakarta, 23 September 1999, hlm. 3.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam Menyelenggarakan Fungsi Penyidikan dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan pada Peradilan Pidana**

Untuk memperoleh gambaran tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan mengenai penjabaran kemampuan teknis kepolisian di bidang reserse (penyidikan). Di samping itu perlu kiranya dianalisis berbagai kondisi umum maupun khusus lembaga/organisasi kepolisian pada umumnya, dalam hal ini di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok.

##### **1. Penjabaran Kemampuan Teknis Kepolisian di Bidang Reserse (Penyidikan)**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dari aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian proses penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak azasi manusia seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup>

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa penyidikan dapat diartikan sebagai wewenang untuk melanggar hak asasi manusia secara syah dan legal. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Lihat Petunjuk Pelaksana No. Pol: Juklak/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, pada Pendahuluan angka 1 huruf a.

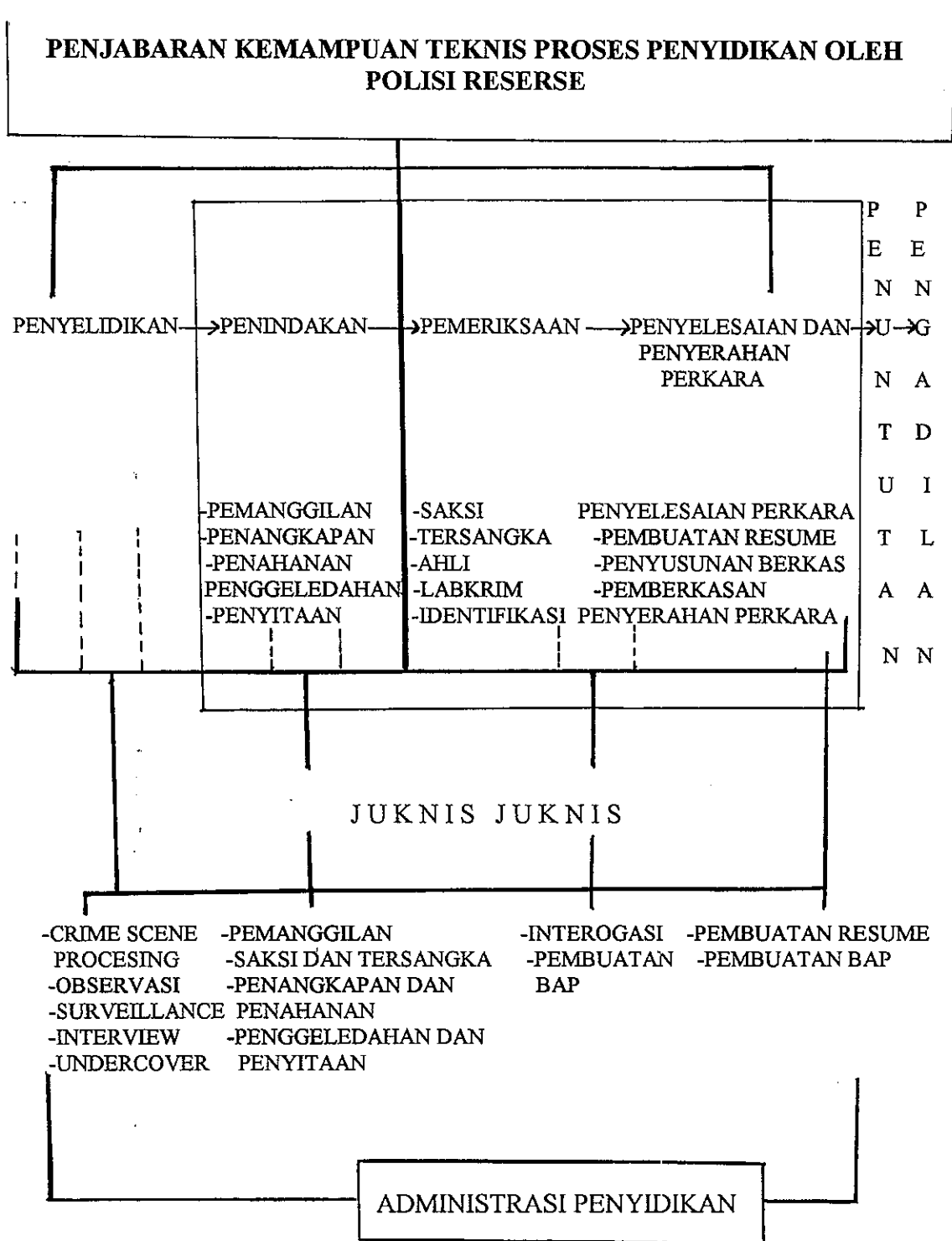
polisi selaku penyidik yang diberi wewenang haruslah jelas dan bertanggungjawab yang memerlukan profesionalisme tersendiri.<sup>2</sup> Dalam realita dari ketentuan tersebut memberikan kesempatan penyidik melakukan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dalam proses penyidikan misalnya melakukan penyiksaan atau tindak kekerasan terhadap tersangka, karena tidak mengatur sanksi bagi polisi penyidik yang melakukan pelanggaran tersebut. Disamping itu jika dikaitkan dengan dengan negara hukum yang demokratis di Indonesia ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya, yakni menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Untuk itu Petunjuk Pelaksanaan No. Pol/04/II/1982 tersebut perlu ditinjau kembali, dengan mencantumkan sanksi bagi penyidik yang melanggar hak asasi tersangka dalam proses penyidikan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi penyidik

Untuk memperoleh gambaran mengenai proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana tersebut dapat dijelaskan dalam Gambar 1 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Awaloedin Djamin *Memju POLRI Mandiri Yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, Cetakan Kedua, Yayasan Tenaga Indonesia, Jakarta, hlm. 177.

<sup>3</sup> Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ( Pasal 28I ayat (5) Perubahan Kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)).



Gamabar 1: Penjabaran Kemampuan Teknis Proses Penyidikan oleh Polisi Reserse.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa proses penyidikan pada peradilan pidana pada dasarnya terdiri atas empat tahap yang berurutan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

**Tahap Pertama**, adalah **Penyelidikan** yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi sehubungan dengan adanya laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, dan mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka dan bukti dan atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.<sup>4</sup>

Penyelidikan dalam peradilan pidana dilakukan oleh setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Adapun pertimbangan-pertimbangan dilakukannya penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Polisi.
2. Berbagai bentuk laporan atau pengaduan yang diterima reserse.
3. Berita acara pemeriksaan di TKP.
4. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Laporan atau pengaduan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan, dicatat terlebih dahulu oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik. Kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik/penyidik pembantu. Setelah selesai penerimaan laporan atau pengaduan, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan.

Laporan/ pemberitahuan tentang suatu peristiwa tindak pidana yang diterima petugas Polri dan bukan berasal dari korban atau orang yang dirugikan, tetapi secara sukarela memberikan laporan/pemberitahuan tersebut dan kemudian ditangani secara khusus untuk dituangkan dalam bentuk-bentuk laporan tertentu.

---

<sup>4</sup> Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Pada Bagian I. Pendahuluan, butir 5 huruf f.



Dari uraian tersebut di atas tidak mengatur mengenai batas waktu bagi penyidik untuk menindaklanjuti setelah laporan/pengaduan tersebut diterima oleh polisi penyidik, sehingga memberi peluang reserse (penyidik) secara bebas untuk menafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini berakibat berlarut-larutnya penyelesaian perkara oleh reserse yang bertentangan dengan asas penegakan hukum yang cepat. Akibatnya bagi masyarakat yang melaporkan perkara kepada polisi sering mengeluh, sebab tak jelas bagaimana laporannya ditangani. Di samping itu masyarakat sering bertanya sampai di mana kasus yang dilaporkan itu telah ditindaklanjuti penyidik. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pimpinan Polri, setiap penyidik Polri wajib memberikan laporan kepada masyarakat pelapor yang disertai dengan sanksi jika tidak dilaksanakan. Di samping itu juga diperlukan kebijakan dari pimpinan Polri untuk menentukan sanksi bagi polisi penyidik yang berlarut-larut menangani perkara dalam penyidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Komando Korps Reserse Polri Mayor Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar mengemukakan bahwa, penyidik janganlah mengembangkan kasus yang diadukan masyarakat. Karena itu, penyidik kepolisian wajib memberikan *progres report* (laporan perkembangan) kasus yang ditanganinya kepada masyarakat yang melaporkan perkara tersebut. Ini merupakan pertanggungjawaban polisi pada masyarakat. Laporan tersebut dibuat secara tertulis, sebaiknya disampaikan dalam waktu satu, tiga, dan enam bulan setelah laporan dari masyarakat diterima penyidik. Disamping itu, penyidik Polri jangan takut mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), jika kasus yang diadukan masyarakat itu tidak pantas dilanjutkan. Penerbitan SP3 juga merupakan bagian untuk menciptakan kepastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu ketentuan dalam Juklak tersebut perlu ditinjau kemabali, yakni dengan mengatur secara tegas mengenai jangka waktu polisi menindaklanjuti

---

<sup>5</sup> Komando Korps Reserse Polri Mayor Jenderal Da'i Bachtiar: Pelapor Wajib Diberi "Progress Report", Dalam *Kompas*, tanggal 16 Juni 1999, hlm.15.

laporan/pengaduan dari pelapor/pengadu serta mengatur tentang kewajiban bagi penyidik untuk memberikan laporan perkembangan kasus yang ditanganinya kepada masyarakat pelapor/pengadu yang disertai dengan sanksi.

Selanjutnya sebagai sasaran dari penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Orang.
2. Benda/barang.
3. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).

Penyelidikan oleh reserse dilakukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penyelidikan yang dilakukan secara tertutup memerlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa :
  - a. Interview.
  - b. Observasi.
  - c. Surveillance.
  - d. Undercover.

Hasil penyelidikan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna bagi:

1. Keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP (*Crime scene processing*), tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional seperti Labkrim, Identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka wajib menunjukkan tanda pengenal
2. Dalam melaksanakan penyelidikan secara tertutup agar dihindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.

Dari ketentuan tersebut yang terkait dengan kasus-kasus dalam pengolahan TKP, khususnya mengenai metode-metode tertentu yang digunakan polisi penyidik dalam rangka pencarian, pengambilan dan pengawetan barang bukti dalam praktik memberi peluang penafsiran yang berbeda antar polisi penyidik. Karena ketidakjelasan metode-metode yang dimaksud, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang kurang menguntungkan bagi pencari keadilan. Hal ini dapat terlihat penggunaan metode yang digunakan oleh Polisi penyidik

dalam kasus Udin dengan melarung darah sebagai barang bukti di Laut Selatan agar pelakunya segera tertangkap. Akibat dari perilaku polisi penyidik tersebut sampai saat ini kasus Udin tersebut yang ditangani oleh Polda DIY belum terungkap. Oleh karena itu agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan metode yang digunakan oleh polisi penyidik yang terkait dengan pengolahan TKP, ketentuan dalam juklak tersebut perlu ditinjau kembali atau diatur secara tegas mengenai metode tersebut. Di samping itu, perlu dicantumkan sanksi bagi polisi penyidik dalam hal melakukan pelanggaran dalam penggunaan metode tersebut, sehingga polisi penyidik akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan penyidikan tidak merugikan para pihak.

**Tahap Kedua, adalah Penindakan,** maksudnya setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun tindakan hukum tersebut, antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.<sup>6</sup>

#### **a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi**

Yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu. Adapun yang menjadi pertimbangan pembuatan surat panggilan adalah sebagai berikut:

1. Laporan polisi.
2. Pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
3. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu.

Petugas yang menyampaikan surat panggilan adalah setiap anggota polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau Ketua

---

<sup>6</sup> Lihat Petunjuk Pelaksana No. Pol: Juklak/04/11/1982, Bagian IV. Pelaksanaan, angka 2. Kegiatan Penyidikan, huruf a. Penindakan.

RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan yang bersangkutan. Sedang dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanggilan tersangka dan saksi adalah:

1. Sebagai peringatan terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan, agar memberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan adanya sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 216 KUHP.
2. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan ke dua berlaku surat perintah membawa.

Dari ketentuan tersebut dapat dianalisis, bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur tenggang waktu kapan seorang Tergugat/Saksi harus datang setelah menerima surat panggilan. Disamping itu juga tidak menentukan siapa yang bertanggung jawab jika surat panggilan tidak sampai pada tersangka/saksi yang tidak berada ditempat. Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda antara polisi penyidik dan tersangka/saksi atau agar tidak menimbulkan kerugian masing-masing pihak, maka perlu adanya ketentuan yang tegas tenggang waktu tersangka/saksi wajib datang guna memberikan keterangannya. Disamping itu perlu ditentukan mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap surat panggilan yang

tidak sampai pada tersangka/saksi dengan pemberian sanksi, jika surat panggilan tersebut tidak disampaikan kepada tersangka/saksi.

#### **b. Penangkapan**

Untuk penangkapan yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Adapun pertimbangan dilakukannya penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan polisi;
- 2) Pengembangan dari pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- 3) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu.

Penangkapan dilakukan oleh Petugas Polisi Republik Indonesia terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Suatu penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah, kecuali bila dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu cukup dengan surat perintah penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

Dalam melakukan penangkapan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni:

- 1) Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh KUHP hanya 1 x 24 jam;
- 2) Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;

- 3) Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarganya.

Dari ketentuan tersebut dapat dianalisis, bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan kapan seseorang setelah ditangkap untuk diperiksa dan ditahan/tidaknya, karena hanya ditentukan segera. Hal ini akan memberi peluang kepada polisi untuk menunda pemeriksaan sampai batas akhir 24 jam setelah ditangkap, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertangkap, jika tidak terdapat bukti adanya suatu tindak pidana. Hal tersebut bertentangan dengan HAM yakni kebebasan dari penangkapan yang sewenang-wenang.<sup>7</sup> Untuk itu ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dengan mencantumkan batasan waktu yang jelas dan tegas sehingga tidak merugikan pihak tertangkap yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Disamping itu juga perlu dicantumkannya sanksi bagi penyidik jika melakukan kesalahan/salah tangkap sehingga penyidik akan lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan.

Berkaitan dengan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksudkan di atas, harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam penerapannya pengertian segera adalah relatif, sehingga tidak memberikan kejelasan atau kepastian. Mengingat kejadian yang terjadi di Polda DIY, setelah tiga hari keluarga si tersangka (dr. Hidayat) dalam kasus pemerasan terhadap pasien, baru diberikan tembusan surat perintah penangkapan. Oleh karena itu keluarga tersangka mengajukan praperadilan. Akan tetapi Pengadilan Negeri Sleman memenangkan pihak penyidik yang memberikan tembusan surat penangkapan terlambat, dengan pertimbangan pengertian segera yang dimaksud adalah relatif.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan

---

<sup>7</sup> Kunarto, *Polri dan HAM*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 42.

<sup>8</sup> Kasus yang sama terjadi di Kosek Metro 706-05 Tangerang, di mana hakim memenangkan pihak penyidik yang memberikan tembusan surat penangkapan terlambat. (Djoko Prakosa, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 119.

pengertian segera menurut hakim tersebut, melainkan pengertian segera adalah dalam waktu yang cepat yakni kurang dari satu hari. Diberikan surat tembusan dengan segera kepada keluarga, agar keluarga tersangka yang ditangkap tetap tenteram dan tidak menimbulkan tanda tanya.

### **c. Penahanan**

Untuk penahanan, yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik.<sup>9</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dianalisis, bahwa yang menentukan dapat ditahan/tidaknya adalah komandan kesatuan. Seharusnya yang dapat menentukan dapat/tidaknya seseorang untuk ditahan adalah polisi penyidik, karena polisi penyidik yang lebih mengetahui perlu/tidaknya dilakukan penahanan. Dalam rangka memandirikan polisi penyidik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan, maka ketentuan mengenai wewenang mengeluarkan surat perintah penahanan tersebut ditinjau kembali, yakni bukan komandan kesatuan melainkan polisi penyidik yang berwenang menentukan ditahan/tidaknya seseorang dalam proses penyidikan.

### **d. Penggeledahan**

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Adapun dasar pertimbangan dilakukannya penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan polisi,
- 2) Hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi, dan
- 3) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu.

---

<sup>9</sup> Lihat Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/04/II/1982. Pada Bagian IV. Pelaksanaan butir 2. Kegiatan Penyidikan dan huruf c. Penahanan.



Objek penggeledahan adalah: (1) rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, (2) badan dan (3) pakaian. Penggeledahan rumah dilakukan dengan Surat Perintah Penggeledahan setelah mendapat Surat ijin Ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dalam melaksanakan penggeledahan rumah di samping harus dilengkapi surat ijin ketua pengadilan negeri dan surat perintah penggeledahan, juga harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama 2 orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan bila penghuni tidak menyetujui. Sedang untuk penggeledahan di luar daerah hukum penyidik, harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Dalam melakukan penggeledahan badan wanita dan dalam hal perlu dilakukan penggeledahan rongga badan dimintakan bantuan dari pejabat kesehatan.

Selanjutnya dalam waktu 2 dua hari setelah dilakukan penggeledahan harus sudah dibuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah/tempat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan penggeledahan terhadap rongga badan, mengingat pelaku kejahatan semakin canggih dalam melakukan kejahatan, maka perlu adanya batasan yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan dalam penafsiran sehingga pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari penggeledahan. Mungkin yang dimaksud rongga badan dapat diberikan batasan setiap rongga badan yang digunakan untuk menyimpan suatu barang dari hasil kejahatan atau untuk melakukan kejahatan, misalnya perut, liang dubur, alat kelamin wanita. Dalam praktik pernah terjadi di Polda DIY dalam tindak kejahatan narkoba dimana pelakunya seorang mahasiswi menyembunyikan sabu-sabu di lubang alat kelaminnya. Di Sulawesi Utara penyelundup dari Tawao ke Sangit Talaud menyembunyikan batang emas di lubang duburnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 149-150.

#### **e. Penyitaan**

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Adapun yang menjadi pertimbangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Laporan polisi,
2. Hasil pemeriksaan,
3. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu,
4. Hasil penggeledahan.

Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat ijin/ijin khusus dari ketua pengadilan negeri. Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus bertindak segera, maka penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin dari ketua pengadilan negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun benda-benda yang dapat disita, untuk kepentingan penyidikan yang dapat dijadikan barang bukti adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi sebagai dimaksud (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Termasuk pengertian penyitaan adalah membuka, memeriksa dan menyita "surat lain", yaitu surat dari atau kepada tersangka yang dikirimkan melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan/perusahaan komunikasi atau transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dan pelaksanaannya harus dengan ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri.
2. Setelah dilakukan penyitaan, kepada pemilik atau kepada orang dari mana benda itu disita harus diberikan tanda penerimaan.
3. Segera setelah dilakukan penyitaan, harus dibuat berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik atau orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
4. Turunan dari Berita Acara Penyitaan disampaikan kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dari kepala desa.

Dari ketentuan tersebut hanya mengatur tentang cara-cara melakukan penyitaan dan pejabat yang berwenang melakukan penyitaan. Namun tidak mengatur siapa yang bertanggungjawab terhadap perawatan benda/barang sitaan dan bila barang/benda sitaan tersebut hilang. Akibatnya dalam praktik sering terjadi benda sitaan "berubah" tidak sesuai dengan barang /benda pada saat

dilakukan penyitaan.<sup>11</sup> Oleh karena itu perlu diatur mengenai siapa yang wajib bertanggungjawab terhadap perawatan atau hilangnya benda/barang sitaan yang disertai sanksinya, sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang polisi penyidik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan khususnya yang terkait dengan penyitaan.

**Tahap Ketiga**, adalah **pemeriksaan** yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.<sup>12</sup>

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Adapun yang menjadi pertimbangan dilakukannya pemeriksaan adalah:

1. Laporan polisi.
2. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu.
3. Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
4. Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

---

<sup>11</sup> Contoh kasus yang terjadi di Kepolisian Bandara Supadio, Pontianak: sebanyak 12 kg emas milik pedagang emas yang ditahan petugas, diduga "hilang". Padahal, saat ditahan jumlah emas 50 kg, namun setelah barang bukti itu berpindah ke tangan polisi, emas itu hanya tinggal 38 kg, Dalam *Kompas*, tanggal 16 Juni 1999, hlm. 17. Kasus penembakan petani diperkebunan kopi Dusun Ketajek (Jember), Polres Jember dinilai telah melakukan rekayasa dengan menggandakan jumlah alat bukti senjata tajam milik petani yang disita polisi. Pada hal senjata tajam yang dibawa petani tidak sebanyak yang ada di Polres, dalam *Kompas*, tanggal 5 Mei 1999, hlm 8. Bandingkan dengan barang bukti mobil yang berubah bentuk yang disita di Polda Metro Jaya bahwa mobil-mobil bermasalah yang masih menunggu pemiliknya itu, sebagian sudah berubah bentuk. Banyak bagian mobil yang menjadi barang bukti tersebut hilang, Dalam *Kompas* tanggal 20 Juni 2000, hlm. 28.

<sup>12</sup> Lihat Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/04/II/1982 Pada IV. Pelaksanaan butir 2. Kegiatan Penyidikan huruf c. Pemeriksaan, Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, Mei 1987, hlm. 19.

Pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi, dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Interview.
2. Interogasi.
3. Konfrontasi.
4. Rekonstruksi.

**a. Pemeriksaan saksi/ahli**

Dalam pemeriksaan saksi/ahli perlu diperhatikan hal-hal berikut di bawah ini:

1. Saksi tidak disumpah, kecuali terdapat cukup alasan diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir di pengadilan.
2. Diusahakan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan.
3. Hindarkan sifat konfrontasi dan bangkitan rasa simpati untuk menumbuhkan minat memberikan keterangan yang lebih jelas.
4. Bila dianggap perlu untuk kepentingan penyidik, penyidik dapat minta pendapat ahli atau orang ahli yang memiliki keahlian khusus yang terlebih dahulu diambil sumpahnya.

Dari uraian tersebut diatas terlihat ketidaktegasan ketentuan dari butir 2 tersebut berakibat memberi peluang kepada polisi penyidik untuk melakukan penundaan pemeriksaan sehingga bertentangan asas penegakan hukum yang cepat. Di samping hal tersebut, ketentuan butir 3 menunjukkan ketidak sinkronnya dengan ketentuan sebelumnya, yakni pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dilakukan dengan cara konfrontasi. Hal ini tentu saja dalam paktik menimbulkan penafsiran yang berbeda antar polisi penyidik dan akibatnya tidak menguntungkan

bagi saksi. Karena dalam praktik sering terjadi dimintai keterangan sebagai saksi berubah menjadi tersangka. Untuk itu kedua butir tersebut perlu ditinjau kembali, yakni mencantumkan secara jelas dan tegas yang disertai dengan sanksi bagi polisi penyidik yang melakukan penyimpangan, sehingga polisi lebih berhati-hati dalam meminta keterangan kepada saksi.

#### **b. Pemeriksaan tersangka**

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka perlu diperhatikan hal-hal berikut di bawah ini, yaitu:

1. Sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP wajib didampingi penasehat hukum.
2. Pada waktu penyidik/ penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.
3. Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepada tersangka.
4. Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*saksi a decharge*), dan bila ada penyidik/ penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksanya.
5. Tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun.

Dari ketentuan butir 1 dan butir 5 tersebut di atas menunjukkan adanya kelemahan, karena tidak menentukan sanksi bagi polisi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP wajib didampingi penasehat hukum. Akibatnya dalam praktik sering terjadi pemeriksaan terhadap tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal tersebut terjadi, karena polisi penyidik sebelum melakukan pemeriksaan bukannya memberitahukan kepada

tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum melainkan menanyakan menggunakan bantuan hukum atau tidak, jika menggunakan akan diancam pidana yang berat kecuali penasehat hukum yang ditentukan oleh polisi penyidik. Disamping itu, penyidik dalam memperoleh keterangan sering melakukan penyimpangan atau mengabaikan aturan hukum. Tersangka tidak mempunyai kebebasan dalam memberikan keterangan dan juga tidak selalu didampingi penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum dianggap sebagai penghalang, yang akan mempersulit penyidikan.<sup>13</sup> Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan memilih penasehat hukumnya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk dicermati, hak-hak tersangka dalam menghadapi pemeriksaan oleh penyidik di Amerika Serikat, yang tertuang dalam "*Miranda Rules*"<sup>15</sup>, antara lain menegaskan sebelum Polisi memeriksa tersangka, ia terlebih dahulu harus memberitahukan hak-hak tersangka tentang:

- a. Hak untuk tidak menjawab pernyataan-pernyataan apapun yang diajukan oleh pemeriksaan/interogator ("*the right to remain silent*").
- b. Apapun yang tersangka katakan itu dapat dan dipakai untuk memberatkan tersangka.
- c. jika tersangka tidak mampu membayar pembela, ia berhak diberi pembela dari negara.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan semua informan tersangka dan informan penasehat hukum.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Dalam Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 256.

<sup>15</sup> Miranda Warning dalam *Miranda Case* (*Miranda vs Arizona* tahun 1966) lahir setelah kasus *Miranda* yang didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat negara bagian Arizona, tetapi pada saat polisi melakukan penangkapan ternyata tidak memberitahukan hak tersangka untuk diam (*Have the right to remain silent*) dan hak untuk mendapat bantuan hukum (*right to have a counsel*). Kelalaian petugas tersebut membawa konsekuensi terhadap pembebasan terdakwa oleh MA Amerika Serikat. Oleh karena itu kasus *Miranda* ini menjadi peringatan bagi pejabat hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap tersangka sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga kasus ini dikenal "*Miranda Warning*" (Made Darmawan Weda: Tantangan Polri Kekerasan dalam Penyidikan, Dalam *Kompas*, tanggal 2 Juli 1998, hlm. 4.)

Sehubungan dengan hal tersebut di Inggris, dalam "*Judges Rules*" ditentukan bahwa pemeriksaan sebelum memeriksa tersangka harus memberitahukan segala hak-hak tersangka dalam proses penyidikan termasuk akibat hukum terhadap pelanggaran hak tersebut.<sup>16</sup>

Miranda Rules merupakan pelajaran yang baik bagi aparat penegak hukum karena kelalaiannya mengucapkan apa yang menjadi hak tersangka membawa konsekuensi pembebasan di tingkat Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kasus ini memang terjadi di Negara Barat, tidak ada salahnya jika dijadikan contoh dalam memperhatikan hak-hak tersangka.

### **c. Pemeriksaan oleh ahli**

1. Jika terdapat pengaduan adanya surat/tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu penyidik dapat minta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
2. Keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut di atas dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis.
3. Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati.
4. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya berupa keterangan ahli (*visum et repertum*).

Kata dapat dalam butir 1 dari ketentuan tersebut di atas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Akibatnya minta atau tidak minta untuk pemeriksaan ahli tergantung dari polisi penyidik, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyidik untuk minta keterangan pada seorang ahli. Sedang di pihak lain untuk kepentingan pengadu/korban kasus tersebut seharusnya dimintakan keterangan pada

---

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 30.



seorang ahli. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan perbedaan dalam penafsiran ketentuan kata dapat tersebut di atas perlu ditinjau kembali, sehingga dapat memberikan rasa keadilan pada pencari keadilan.

### **Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi/Ahli**

Dalam melakukan pemeriksaan tersangka dan atau saksi dan atau tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang memenuhi persyaratan formal dan material.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka atau saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disediakan ruangan yang konstruksinya memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan.
2. Tersangka dan atau saksi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Dalam hal tersangka tidak bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berhubungan dengan butir 1 dari ketentuan tersebut di atas dalam realitas, konstruksi ruangan kurang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan tidak dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka. Baik di Polres Sleman maupun di Polsek Depok, ruangan tersebut terlihat pengab, minim ventilasi, sempit dan terlihat kurang efisien. Akibatnya dalam pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum, dan pada kesempatan itu dimanfaatkan polisi penyidik untuk memperlakukan tersangka sebagai objek pemeriksaan seperti dalam sistem inquisitoir yang dulu dianut HIR. Sistem inquisitoir ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan penyidik selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan

menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.<sup>17</sup> Untuk itu agar hak-hak tersangka terjamin perlu dicantumkan akibat hukum dari pemeriksaan yang dilakukan dalam ruangan yang konstruksinya tidak memenuhi persyaratan sehingga dapat menimbulkan tindakan keras/penganiayaan dari penyidik guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

#### **Tahap Keempat, adalah Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.**

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah:<sup>18</sup>

- a. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh.
- b. Unsur-unsur tindak pidana.
- c. Demi hukum.

Adapun kegiatan penyelesaian berkas perkara dalam penyidikan terdiri dari:

##### **a. Pembuatan Resume**

Pembuatan Resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

##### **a. Penyusunan isi berkas perkara**

Susunan isi berkas perkara hasil penyidikan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. Sampul Berkas Perkara.

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 46-47.

<sup>18</sup> Petunjuk Pelaksanaan, No. Pol: Juklak/04/II/1982, Bagian IV. Pelaksanaan butir 2. Kegiatan Penyidikan huruf d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

2. Daftar Isi Berkas Perkara.
3. Resume.
4. Laporan Polisi.
5. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli.
8. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
9. Berita Acara Penyempahan Saksi/Ahli.
10. Surat/Berita Acara Pemeriksaan oleh ahli (antara lain hasil pemeriksaan *forensic laboratories*).
11. Berita Acara Konfrontasi.
12. Berita Acara Rekonstruksi.
13. Berita Acara Penangkapan.
14. Berita Acara Penahanan.
15. Berita Acara Penangguhan Penahanan.
16. Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.
17. Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
18. Berita Acara Pengeluaran dari Tahanan.
19. Berita Acara Penggeledahan.
20. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
21. Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang.
22. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
23. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
24. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti.
25. Berita Acara Pemeriksaan Surat.
26. Berita Acara Penyitaan Surat.
27. Berita Acara Pemasukan Rumah.
28. Berita Acara Tindakan-tindakan lain.

29. Surat Perintah Penahanan.
30. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
31. Surat Penangguhan Penahanan.
32. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan.
33. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan.
34. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan.
35. Surat Panggilan.
36. Surat Perintah Membawa.
37. Surat Ijin/Penggeledahan/Penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat.
38. Surat Perintah Penangkapan.
39. Surat Perintah Penggeledahan.
40. Surat Perintah Penyitaan
41. Keterangan Ahli (*visum et repertum*).
42. Dokumen-dokumen Bukti.
43. Daftar Tersangka.
44. Daftar Saksi.
45. Daftar Barang Bukti.
46. Petikan Surat Putusan Pemidanaan.
47. Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan, jika:

1. Tidak terdapat cukup bukti, atau
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
3. Dihentikan demi hukum.

Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Selain hal tersebut di atas, hal lain yang harus diperhatikan adalah:

1. Dengan tidak adanya ketentuan berapa kali Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi, maka penyerahan berkas perkara agar sebelumnya diteliti secara cermat, apakah Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi sudah memenuhi persyaratan formal atau material maupun kelengkapan buktinya.
2. Jika dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara diserahkan tidak dikembalikan oleh penuntut umum, maka penyidikan dianggap selesai.
3. Pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk tertulis secara jelas memuat hal-hal yang harus dilengkapi.
4. Dalam acara pemeriksaan singkat, maka penyidik pembantu dapat menyerahkan berkas perkara langsung kepada penuntut umum.
5. Dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, penghinaan ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum, menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi dan terdakwa ke pengadilan.
6. Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diserahkan kepada penuntut umum melalui Polri.

Dilihat dari susunan isi berkas perkara tersebut di atas menunjukkan proses yang panjang sehingga bertentangan dengan asas penegakan hukum yang sederhana. Oleh karena itu ketentuan tentang susunan isi berkas perkara tersebut perlu ditinjau kembali dengan mencantumkan susunan isi berkas perkara yang lebih sederhana.

Berhubungan dengan ketentuan tentang penghentian penyidikan tersebut di terdapat kelemahan, sehingga dimungkinkan polisi penyidik melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena dalam ketentuan tersebut tidak mencantumkan sanksi bagi polisi yang tidak mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan alasan penghentian penyidikan. Untuk itu guna mengurangi penyalahgunaan wewenang polisi penyidik dalam menghentikan penyidikan perlu

dicantumkannya sanksi bagi penyidik yang tidak mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan serta alasan penghentian penyidikan.

### **c. Pemberkasan**

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berita Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu. Selanjutnya Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara, sedang tahap berikutnya, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

Berhubungan dengan uraian tersebut, dalam praktik hanya terjadi berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Hal ini berarti penyidikan sudah selesai, namun tidak ditindaklanjuti penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, sehingga perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri. Oleh karena itu perlu diatur ketentuan tentang sanksi jika penyidik tidak menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa polisi dalam melakukan penyidikan harus melalui beberapa tahap dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga lain di luar instansi atau lembaga kepolisian. Instansi atau lembaga yang dimaksud adalah mulai dari pengadilan negeri, Kejaksaan, bahkan juga kepala lingkungan atau RT/RW. Di samping berbicara masalah keberadaan saksi ahli juga diperlukan koordinasi dengan instansi atau lembaga saksi ahli tersebut berasal. Demikian juga dalam hal-hal tertentu perlu mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain, ahli psikologi dan atau psikiatri.

Berkaitan dengan proses penyidikan yang merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks tersebut dituntut adanya suatu keahlian, ketrampilan dan pengetahuan serta tanggung jawab tersendiri bagi polisi reserse (penyidik). Sebagaimana telah dikemukakan polisi reserse dalam melakukan penyidikan di samping harus mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tersebut, secara intern reserse (penyidik) menghadapi berbagai persoalan keseharian baik dari lingkungan tempat mereka bekerja maupun di lingkungan mereka bertempat tinggal. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan, rumitnya hubungan birokrasi antar suatu bagian dengan bagian lain di lingkungan kerja, tuntutan prestasi kerja yang dibebankan atasan kepada penyidik. Di samping adanya tuntutan dalam pencapaian target oleh instansinya dan juga adanya berbagai peran yang melekat pada penyidik yang merupakan bagian dari lembaga kepolisian dan lain sebagainya, merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi oleh penyidik. Apalagi jika menghadapi pelaku kejahatan yang cenderung berbelit-belit atau kasusnya menyangkut kepentingan "orang-orang tertentu", mau tidak mau akan memberi warna tersendiri bagi jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik. Belum lagi dilihat dari sudut kondisi rumah tangga, perekonomian dan masalah-masalah dalam keluarga akan membawa pengaruh terhadap perilaku polisi dalam melakukan penyidikan pada peradilan pidana.

Dalam rangka menganalisis mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, dilakukan dengan bertitik tolak pada gambaran yang kompleks tersebut yang akan dikaitkan dengan berbagai aturan main mengenai bagaimana seharusnya penyidikan itu dilakukan, pada satu sisi memberikan jaminan hukum yang cukup baik bagi pelaku kejahatan, namun pada sisi lain justru cukup memberatkan polisi dalam melakukan penyidikan. Bagi masyarakat luas, mungkin akan lebih mudah menilai bahwa polisi selama ini belum menunjukkan kemandirian dan profesional, dengan indikator masih banyaknya

kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka, masih mudah diintervensi maupun praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun jika dilihat secara menyeluruh, cermat dan lebih teliti, masalahnya tidak sederhana yang mereka bayangkan. Banyak faktor di luar hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, di mana oleh masyarakat polisi dituntut untuk tampil sebagai pihak yang independen atau mandiri dan senantiasa dapat dijadikan tempat berlindung dari berbagai bentuk kejahatan maupun perbuatan-perbuatan lain yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Dengan perkataan lain polisi selaku penyidik dituntut tampil secara mandiri yang profesional, tidak diskriminatif, tidak mudah diintervensi dari kekuatan apapun dan dari manapun, tidak bertindak keras (militeristik) dalam menghadapi masalah, dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh polisi.

## **2. Gambaran Umum Lembaga Kepolisian Dalam Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum Di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok**

Sebagaimana telah dikemukakan untuk mengetahui gambaran tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, perlu kiranya dikemukakan mengenai gambaran umum maupun khusus mengenai organisasi kepolisian pada Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok, yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan tugas polisi selaku penyidik, sebagai berikut.

### **a. Sumber Daya Manusia Polisi Penyidik di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok.**

Berbicara mengenai sumber daya manusia polisi penyidik ini meliputi jumlah personil reserse (penyidik) dan latar belakang pendidikan polisi penyidik.



Berkaitan dengan jumlah personil polisi penyidik perlu kiranya dikemukakan gambaran personil polisi penyidik Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok.

Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di tepi jalan ring road utara di wilayah Kabupaten Sleman meliputi empat wilayah polres yakni Wilayah Polres Sleman, Kulonprogo, Bantul dan Gunung Kidul dan satu wilayah polres kota, yakni Polres Kota Yogyakarta. Dengan wilayah seluas 3.186 km<sup>2</sup> dan penduduk sebanyak 3.185.384 jiwa, DIY memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1.000 jiwa/km<sup>2</sup> Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kota Yogyakarta dengan tingkat kepadatan sebesar 14.503 jiwa/km<sup>2</sup>. Dilihat dari kondisi geografisnya, DIY termasuk daerah dataran rendah, dengan sedikit wilayah pegunungan di kabupaten Gunung Kidul dan wilayah pantai di sepanjang Kabupaten Kulon Progo.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada, yaitu sebanyak 81 buah. Menurut seorang informan polisi Polda DIY, masyarakat Yogyakarta juga dikenal sebagai masyarakat yang pandai dan kritis. Lebih lanjut menyatakan, pernah mengeluh betapa sulitnya membuat suatu kebijakan tanpa mendapat kritikan dari masyarakat. Menurut pandangan informan, kepandaian dan kekritisian masyarakat tersebut di sisi lain mendorong positif bagi jajaran kepolisian Polda DIY, yakni bisa mendorong prioritas program kerja lembaganya adalah para anggota untuk terus menerus belajar, baik formal maupun informal, baik secara akademik maupun kecerdasannya.

Personil polisi di Wilayah Polda DIY 4.391 orang. Dengan jumlah penduduk 3.185.248 jiwa<sup>19</sup>, ratio polisi penduduk sebesar 1 : 725. Rasio ini masih di bawah ideal tetapi lebih baik dari rata-rata rasio polisi di Indonesia. Dari 4.391 polisi tersebut sebagai polisi penyidik hanya sebanyak 52 (lima puluh dua) reserse atau

---

<sup>19</sup> Sumber Data: Data Dinding pada bagian Administrasi Polda DIY per Maret 2000.

8,4% jauh dari jumlah reserse ideal yakni 20% dari jumlah personil wilayah kerjasempat<sup>20</sup>. Kekuatan personil secara realitas September 2000 kurang lebih 223.987 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 210 juta. Jadi dengan ratio perbandingan polri dengan penduduk 1 : 1100 adalah sangat minim, idealnya ratio perbandingan polisi dengan penduduk adalah 1 : 450.<sup>21</sup>

Wilayah Polres Sleman meliputi 17 (tujuh belas) wilayah kepolisian sektor, yakni:

1. Kepolisian Sektor Mlati.
2. Kepolisian Sektor Tempel.
3. Kepolisian Sektor Sleman.
4. Kepolisian Sektor Sayegan.
5. Kepolisian Sektor Ngaglik.
6. Kepolisian Sektor Turi.
7. Kepolisian Sektor Pakem.
8. Kepolisian Sektor Kalasan.
9. Kepolisian Sektor Prambanan.
10. Kepolisian Sektor Ngemplak.
11. Kepolisian Sektor Cangkringan.
12. Kepolisian Sektor Godean.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kadit Serse Polda DIY Bapak Kolonel Polisi (Komisaris Besar Polisi) Drs. Toto Sunyoto, pada tanggal 1 Mei 2000 di Polda DIY. Bandingkan dengan Davit H. Bayey yang menyatakan, bahwa tugas polisi dalam penyidikan menyerap 14% dari seluruh personil polisi di Kanada, 15% di Inggris dan Amerika Serikat, 10% di Australia dan 20% di Jepang, dalam *Police For The Future (Polisi Masa Depan)*, Terj. Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 40. Bandingkan juga dengan Mayor Jenderal Da'i Bachtiar yang menyatakan, bahwa saat ini jumlah penyidik hanya 9% dari jumlah seluruh anggota polisi. Jumlah itu masih sangat jauh dari kebutuhan ideal yakni 20% dari jumlah anggota polisi, dalam *Kompas*, tanggal 8 September 1999, hlm. 15.

<sup>21</sup> Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Isu-Isu Strategis Dalam Penegakan Hukum Dan Peluang Umum Serta Pemelihara Kamdagri Berdasarkan Visi, Misi, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan Yang Dimiliki Oleh Polri*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia V tentang Peran Polri Sebagai Akselerator Demokratisasi Masyarakat Indonesia, Yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Kepolisian FH UNDIP-Polda Jateng, Semarang, 22 Nopember 2000, hlm. 10.

13. Kepolisian Sektor Gamping.
14. Kepolisian Sektor Moyudan.
15. Kepolisian Sektor Minggir.
16. Kepolisian Sektor Berbah.
17. Kepolisian Sektor Depok, dengan 3 (tiga) pos polisi pembantu, yaitu:
  - a. Pos Polisi Pembantu Maguwaharjo.
  - b. Pos Polisi Pembantu Ambarukmo.
  - c. Pos Pembantu Bulaksumur.

Luas Wilayah Polres Sleman adalah 57.48 km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk 838.628 jiwa. Jumlah polisi di wilayah ini sebanyak 1.036 personil<sup>22</sup>, maka rasio polisi dengan jumlah penduduk adalah 1 : 810. Rasio ini masih di bawah ideal, tetapi lebih baik dari rasio rata-rata di Indonesia. Sedang jumlah personil reserse sebanyak 48 orang, yang terdiri dari:

1. Kepala satuan (kasat) : 1 orang.
2. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaurbin Ops) : 1 orang.
3. Bintara Identifikasi (Baur Ident) : 3 orang.
4. Bintara Administrasi Operasional (Bamin Ops) : 2 orang.
5. Bintara Administrasi Penyidikan (Bamin Dik) : 2 orang.
6. Bintara Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Batahti) : 2 orang.
7. Unit I Reserse Umum (Resum):
  - a. Unit Resum Umum I : 4 orang.
  - b. Unit Reserse Umum II : 5 orang
  - c. Unit Reserse Umum III : 4 orang.
8. Unit II Narkoba : 5 orang.
9. Unit III Tipiter : 5 orang.
10. Unit IV URC:

---

<sup>22</sup> Sumber: Polres Sleman per Maret 2000.

- a. Unit URC I : 7 orang
- b. Unit URC II : 7 orang

Selanjutnya mengenai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh reserse Polres Sleman. Dari 48 personil reserse tersebut di atas sebagian besar berpendidikan SMA yakni sejumlah 42 orang, 3 orang berpendidikan SLP, sedang yang berpendidikan sarjana hanya 1 orang. Dari 48 personil tersebut yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan serse umum / dasar sebanyak 12 orang, lama pendidikan 3 bulan di Banyu Biru Ambarawa. Kemudian yang mengikuti pendidikan kejuruan identifikasi 1 personil sedang yang mengikuti pendidikan sidik jari 3 personil.<sup>23</sup>

Dengan kondisi pendidikan umum yang demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya pendidikan umum SDM serse Polres Sleman tidak terlalu rendah, sehingga sebenarnya kemampuan untuk menerima informasi atau pengetahuan juga relatif baik. Namun apabila dilihat dari pendidikan kejuruan khusus reserse atau yang dimiliki penyidik maupun penyidik, maka ternyata SDM yang terlatih secara khusus jumlahnya relatif sedikit. Hal ini dapat terlihat dari jumlah serse yang ada baik serse umum maupun serse dibidang Narkoba, Tipiter dan URC sebanyak 37, sedang jumlah serse yang mempunyai pendidikan kejuruan serse/dasar hanya sejumlah 12 orang. Di samping itu kemampuan Baur Ident untuk memeriksa kasus Narkoba dan pemeriksaan sidik jari dari segi peralatan dan kemampuan aparat juga masih minim.

Berhubungan dengan uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan salah satu ciri/unsur dasar organisasai birokrasi sebagaimana telah dikemukakan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, yakni faktor spesialisasi, maka untuk personil penyidik yang merupakan bagian dari organisasi kepolisian yang mempunyai keahlian khusus belum terpenuhi atau memadai. Hal ini sesuai dengan pendapat

---

<sup>23</sup> Informasi dari kaurbionps di Polres Sleman pada tanggal 1 Maret 2000.

Awaludin Djamin, bahwa penyelidik dan penyidik Polri, disyaratkan untuk mendapatkan pendidikan kejuruan reserse, sesuai kepangkatannya dari “Verbalisan”, “interogator” sampai kepada kemahiran dalam berbagai bidang kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, narkoba, *corporate crime*, *computer crime* dan sebagainya, serta ahli-ahli dibidang identifikasi dan laboratorium forensik.<sup>24</sup>

Dari jumlah personil Reserse Polres Sleman tersebut di atas, secara rinci dapat dilihat jenjang kepangkatan yang ada, pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jenjang Kepangkatan Personil Penyidik Polres Sleman

No.	Pangkat	Jumlah
1	Letu (Inspektur Polisi I)	1 orang
2	Leda (Inspektur Polisi II)	1 orang
3	Pelda (Ajun Inspektur Polisi)	3 orang
4	Serma (Brigadir Polisi Kepala)	9 orang
5	Serka (Brigadir Polisi)	5 orang
6	Sertu (Brigadir Polisi I)	24 orang
7	Serda (Brigadir Polisi II)	5 orang
Jumlah		: 48 orang

Sumber: Polres Sleman yang telah diolah peneliti.

Dari jenjang kepangkatan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kekuatan personil polisi reserse Polres Sleman berada pada jenjang Bintara (Brigadir) sejumlah 43 orang, terdiri dari Sertu (Brigadir Polisi I) sebanyak 24 orang, Serma (Brigadir Polisi Kepala) 9 orang, Serda (Brigadir Polisi II) dan Serka

<sup>24</sup> Awaludin Djamin, *Menuju Polri Mandiri Yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, Cetakan Kedua, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 185-186.

(Brigadir Polisi ) masing-masing 5 orang. Kemudian Pelda ( Ajun Inspektur Polisi II), Letu (Inspektur Polisi I) dan Leda (Inspektur Polisi II) masing-masing 1 orang. Ini berarti bahwa polisi yang berada di lapangan dalam rangka pelaksanaan penyidikan (penyelidikan) di lihat dari kepangkatan masih relatif rendah belum memenuhi harapan.

Bertitik tolak dari data yang telah disajikan di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi SDM reserse di Polres Sleman masih sangat jauh dari ideal, di mana setiap reserse minimal sudah pernah memperoleh pendidikan dasar reserse. Bintara (Brigadir) yang bekerja sebagai reserse adalah polisi yang dibekali pendidikan dasar sebagai polisi mengenai pengetahuan-pengetahuan umum yang menjadi tugas polisi di Indonesia, sehingga pengetahuan tentang penyidikan juga sangat sedikit.

Selanjutnya mengenai rasio jumlah penduduk dan jumlah personil polisi di Polsek Depok. Kepadatan penduduk di wilayah Depok adalah 3002 jiwa/km<sup>2</sup>, sedang jumlah penduduk 106.730 dengan personil polisi 81. Dengan demikian ratio penduduk dengan jumlah Polisi adalah 1 : 2005 yang masih jauh dari rata-rata polisi yang ideal. Dari 81 personil tersebut diantaranya 20 personil sebagai reserse yang terdiri dari Bamin sejumlah 2 orang, Unit I 4 orang, Unit II 3 orang, Unit III 3 orang, Unit Operasional 7 orang dan Kaunit Serse 1 orang. Semua reserse tersebut belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan penyidikan, sehingga dalam menjalankan tugas hanya berdasarkan pengalaman semata, yang mencontoh pada seniornya.

Dilihat dari segi jenjang kepangkatan dari 20 personil yang berpangkat Kopka (Ajun Brigadir Polisi) 2 orang, Serma (Brigadir Polisi Kepala) 10 orang, Serka (Brigadir Polisi) 2 orang, Sertu (Brigadir Polisi I) 4 orang, Letu (Inspektur Polisi I) 1 orang dan Leda (Inspektur Polisi II) 1 orang.

Dari uraian tersebut dapat diidentifikasi bahwa sumber daya polisi selaku penyidik baik di tingkat Polres Sleman maupun Polsek Depok sebagian besar masih kurang pengetahuan baik di bidang manajemen maupun identifikasi. Di

samping itu dalam melakukan penyidikan terhadap semua jenis kejahatan belum dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian khusus yang berkaitan dengan jenis-jenis kejahatan yang terjadi. Meskipun dilihat dari struktur organisasi sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis kejahatan yang terjadi, tetapi untuk semua bidang masih ditangani oleh Serse Umum.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya penyidik tersebut ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam rangka kemandiriannya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai polisi selaku penyidik dapat mengatasi berkembangnya kejahatan baru maupun kejahatan konvensional. Demikian halnya dengan pendidikan keilmuan akan membantu dan menghadapkan polisi pada pikiran-pikiran yang lebih liberal, artinya tidak sempit dan otoriter. Dengan kecendekiawanan akan memperluas cakrawala penglihatan polisi sebagai penyidik, sehingga polisi dapat meramu sendiri pengetahuan yang mereka terima itu ke dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Pendidikan dasar serse yang diselenggarakan di Banyubiru-Ambarawa, Jawa Tengah, pada dasarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan di lapangan. Karena pendidikan yang berlangsung 3 bulan ini mengajarkan baik teori-teori penyidikan maupun praktiknya (mengambil sidik jari, melakukan pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan, membuat berkas acara dan sebagainya). Masalahnya adalah tidak semua polisi serse yang diterjunkan di lapangan mendapat pendidikan dasar ini. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan setiap tahun hanya dikirim 1 personil atau 2 personil, karena keterbatasan dana. Hal ini menyebabkan tidak semua reserse memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tersebut. Di samping itu bagi mereka yang mengikuti pendidikan kejuruan setelah selesai belum tentu kemabli di bidang kesersean tetapi ditempatkan di bidang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kaurbin Ops di Polres Sleman pada tanggal 1 Maret 2000.

b. Sarana dan Prasarana sebagai pendukung polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan

Pada umumnya setiap organisasi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi tersebut. Demikian halnya dengan penyelidikan pada dasarnya memerlukan berbagai sarana dan prasarana, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih, yang kesemuanya itu sangat diperlukan untuk kelancaran penyelidikan. Kebutuhan kertas dan pita ketik merupakan kebutuhan dasar yang sangat sederhana dan harganya masih relatif murah, bila dibandingkan dengan peralatan yang lain. Namun dalam kenyataannya, pengadaan kertas, karbon dan pita mesin ketik ini praktis disediakan sendiri oleh masing-masing penyidik.<sup>26</sup> Untuk itu sudah menjadi pembicaraan umum bahwa apabila berurusan dengan polisi, harus menyediakan sendiri "uang, kertas, karbon, pita ketik" dan sebagainya, bila ingin cepat selesai urusannya dengan polisi.

Berhubungan dengan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung penyelidikan data yang diperoleh dari Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok adalah sebagai berikut:



Data susunan perlengkapan Serse Polda DIY yang tersedia dapat dilihat berikut di bawah ini.

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	Senjata Api	
	a. Genggam	70
	b. Pینگgang	-
	c. Bahu	1
2.	Kendaraan Bermotor	
	a. Jeep	6
	b. Bus Pool	-
	1) Kecil	6
	2) Sedang	-
	3) Besar	-
	c. Truk pool:	
	1) Sedang	-
	2) Besar	-
	d. Sepeda Motor	6
	e. Ransus	5
3.	Mesin Kantor	
	a. Ketik	30
	b. Sln Hit AC/DC	1
	c. Sln SII Tr	1
	d. Sln Copy	1
	e. PC	-
4.	Telepon	7
5.	Alphon	7
6.	HT	27

Sumber: Polda DIY.

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa peralatan yang mendukung

untuk penyidikan masih belum memadai dan sangat sederhana untuk ukuran Polda, misalnya masih digunakan mesin ketik belum memiliki komputer. Demikian sepeda motor yang merupakan sarana vital guna melakukan penyidikan masih minim untuk ukuran Polda di mana kejahatan yang terjadi semakin berkembang.

Data yang diperoleh dari Polres Sleman tentang alat/materiil/logistik khusus Serse yang tersedia dapat dilihat berikut ini:

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah
<hr/>		
1.	Jenis Kendaraan	
	a. Roda 2	-
	b. Roda 4	1
2.	Jenis Senjata Api	
	a. Revolver	21
	b. Peluru	252
	c. Senpi BH	-
3.	Jenis Barang	
	a. HT	10
	b. Camera	4
	c. Telepon	1
	d. Mesin ketik	7
	e. Borgol	-
	f. Ruang Periksa	5
	g. TV Monitor	-
	k. Rompi Anti Peluru	5
	l. Komputer	9

Sumber: Polres Sleman, 31 Oktober 2000.

Berdasarkan data materiil/logistik Satserse Polres Sleman tersebut di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di Polres Sleman tersebut untuk mendukung tugas penyidikan atau serse dapat dikemukakan masih minim. Untuk

mendukung tugas rutin saja, seperti senjata api tidak mencukupi dan apalagi borgol tidak dimiliki. Di samping itu kendaraan bermotor yang merupakan sarana paling vital untuk menjalankan tugas penyidikan juga tidak memadai, demikian halnya dengan alat komunikasi yang dimiliki sangat minim. Sementara disisi lain perkembangan kejahatan semakin meningkat dan pelaku kejahatan semakin canggih dalam melakukan kejahatannya. Hal ini sesuai uraian sebelumnya yang dikemukakan oleh Anton Tabah, bahwa melemahnya operasionalisasi polisi antara lain sarana dan prasarana kepolisian yang minim dari berbagai peralatan vital sampai peralatan pendukung yang masih didapatkan pada kekurangan yang serius. Sedangkan tipologi kejahatan saat ini sudah berteknologi canggih dan bermobilitas tinggi. Pencurian kini bukan saja menggunakan mobil tetapi juga menggunakan pesawat terbang.

Berhubungan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa pemisahan Polri dari ABRI tidak akan berarti banyak tanpa diikuti sejumlah langkah yang memungkinkan pemisahan menghasilkan kualitas baru seperti yang diharapkan. Salah satu langkah yang harus diperhatikan adalah tambahnya soal peralatan, karena selama ini polisi termasuk bagian yang sangat menderit dibanding angkatan-angkatan lain. Jika setelah dipisah, peralatan kerja polisi masih minim, maka pemisahan tidak akan cukup menghasilkan kontribusi yang optimal.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, Dipisah dari ABRI, Mengapa Di Dephankam ? "Ini Adalah Perceraian Setengah Hati", Dalam Kunarto, *Polisi Mandiri*, Seri: Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku ke 4, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 82.

Di samping jenis-jenis perlengkapan sebagaimana disebutkan di atas juga terdapat kartu-inventaris Alsus/Alut/Mebelair Identifikasi pada Kesatuan Polres Sleman dapat dilihat berikut ini:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
<hr/>			
1. Alat Fotografi			
a.	Kamera Mamiya	1	Rusak Ringan
b.	Kamera Yashica 5100324	1	Rusak Ringan
c.	Kamera Nikon FM 102164584	1	Barang Baru
d.	Lampu Blitz Mamiya	1	Rusak Berat
2. Alat Daktiloskopi			
a.	Finger Print Box	1	Rusak Berat
b.	Rubber Roller	1	Rusak Berat
c.	Finger Print Glass	2	Rusak Ringan
d.	Lensa Genggam	2	Rusak Ringan
e.	Filling Kabinet	4	Rusak Berat
f.	Olah TKP Kit (Kopor) umum	5	3 kopor habis pakai
g.	Olah TKP Kit (Tas Gendong)	1	Baik

Sumber: Polres Sleman

III, Unit Narkoba dan Unit Tipiter masing-masing 1 ruang introgasi. Dilihat dari luas ruangan dan suasana ruangan kurang memenuhi unsur kesehatan sehingga akan mengganggu tugas polisi dalam mengintrogasi.

Data Materii/Logistik/perlengkapan yang tersedia di serse Polsek Depok dapat dilihat berikut ini:

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah
<hr/>		
1.	Jenis Kendaraan	
	a. Roda 2	-
	b. Roda 4	-
2.	Jenis Senjata Api	
	a. Revolver	8
	b. Peluru	98
3.	Jenis Barang	
	a. HT	1
	b. Camera	-
	c. Telepon	1
	d. Mesin ketik	3
	e. Meja	7
	d. Kursi	10
	f. Almari	-
	g. Borgol	-
	h. Ruang periksa	1
	i. TV Monitor	-
	j. Rompi Anti Peluru	-

Sumber: Polsek Depok

Salah satu agenda reformasi di bidang hukum yang terkait dengan Institusi/Lembaga Polri, yakni telah dilaksanakannya pemisahan secara tegas mengenai fungsi dan wewenang Polri selaku aparat penegak hukum dari Institusi

MPR untuk melaksanakan semua agenda reformasi yang dituntut oleh masyarakat. Nasional Sebagai Haluan Negara, yang mengintruksikan kepada Presiden Mandataris Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/1998 Tentang Pokok-pokok Tekad dan aspirasi masyarakat tersebut telah diakomodasikan dalam

hukum dalam naungan pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa. pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan menjunjung tinggi supremasi yang otoriter lebih dari 30 tahun, telah melahirkan reformasi yang menuntut menginginkan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru Sesuai dengan perkembangan tuntutan dan aspirasi masyarakat peradilan pidana.

**3. Kemandirian bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada**

kejahatan. Beritik tolak dari data materiil/logistik di Polsek Depok tersebut terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas penyidikan masih sangat memprihatinkan atau sangat kurang memadai. Hal ini dapat dilihat sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas rutin seperti senjata api, rompi dan borgol tidak dimiliki. Demikian juga kendaraan bermotor yang sangat vital untuk melaksanakan tugas penyidikan tidak dimiliki. Apalagi alat komunikasi hanya memiliki 1 (satu) HT. Di sisi lain perkembangan kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Depok semakin meningkat dan pelaku kejahatan semakin canggih dalam melakukan kejahatan.

ABRI, dengan tujuan agar dicapai proporsionalitas, profesionalitas dan integritas yang utuh pada masing-masing penyelenggara fungsi sesuai kewenangannya.<sup>28</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat negara penegak hukum, melalui Instruksi Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berlaku pada tanggal 1 April 1999, di mana Polri dipisahkan kedudukan organisasinya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan operasionalnya pada Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia sedangkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diganti dengan istilah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>29</sup>

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 yang dicantumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 102, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan kedudukannya berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus 2000 ditegaskan lagi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beritik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2000 secara yuridis formal dari segi kelembagaan Polri sudah mandiri dalam arti terpisah dari TNI.

---

<sup>28</sup> Alwil Luthan, *Pemisahan TNI-Polri Problematika dan Prospek*, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya: "Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum, yang diselenggarakan FH UGM Yogyakarta, 22-23 Nopember 2000.  
<sup>29</sup> Lihat Bagian Kedua dan Keempat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999

Walaupun secara kelembagaan Polri sudah mandiri yakni terpisah dari TNI, namun secara substansial dan operasional masih terdapat kendala untuk terwujudnya kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum tersebut. Kendala yang merintangi belum terwujudnya kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum tersebut terakumulasi dalam penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana baik di tingkat Polda DIY, Polres Sleman maupun di Polsek Depok. Kendala yang merintangi bekerjanya lembaga kepolisian dalam proses penyidikan pada peradilan pidana tersebut baik bersifat intern maupun ekstern.

Kendala yang bersifat intern yang dimaksud berasal dari dalam lembaga kepolisian itu sendiri dalam hal ini perilaku<sup>30</sup> polisi selaku reserse (penyidik) dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Sedang kendala yang bersifat ekstern yang merintangi kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana berasal dari luar perilaku polisi selaku penyidik.

---

<sup>30</sup> Perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan (Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 180). Bandingkan dengan David Ovears, Jonathan L. Freedman dan L. Anne Deplan, berpandangan bahwa komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek (David Ovears, Jonathan L. Freedman dan L. Anne, *Psikologi Sosial*, Terj. oleh Michael Adyanto dan Savitri Sukrisno, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 138). Sedangkan Kunarto mengemukakan, bahwa perilaku adalah tingkah laku manusia dalam suatu objek tertentu (Kunarto, *Perilaku Organisasi POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 34).



Semarang, 8 Juli 1999, hlm. 16.

Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDP, Sajipto Rahardjo, *Polisi Berwatak Sipil*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Membangun belaka, tetapi kesediaan untuk mendengar dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Lihat dengan menerapkan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan

<sup>32</sup> Menjadi Polisi Sipil juga dapat dikatakan sebagai polisi yang menjalankan tugasnya tidak Semarang, 1999, hlm. 5.

polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH UNDP, *Hambatan dan Kesulitan Menuju Polisi Berpostur Sipil*, Makalah Seminar Nasional: Membangun pendekatan kekuasaan, sering menggunakan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia. (Nurfaizi, Nurfaizi, berpandangan bahwa pola militer adalah cenderung represif militeris dengan menggunakan Indonesia Sekolah Staf Dan Pimpinan, Lemban, 29 S/D 31 Juli 1998, hlm. 3). Bandingkan dengan *Globalisasi*, Makalah Seminar Kepolisian Negara RI, Markas Besar Kepolisian Negara Republik (Sajipto Rahardjo, *Tinjauan Sosiologis Reorientasi Kepolisian Negara RI Dalam Mengantisipasi Era* pendekatan kekuasaan mencakup penggunaan kekuatan, kekerasan dan menggunakan sistem komando.

<sup>31</sup> Menurut Sajipto Rahardjo yang dimaksud pola militer adalah cara kerja dengan

Melihat fakta tentang perkembangan lembaga kepolisian yang memang selalu terkait dengan pergolakan revolusioner pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 secara sistematis dimaknai sebagai nilai-nilai kejuangan dengan semangat kepahlawanan yang tinggi. Pemaknaan semangat kepahlawanan ini dirumuskan

sebagai berikut:

belum memperhatikan kultur sipil atau polisi sipil<sup>32</sup> yang dapat digambarkan penegakan hukum pada peradipan pidana meskipun sudah terlepas dari militer (TNI) kepolisian dalam hal ini polisi selaku penyidik dalam menyelenggarakan fungsi militeristik, bias kekerasan dan elitis. Dengan perkataan lain bekerjanya lembaga kepolisian belum bisa terbebas dari berbagai pengaruh konteks sosial politik yang ketat. Tentu saja polisi selaku reserse yang merupakan bagian dari lembaga proses penyidikan masih memperhatikan pola militer<sup>31</sup> dengan garis komando yang Kendala yang bersifat intern ini berupa perilaku polisi selaku reserse dalam penegakan hukum dan kadilan pada peradipan pidana.

kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka

a. Kendala yang bersifat intern terhadap kemandirian bekerjanya lembaga

berikut ini.

Untuk memperjelas kedua kendala tersebut akan digambarkan pada uraian

- <sup>33</sup> M. Karyadi, *Polisi (Filisafat dan perkembangan hukumnya)*, Politeia, Bogor, 1978, hlm. 69. Bandingkan dengan Satipito Rahardjo, dalam *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun, hlm. 96. Bandingkan juga dengan Harsja W. Bahtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, PTHK-Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 37.
- <sup>34</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 102.

dalam konsep prajurit bhayangkara atau polisi pejuang. Konsep yang melekat pada jati diri polisi tersebut sebagai prajurit bhayangkara tersebut tertanam secara konsisten dalam berbagai lembaga pendidikan di Polri, baik pendidikan pembentukan maupun pendidikan pengembangan. Dalam tataran konseptual hal tersebut tidak mengandung permasalahan yang berarti. Pada tataran praktik di lapangan, para polisi selaku resece memaknai semangat prajurit bhayangkara ini dalam semangat yang militeristik. Kata Bhayangkara yang selalu menyertai polisi berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti menakutkan<sup>33</sup>. Sedangkan bayangkara dalam bahasa Indonesia berarti pasukan pengawal.<sup>34</sup> Sifat yang militeristik ini berlanjut termanifestasi pada sikap pelayanan dalam penegakan hukum khususnya dalam penyelenggaraan fungsi penyidikan pada peradilan pidana yang dilakukan secara kaku prosedural, tidak akomodatif dan tidak transparan serta memperhatikan sistem komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis. Pada hal dalam pelaksanaan tugas Polri, berbeda dengan militer, memerlukan kemampuan, kepercayaan diri serta mampu untuk berinovasi dan kreatif dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Dengan demikian, penanaman jati diri militeristik yang selama ini bersifat kontradiktif dengan fungsi kepolisian yang sepenuhnya bersifat sipil atau polisi sipil.

Berkaitan dengan gambaran tersebut di atas, berikut ini akan diuraikan gambaran dari perilaku polisi selaku penyidik dalam peradilan pidana yang masih bersifat militeristik dan belum memperlihatkan kinerja yang profesional.

Sebagaimana telah dikemukakan proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dari aparat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang

bukti, yang mana dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengendalian hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada tahap pendahuluan apabila dilihat dalam konteks sistem peradilan pidana akan tampak hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, yang dalam bidang penyidikan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek.
- b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tugas tersebut tidak berarti mengkotak-kotakan tugas, wewenang dan tanggung jawab tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- d. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.

f. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai memberikan kewajiban perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasihat hukum.

g. Pembatasan wewenang dan pengetahuan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.<sup>35</sup>

Dalam konteks ini, Kepolisian Daerah DIY (Polda DIY), Kepolisian Resort Sleman (Polres Sleman) dan Kepolisian Sektor Depok (Polsek Depok) sebagai pos terdepan dalam sistem peradilan pidana (*gatekeepers*) sehari-harinya berhubungan langsung dengan kejahatan dan sekaligus dengan masyarakat. Berhubungan dengan tugas polisi sebagai penyidik, Kepolisian Daerah dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum secara hirarkhis bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah, sedang untuk Kepolisian Resort bertanggung jawab kepada Kepolisian Sektor, kemudian untuk Kepolisian Sektor bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Sektor.

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, polisi merupakan ujung tombak dalam menanggulangi kejahatan yang akan diproses melalui sistem peradilan pidana. Mengingat posisinya sebagai *gatekeepers*, polisi bertugas menyelidik dan menyidik terhadap perkara yang masuk kepadanya.

Dilihat dari struktur organisasi, maka tugas dan wewenang tersebut diberikan kepada direktorat serse untuk tingkat Polda dengan koordinasi kepala direktorat serse, untuk tingkat Polres diberikan kepada satuan serse dengan koordinasi kepala satuan serse, sedang untuk Polsek diberikan kepada satuan unit dengan koordinasi kepala unit serse, yang merupakan bagian dari suatu organisasi kepolisian baik di

<sup>35</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Abdul Hakim G. Nasution, Luhut MP Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *KUHAP dan Peraturan-Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 226-228.

Untuk tingkat Polda DIY, laporan masyarakat kepada yang piket (bertugas) yakni dicatat oleh Sedit Serse untuk disampaikan kepada Kadit Serse, didisposisikan kepada penyidik sesuai dengan tugas-masing-masing (Bagian). Adapun Bagian yang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang masuk, pembagiannya berdasarkan struktur yang sudah ada dan personalianya ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Adapun struktur yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

- a. Laporan masyarakat.
- b. Pengaduan.
- c. Tertangkap tangan.
- d. Diketahui langsung oleh petugas polri.

catatan polisi adalah dari:

1. Tata Urutan Pelaksanaan Tugas Penyidikan

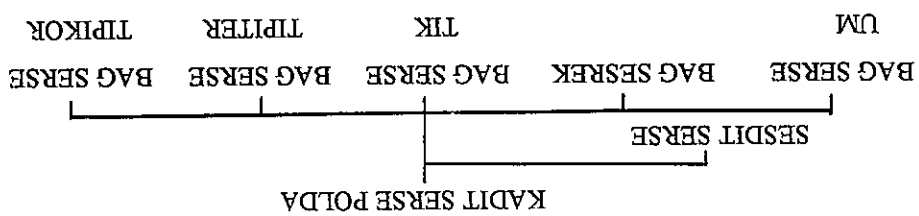
Untuk mengetahui tata urutan pelaksanaan tugas penyidikan dalam menangani suatu perkara, kiranya perlu diketahui bagaimana suatu perkara itu sampai ke polisi. Sebagaimana telah diketahui jumlah perkara yang masuk dalam

Umm.

1. Tata Urutan Pelaksanaan Tugas Penyidikan.
2. Jumlah Perkara di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok.
3. Perilaku Polisi pada Proses Pemeriksaan.
4. Perilaku Polisi pada Proses Pengajuan Berkas Perkara ke Penuntut

Polda, Polres maupun Polsek. Untuk itu agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai perilaku polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan ini akan dikelompokkan dalam beberapa bagian pembahasan, yaitu:

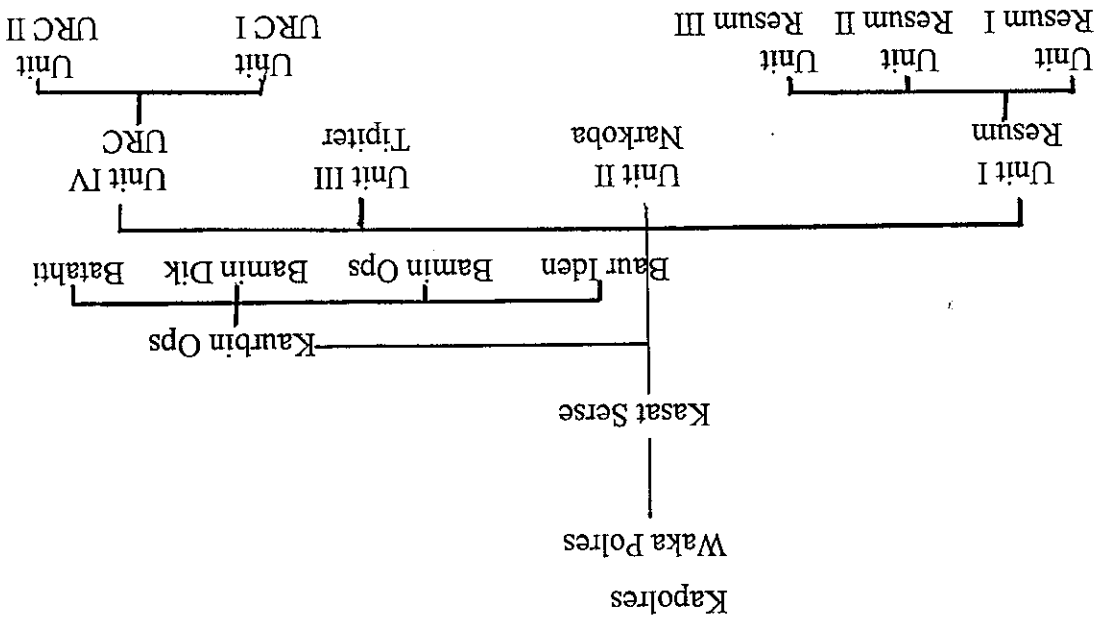
Struktur Organisasi Personil Ditserse Polda DIY



Gambar 2: Struktur Organisasi Ditserse Polda DIY

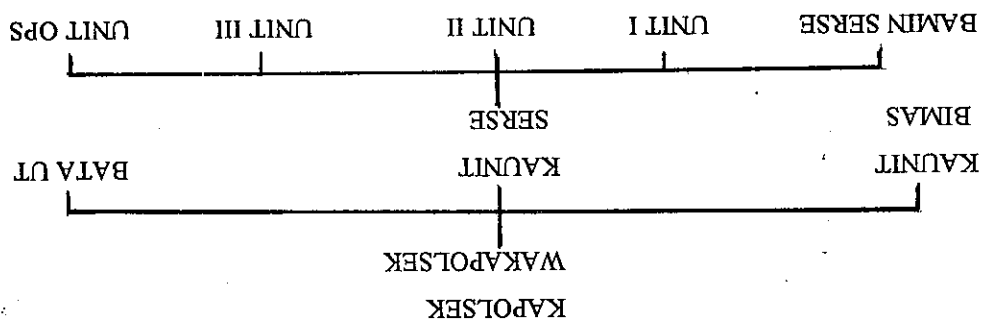
Untuk tingkat Polres, laporan masyarakat disampaikan kepada yang piket (petugas) pada Baurin Ops dicatat untuk disampaikan kepada Kasat Serse, didisposisikan kepada penyidik sesuai dengan tugas dari masing-masing unit. Secara riil kepada penyidik pembantu jika kasus yang dihadapi terang, tetapi jika kasus gelap dilakukan penyelidikan. Adapun unit yang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang masuk, pembagiannya berdasarkan dengan struktur yang ada dan personalianya disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Adapun struktur yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

Struktur Organisasi Satserse Polres Sleman



Gambar 3: Struktur Organisasi Satserse Polres Sleman.

Gambar 4: Struktur Organisasi Serse Polsek Depok.



Struktur Organisasi Serse Polsek Depok

Untuk tingkat Polsek, laporan masyarakat disampaikan kepada petugas piket (BATA UT) untuk dicatat dan disampaikan kepada Kapolsek. Dari Kapolsek didisposisikan kepada Kaunit. Oleh Kaunit didisposisikan kepada Unit yang sesuai dengan masing-masing tugas Unit. Unit-Unit tersebut yang bertanggung jawab sesuai dengan pembagian yang berdasar pada struktur yang ada dan personalianya disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Adapun Struktur Organisasi Serse Plosek Depok yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.

atau polisi mengetahui sendiri) yang terjadi, dalam harian/mingguan atau bulanan lengkap dengan pasal yang didakwakan, nama pelapor, jam kejadian, tempat kejadian sampai ke aparat pemeriksaanya.

Jika dilihat dari struktur organisasi serse di atas pada dasarnya polisi selaku reserse mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Hal ini terkait dengan fungsional bekerjanya polisi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan bekerjanya anggota-anggota BAGIAN (Polda), Unit (Polres dan Polsek) yang masing-masing unit khususnya apabila dilihat dari sudut pengetahuan kahliaannya sangat terbatas.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas jumlah reserse di Polres Sleman dari 48 anggota serse hanya 12 personil yang memiliki pendidikan kejuruan penyidik (umum/dasar) dengan mengikuti pendidikan selama 3 bulan di Mega Mendung, hanya 1 personil memiliki pendidikan identifikasi, sedang yang memiliki keahlian di bidang sidik jari 3 personil, sisanya 32 personil adalah sebagai pembantu penyidik yang dalam pelaksanaan tugasnya hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman bertugas di lapangan semata atau mencontoh yang lebih senior. Apalagi di tingkat Polsek, dari 20 personil semua belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan penyidikan, sehingga dalam menjalankan penyidikan hanya berdasar pada pengalaman semata yang hanya menurut seniorinya.

Dari uraian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa dari kondisi internal ini saja tidak mudah polisi bekerja profesional dan objektif dalam arti tidak diskriminatif terhadap kasus-kasus yang terjadi umumnya, apalagi menghadapi situasi global dengan type kejahatan yang mempunyai kecenderungan dan efek negatif dalam kehidupan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan peradilan sendiri. Hal ini sesuai yang dikemukakan Muladi, bahwa kejahatan-kejahatan yang perlu di waspadai, antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1997, hlm 107-109.



1) Kejahatan terorisme;

2) Kejahatan ekonomi;

3) Kejahatan komputer;

4) Bentuk kejahatan dengan kekerasan yang terorganisir secara rapih, misalnya perdagangan senjata tajam dan obat bius, *money laundering*, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, perampasan, dan pemerasan;

5) Kejahatan yang berkaitan dengan praktik perdagangan curang (*unfair trade practices*);

6) Kejahatan korporasi (*corporate crimes*);

7) Kejahatan terhadap hak milik intelektual (paten, merk dan hak cipta).

Dari type kejahatan sebagaimana diuraikan di atas akan disertai intensitas yang mengarah kepada kualitas modus operandi maupun waktu dan sarana.

Sebagaimana diakui oleh Ahwil Lutan, permasalahan setelah Polri pisah dari TNI, apakah secara otomatis Polri langsung mampu mencapai, proporsionalitas, profesionalisme dan integritas yang utuh sesuai dengan tekad dan harapan yang diinginkan masyarakat dalam agenda perjuangan reformasi yang dilaksanakan.<sup>37</sup>

Bertitik tolak dari pendapat tersebut secara umum dapat digambarkan masih lemahnya kemampuan polisi selaku penyidik dalam melaksanakan tugas selaku penegak hukum. Sehingga dalam konteks penyidikan dalam lingkungan Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok memungkinkan sekali dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang tugas penyidikan terutama dalam menggunakan upaya paksa menyimpang secara prosedural sebagaimana ditentukan dalam Acara Pidana dan sering terjadi kepentingan korban atau pelapor diabaikan. Berkaitan dengan lambanya kerja polisi di dalam menanggulangi kejahatan sering dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Lebih dari itu masyarakat (korban) juga mengeluhkan tindakan polisi yang "menta pengertian korban" untuk operasional tugas penyelidikan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, aparat kepolisian

---

<sup>37</sup> Ahwil Lutan, *Loc. Cit.*

seolah-olah tidak tahu tentang hubungan antara korban dan pelaku, kemanusiaan, fungsi pemerintahan (birokrasi) dan sifat dari korban.<sup>38</sup>

Lambatnya kerja polisi tersebut dapat terlihat dalam kasus pemalsuan surat, dimana yang menjadi korban/pelapor adalah seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Kasus yang dilaporkan hampir 8 bulan yakni sejak 3 Maret 2000 sampai dengan 11 Nopember 2000 (peneliti melakukan penelitian) tidak ada penjelasan dari pihak kepolisian sampai sejauh mana laporannya ditindaklanjuti, sehingga berakibat Kapolda DIY di gugat praperadilan. Berlarut-larutnya penanganan laporan masyarakat (korban kejahatan) oleh aparat polisi terkait dengan kontribusi yang diberikan landasan normatif yang menata bekerjanya sistem, yakni ketentuan Pasal 106 KUHHP menentukan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, "wajib" segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Akan tetapi di dalam KUHAP maupun Juklak/Juknis tidak ada ketentuan yang menetapkan apa akibatnya jika penyidik tidak merespon atau menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang diterimanya, sehingga penanganan terhadap laporan atau pengaduan tersebut lambat dan berlarut-larut atau diabaikan yang berakibat merugikan korban dan bertentangan dengan asas penegakan hukum yang cepat.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikemukakan pendapat Singgih yang pernah menjadi Jaksa Agung mengemukakan, bahwa lama proses penyidikan dan penyidikan oleh aparat penyidik kepolisian dan kejaksaan sudah saatnya diatur secara lebih pasti. Penetapan jangka waktu ini penting mengingat ketidakpastian proses pemeriksaan dalam kedua tahapan ini sangat dirasakan sebagai suatu siksaan

---

<sup>38</sup> Ujasan mengenai korban, lihat Richard Quinney, *Who is the Victim*, dalam Israel Drapkin dan Emilio Viano, eds. *Victimologi* (Lexington: D.C. Heath and Co, 1975), hlm. 103-108. Akibat dari tindakan polisi dalam menghadapi korban, keluhan klasik masyarakat yang sering terlintar karena tidak sembarangnya antara kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk laporan dan penyidikan kejahatan, adalah seperti melaporkan kehilangan kambing sebaliknya malah kehilangan sapi.

<sup>39</sup> Kompas, 9 Agustus 1999, hlm. 8.  
<sup>40</sup> Kasus terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, Gugatan Praperadilan tanggal 13 Nopember 2000 dengan Nomor Register 01/Pra.P/PN. Slm, Pemohon Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Ny. Solidarmi, SH, sedang sebagai termohon adalah Kapolda DIY.

psikologis dan bisa melanggar hak asasi manusia bagi orang yang sedang menjalani proses terkait.<sup>39</sup> Hal ini berakibat penyidik di dalam penanganan perkara banyak yang diabaikan (baik karena tidak terdeteksi/terlacak), umumnya diselesaikan dengan batas maksimal (selambat-lambatnya) penggunaan masa penahanan dan perpanjangannya baik di tingkat penyidik, penuntut umum maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan senantiasa menggunakan wewenang yang diberikan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1) dan (2), serta Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam realita jarang terjadi penyelesaian perkara oleh penyidik lebih cepat dari waktu yang disediakan oleh KUHAP tersebut. Jika terhadap perkara yang menurut masyarakat dapat dilacak, tetapi oleh aparat penyidik diabaikan, kemudian korban mengajukan praperadilan karena aparat penyidik dianggap membuat ilku-ilku dan mengabaikan ketentuan penyidikan. Hal ini terjadi di Polda DIY dalam kasus pemalsuan surat sebagaimana telah dikemukakan di atas (kasus dilaporkan 3 Maret 2000 dan hingga 11 Nopember (penelitian dilaksanakan oleh peneliti)), aparat penyidik belum mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pemohon mengajukan praperadilan agar termohon melanjutkan penyidikan. Berkaitan dengan hal tersebut buru-buru aparat penyidik membuka kembali berkas perkara tersebut, dengan alasan tidak dihentikan dengan tidak menerbitkan SPDP, bahkan termohon sudah mengirimkan bahan-bahan yang diselidiknya ke Labfor Polda Jateng di Semarang. Terhadap gugatan praperadilan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sleman memperkuat alasan penyidik, bahwa penyidikan perkara dimaksud tidak dihentikan akhirnya pada tanggal 25 Nopember 2000 Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tak dapat menerima gugatan praperadilan.<sup>40</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa bekerjanya reserse yang merupakan bagian dari lembaga kepolisian dalam

melakukan penyidikan masih terlihat lambat dalam menindak lanjuti laporan yang diterima baik dari korban maupun dari masyarakat tentang terjadinya suatu kejahatan. Akibat kelambanan reserse dalam melakukan penyidikan masih terjadi reserse yang merupakan bagian dari lembaga kepolisianan digugat praperadilan.

## 2. Jumlah Perkara di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok

Untuk melihat jumlah perkara yang masuk di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok, baik secara harian/mingguan/bulanan atau tahunan, jumlahnya dapat terlihat dari laporan yang masuk baik melalui pengaduan, tertangkap tangan atau kejadian-kejadian yang diketahui langsung oleh polisi. Untuk melihat jumlah perkara yang masuk, dapat dilihat dari jenis perkara yang banyak, jumlah perkara yang dapat diselesaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang ada di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok sebagai berikut:

Data kejahatan di Polda DIY Tahun 2000 (3 Bulan Terakhir, yakni Januari, Februari dan Maret)

### a. Jumlah Kejahatan (*Crime Total*).

1. Jumlah yang dilaporkan	: 496 perkara.
2. Penyelesaian	
Kasus Bulan Lalu	: 9 perkara
Kasus murni	: 255 perkara
Jumlah Selesai	: 266 perkara

### b. Indeks Kejahatan (*Crime Index*).

1. Jumlah yang dilaporkan	: 40 perkara
2. Penyelesaian	
Kasus Bulan Lalu	: 3 perkara
Kasus murni	: 16 perkara
Jumlah Selesai	: 19 perkara

Perlu diketahui yang dimaksud dengan "Indeks Kejahatan" (*Crime Index*) adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur bagi kepolisian untuk mengetahui naik turunnya kejahatan.<sup>41</sup> Berhubungan dengan hal tersebut, dalam Statistik Kriminal angka penyelesaian pidana (jumlah pelaku yang dicurigai, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan yang tercatat) sebenarnya hanya bermakna sebagai alat bantu untuk mengukur situasi keamanan dan keberhasilan tindakan sistem peradilan pidana. Artinya angka-angka kejahatan yang sebenarnya tidak pernah dapat diketahui, karena banyak kejadian yang tidak dilaporkan yang disebut *hidden criminality* atau *dark number*.<sup>42</sup>

Berdasarkan Juklak Kapolda Jawa Tengah No. Pol: Juklak/14/IX/1986 tentang Penurunan *Crime Total* dan Peningkatan *Crime Clearance*, yang termasuk

Indeks Kejahatan (*Crime Index*) adalah:

1. a. Pembakaran
- b. Kebakaran
2. Kejahatan Upal (Uang Palsu)
3. Pembunuhan
4. Penganiayaan Berat
5. Curat (pencurian dengan pemberatan)
6. Curas (pencurian dengan kekerasan)
7. Curamur (pencurian kendaraan bermotor)
8. Penyalahgunaan Narkotika.

Mengingat sejarah terbentuknya Polda DIY, sebelum berdiri sendiri merupakan bagian dari Polda Jawa Tengah sehingga Juklak tersebut di atas sampai

<sup>41</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, FH UNDP, Semarang, 1995, hlm. 28

<sup>42</sup> Kurnarto, *Trend Kejahatan Dan Peradilan Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm. 19. Lihat juga Kurnarto, *HAM dan Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 132. Bandingkan dengan I.S. Susanto yang berpandangan bahwa dalam statistik kriminal, angka-angka kriminal yang tercatat hanya merupakan sampel dari seluruh kriminalitas yang terjadi. Sedangkan jumlah kriminalitas yang pernah diketahui. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui ini dinamakan "angka gelap" (*dark numbers* atau *dark figures*). Oleh karena itu salah satu ciri (kelemahan) statistik kriminal adalah tidak lengkap. (*Op.Cit*, hlm. 27).



Jika dilihat dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa baik dari segi kuantitas maupun kualitas kejahatan yang dapat diselesaikan oleh penyidik masih dalam kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 496 baru bisa diselesaikan sebanyak 274. Dilihat dari kejahatan yang termasuk Indeks Kejahatan dilaporkan sebanyak 350, baru dapat diselesaikan 142, sedang kejahatan lainnya (di luar Indeks Kejahatan) dilaporkan 141 selesai 123 perkara. Lebih-lebih dalam penyelesaian kasus Curamnor dari kuantitas penyelesaian sangat rendah, karena dari laporan sebanyak 201 baru dapat diselesaikan sebanyak 19 kasus dan dari segi kualitas baru terungkap pencuriannya, sedang penadahnya belum banyak yang terungkap. Meskipun dapat diakui bahwa penyelesaian perkara Narkotika meningkat tetapi baru memakai atau pengguna saja sedang untuk pengedar atau bandar belum banyak yang terungkap. Hal ini relevan dengan pendapat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan, bahwa sampai saat ini dari berkas-berkas perkara narkoba, tersangkanya dinyatakan pengedar belum pernah ada.<sup>43</sup>

Selanjutnya mengenai jumlah tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Sleman, selama 11 bulan terakhir dari bulan Januari hingga Nopember dapat dilihat dalam Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini.

---

<sup>43</sup> Kedaualatan Rakyat, tanggal 2 Februari 2000, hlm. 2.

Tabel 4. Data Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Sleman Selama Tahun 1999/2000 Per Tindak Pidana Dari Bulan Januari S/D Bulan Nopember 2000

No.	Jenis Tindak Pidana	Lapor	Selesai
1	Kebakaran	12	12
2	Uang Palsu	1	3
3	Pembunuhan	3	25
4	Penganiayaan	9	48
5	Curat	70	13
6	Curas	36	16
7	Curammor	189	41
8	Narkoba/Psikotropika	39	46
9	Pencurian Biasa	18	2
10	Perbuatan Cabul	4	8
11	Perzinahan	4	6
12	Perkosaan	5	-
13	Melarikan Anak	1	11
14	Penggelapan	7	11
15	Penipuan	15	11
16	Penadahan	-	8
17	Pengrusakan	2	-
18	Pemerasan	-	2
19	Perjudian	8	5
20	Kejahatan Surat	1	2
21	Perbuatan Tak senang	-	1
22	Pemalsuan Merk	-	1
23	Sajam	7	7
24	Pengroyokan	-	1
25	Suap	-	1
26	Penculikan	1	-
Jumlah		432	270

Sumber: Polres Sleman yang telah diolah peneliti.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 25 jenis tindak pidana, yang paling menonjol adalah Curammor 189 dapat diselesaikan 16, Curat dari 70 perkara dapat diselesaikan 48 perkara, Narkoba/psikotropika dari 39 perkara selesai 41, sedang Curas 36 selesai 13 perkara dan 15 perkara penipuan dapat diselesaikan 11 perkara.



Perlu diketahui, bahwa penyelesaian kejahatan penadahan, pemerasan perbuatan tidak senang, pemalsuan merk dan pengroyokan serta suap tersebut merupakan penyelesaian dari laporan kejahatan sebelum bulan Januari 2000 yang belum terselesaikan. Di samping itu dari tabel tersebut secara keseluruhan dari segi kuantitas dalam penyelesaian perkara masih relatif rendah, terlihat dari jumlah laporan sebanyak 432 perkara baru dapat diselesaikan sebanyak 270 perkara sedang sisa perkara atau perkara yang masih mengambang belum terselesaikan sebanyak 163 perkara, demikian juga dari segi kualitas. Namun demikian diakui bahwa dalam menyelesaikan perkara Narkoba/psikotropika dari kuantitas meningkat tetapi dari kualitas masih rendah, karena yang bisa terselesaikan baru sekedar pengguna atau pemakai, sedang untuk mengungkap pengedar atau bandar belum dapat terwujud. Hal tersebut juga dikemukakan oleh seorang informan Jaksa, bahwa penyidikan terhadap pengedar narkoba khususnya di Sleman belum banyak yang terungkap.<sup>44</sup> Hal ini diperkuat informasi dari informan polisi yang mengemukakan bahwa di Yogyakarta bukannya tidak ada pelaku penyalahgunaan atau pengedar gelap psikotropika dalam jumlah besar yang dikenal dengan julukan bandar. Hanya saja pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengungkap jaringan dalam upaya membekuk bandarnya. Sedang pengedar gelap kelas teri yang tertangkap pada umumnya tidak dapat menunjukkan siapa pemasok utama psikotropika yang dijajaknya. Selanjutnya informan mengemukakan, modus operandi peredaran yang dilakukan oleh pengedar besar atau bandar itu sangat rapi. Ditambah dengan keterbatasan personil polisi penyidik dan keterbatasan dana, maka upaya pemberantasan tindak kejahatan psikotropika itu mengalami kendala.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Liza Alfitrianti mengemukakan bahwa dalam kenyataan kasus narkoba/psikotropika yang dilaporkan ke pengadilan hanya merupakan perkara kecil. Mereka yang menjadi terdakwa hanya membawa sejumlah

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan informan Jaksa dari Kejaksaan Sleman pada tanggal 31 Januari 2000 di Kejaksaan Sleman.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Kasubag Serse Polda DIY pada tanggal 24 April 2000.

kecil psikotropika. Sedangkan untuk perkara besar atau mereka yang didakwa membawa kecil psikotropika dalam jumlah besar belum ada.<sup>46</sup>

Selanjutnya data kejahatan di wilayah hukum Polres Sleman, selama 11 bulan terakhir dari bulan Januari S/D Nopember 2000 dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Data Kejahatan Di Wilayah Hukum Flores Sleman Tahun 1999/2000 Per Psiksek.

No.	Kesatuan	Lapor	Selesai
1	Resot Sleman	99	115
2	Polsek Depok	128	56
3	Polsek Mlati	24	17
4	Polsek Tempel	13	7
5	Polsek Sleman	20	8
6	Polsek Sayegan	10	6
7	Polsek Ngaglik	45	9
8	Polsek Turi	5	6
9	Polsek Pakem	9	7
10	Polsek Kalasan	11	7
11	Polsek Prambanan	17	8
12	Polsek Berbah	12	8
13	Polsek Ngemplak	7	1
14	Polsek Cangkringan	1	5
15	Polsek Godean	6	4
16	Polsek Gamping	17	5
17	Polsek Moyudan	4	1
18	Polsek Minggir	4	2
Jumlah		432	270

Sumber: Polres Sleman yang telah diolah peneliti.

<sup>46</sup> Liza Alfitriani, Hasil Penelitian tentang "Pencegahan Hukum terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, Dalam Keadaulatan Rakyat, Yogyakarta, Lahan Bisnis Pengedar Psikotropika, Jaringan Sangan Rapi, Suli Tangkap Bandar, tanggal 3 April 2001, hlm. 4.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa, bila dibandingkan dengan Resot Sleman dan Polsek lain, Polsek Depok menduduki peringkat tertinggi dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 128, tetapi dari segi penyelesaian perkara masih relatif rendah karena baru dapat diselesaikan 56 perkara dan perkara mengambang atau belum terselesaikan sejumlah 72 perkara. Sedangkan untuk penyelesaian perkara di Resot Sleman dari segi kuantitas paling tinggi bila dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan oleh Polsek di lingkungan wilayah Sleman.

Dengan demikian bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa secara keseluruhan pekerjaan polisi dalam menyelesaikan perkara baik dari segi kuantitas maupun kualitas relatif masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan/kemampuan yang tidak penuh dari sebagian besar polisi selaku penyidik dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat, yakni korban/pelapor. Polisi mempunyai kemampuan dilihat dari kuantitas perkara yang dapat diselesaikan meningkat yakni perkara biasa, cepat dan ringan. Sedangkan dari segi kualitas belum menunjukkan adanya kemampuan yang berarti. Hal ini terlihat dalam menangani perkara pengedara atau bandar Narkoba, penadah Curamur, Curas, Curat dan pembunuhan, yang bisa terungkap sampai di pengadilan hanya pencurian, penyalahgunaan narkoba hanya terbatas pada pengguna/pemakai, itupun hanya kalangan kelas bawah.<sup>47</sup>

### 3. Perilaku Polisi selaku penyidik dalam proses pemeriksaan

Segera suatu perkara disampaikan kepada petugas dalam Bagian serse (Polda), Satuan Unit (Polres dan Polsek) tertentu, polisi penyidik yang ditugasi mulai melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan perkara dikategorikan dalam beberapa golongan, yakni:

#### a. Golongan perkara pelanggaran

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan informan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

- b. Golongan perkara ringan
- c. Golongan perkara berat.

Untuk masing-masing golongan perkara diberikan dana operasional yang besar kecilnya disesuaikan dengan kategori tersebut. Penggolongan suatu perkara termasuk berat atau ringan bukan berdasarkan lama/sedikitnya ancaman pidana yang diancamkan, bukan juga dari jenis perkara (misalnya pencurian lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan) melainkan berdasarkan pada banyak sedikitnya alat bukti yang sudah ada pada suatu perkara. Misalnya saksi (keterangan saksi), keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Suatu perkara dikatakan ringan jika hampir semua alat bukti tersebut sudah ada, sebaliknya suatu perkara dikatakan sebagai perkara berat jika alat bukti yang dimiliki polisi penyidik masih minimum, tersangkanya belum ada, saksi tidak lengkap dan seterusnya.<sup>48</sup>

Selanjutnya mengenai dana operasional untuk melakukan pemeriksaan di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok berasal dari kesatuan masing-masing, yakni dari anggaran rutin setiap triwulan, disampaikan kepada penyidik. Dana untuk melakukan pemeriksaan di Polres Sleman berdasarkan informasi Kaurbin. Ops adalah sebagai berikut:

1. Untuk perkara pelanggaran sebesar Rp 35.000,-
2. Untuk perkara ringan/sedang sebesar Rp 120.000,-
3. Untuk perkara berat sebesar Rp 420.000,-

Berkaitan dengan anggaran yang tersedia sebagaimana disebutkan di atas betapa tak sepadannya biaya penyidikan tersebut. Padahal penyidikan kasus-kasus ringan/sedang (seperti kasus-kasus pencurian termasuk pencurian kendaraan bermotor) biaya perkasus bisa mencapai ratusan ribu rupiah bahkan jutaan rupiah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Depok di Polsek Depok, kriteria berat ringannya suatu perkara tersebut ditentukan oleh penyidik.

<sup>49</sup> Lihat Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik*, Sahabat, Klaten, 1996, hlm. 60.

Untuk mengatasi minimnya anggaran tersebut penyidik "minta pengertian sendiri dari masyarakat" dalam hal ini korban/pelapor yang dikenal dengan uang "parmas" (partisipasi masyarakat).<sup>50</sup> Berbeda dengan Polda DIY istilah yang digunakan adalah "kemitraan" atau "Ucapan terima kasih"<sup>51</sup> sedang di Polsek dengan istilah uang "susu" (sumbangan suka rela).<sup>52</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas berdasarkan informasi dari korban/pelapor dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, pada saat mengambil kendaraan bermotor yang telah diketemukan polisi penyidik, prosesnya sangat rumit dan berbelit-belit dan waktunya lama. Disamping itu korban harus mengeluarkan uang sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh polisi selama penyidikan.<sup>53</sup> Hal ini tidak hanya terjadi di DIY, melainkan sudah menjadi rahasia umum. Asal tahu "rahasianya" ternyata lebih cepat (1 bulan) saja. Rahasianya sederhana, yakni ada imbalan dalam bentuk uang yang disebut "uang terima kasih" seperti yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.<sup>54</sup>

Bertitik tolak dari informasi tersebut di atas, jika hal tersebut sampai berlanjut-larut dilakukan oleh polisi penyidik untuk mengungkap suatu kasus dengan memungut biaya kepada korban, maka menimbulkan efek negatif yang bertentangan dengan tugas utama polisi yakni melindungi dan mengayomi masyarakat dalam hal ini korban/pelapor atau bertentangan dengan asas penegakan hukum dengan biaya ringan. Disamping itu akan menimbulkan anggapan polisi melakukan pemerasan terhadap korban/pencari keadilan atau polisi baru bertindak setelah ada uang. Hal ini sesuai pendapat dari informan penasehat hukum, bahwa polisi cepat bertindak karena "uang komando".<sup>55</sup> Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah

- <sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Kaurbinops di Polres Sleman pada tanggal 1 Februari 2000.
- <sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kaunit Polsek Depok pada tanggal 28 Februari 2000.
- <sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kasersum Polda DIY pada tanggal 5 Mei 2000.
- <sup>53</sup> Informasi dari korban/pelapor dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.
- <sup>54</sup> Bob Hutabarat, *Mencari Mobil, Perlu Surat Kuasa*, Kompas, tanggal 1 April 2001, hlm.
- <sup>55</sup> Hasil wawancara dengan informan penasehat hukum dari LKBH VII Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2000.

untuk meningkatkan anggaran operasional penyidikan yang dilakukan polisi penyidik, sehingga polisi penyidik dapat bekerja secara mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

Berhubungan dengan perilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan , pembuatan berita acara sampai dengan pengajuan BAP kepada penuntut umum diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan profesional serta melindungi hak-hak tersangka, sehingga membuat terang suatu perkara.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari hasil penelitian berdasarkan informasi dari tersangka, polisi, penasehat hukum, jaksa dan hakim dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### Kasus 1 (Informasi Tersangka)

Menurut penuturan seorang tersangka bernama Ny. Risti yang mempunyai dua anak dan sedang ditinggal pergi (minggal) oleh suaminya yang berasal dari Lampung dalam kasus penyalahgunaan narkoba/psikotropika, ditangkap di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jln. Godean Sleman, tidak disertai surat perintah penangkapan dan tanpa sepengetahuan aparat setempat dalam hal ini RT/RW/Kades setempat. Dan pada saat itu, juga dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik, masuk rumah kemudian mengacak-acak semua yang ada dalam rumah dan akhirnya diketemukan sebungkus rokok yang ada ineknya tersimpan dalam Magic Jar. Dalam kasus tersebut Ny. Risti disangka sebagai pengedar, namun menurut penuturan Ny. Risti barang tersebut yang menyimpan pembantuannya. Kemudian Ny. Risti dibawa secara paksa oleh aparat polisi untuk ditahan di Polda DIY. Lebih lanjut Ny. Risti mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tidak didampingi oleh penasehat hukum, karena polisi mengatakan menggunakan penasehat hukum apa tidak kalau menggunakan penasehat hukum dari luar biayanya mahal akan diperberat ancamannya,

tetapi kalau menggunakan penasehat hukum dari kepolisian cepat selesai tanpa dipungut biaya. Pada saat pemeriksaan mereka diperlakukan secara tidak manusiawi karena tidak mengaku sebagai pengedar melainkan hanya sekedar pemakai karena stres ditinggal pergi suaminya (minggat) yang tidak kembali. Tindakan tidak manusiawi dilakukan oleh aparat polisi selaku penyidik terutama pada saat belum didampingi oleh penasehat hukum. Rasa tidak manusiawi tersebut menurut penuturan Ny. Risti sangat tersiksa terutama dilakukan oleh petugas pintu tahanan dengan tendangan dan pukulan. Dengan wajah yang kusut Ny. Risti menangis karena ingat pada anak yang terkecil yang baru berusia 2 tahun yang tidak ada yang mengurus dan pada saat itu Ny. Risti dijenguk oleh adiknya laki-laki, sehingga merasa terhibur. Akhirnya Ny. Risti pasrah dan menerima sebagai tersangka pemakai obat terlarang yang mereka sebut inek yang sedang menunggu proses selanjutnya.<sup>56</sup>

Dari kasus di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa hal yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik sebagai berikut:

1. Pada saat penangkapan tidak menunjukkan surat tugas penangkapan.
2. Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada RT/RW/Kades dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan.

3. Adanya perlakuan yang tidak manusiawi pada saat pemeriksaan pendahuluan dari polisi untuk mengajar pengakuan dari tersangka.

4. Perlakuan yang tidak manusiawi sangat menyiksa terutama dilakukan oleh petugas ruang tahanan dengan tendangan dan pukulan.

5. Pada saat pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum.
6. Ada kecenderungan polisi selaku penyidik menakut-nakuti tersangka dengan memperlambat ancaman hukuman jika menggunakan penasehat hukum bukan dari kepolisian.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan tersangka Ny. Risti di Polda DIY pada tanggal 25 April 2000.

Dari identifikasi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, masih adanya

kecenderungan-kecenderungan sebagaimana diraitkan tersebut di atas menunjukkan adanya kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur proses penidikan yang tidak menentukan sanksi bagi polisi penidik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penidikan pada peradilan pidana. Meskipun bagi tersangka bisa mengajukan praperadilan, namun dalam kenyataan tidak efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Artidjo Alkotsar, bahwa kontrol dari segi perangkat hukum masih sangat lemah yang tercermin dalam KUHAP yang sama sekali tidak menyinggung sanksi bagi polisi yang menyimpang atau melanggar tugasnya, terutama dalam hal penidikan.<sup>57</sup> Disamping itu, polisi dalam melakukan penidikan masih menggunakan tindak kekerasan guna menggar pengakuan dari tersangka yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi tersangka untuk tidak disiksa dalam proses penidikan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dan KUHAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa polisi penidik dalam menyelenggarakan fungsi penidikan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana masih memperlihatkan pola militer yakni menggunakan tindak kekerasan dan belum dapat mewujudkan kinerja yang profesional.

#### Kasus 2 (Informasi dari Tersangka)

Penuturan Ny. Yanti yang berparas cantik, rambutnya dipangkas pendek, kulit kuning langsat dan sempat menyelesaikan pendidikan D3 AMP, dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi tahanan di Polres Sleman. Penuturan ibu seorang anak yang baru berusia 2 tahun sampai di dalam tahanan Polres Sleman karena kasus disangka menyimpan ganja 1 kg. Ny. Yanti, ditangkap oleh polisi di rumah kontrakan teman laki-lakinya yang bernama Udin mantan bos copet yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Pada waktu penangkapan, polisi tidak menunjukkan surat



tugas penangkapan dan melakukan penggeledahan yang akhirnya diketemukan ganja 1 kg. Pada saat penangkapan Ny. Yanti, Udin tidak ada di tempat. Selanjutnya Yanti dibawa polisi secara paksa untuk mencari Udin. Kebetulan dalam pencarian ketemu Udin di jalan, kemudian keduanya dibawa polisi menjadi tahanan di Polres Sleman. Menurutnyanya selama pemeriksaan dia diperlakukan baik meskipun tidak didampingi oleh penasehat hukum. Alasan tidak menggunakan penasehat hukum, karena pak polisi mengatakan kalau menggunakan penasehat hukum biayanya mahal dan akan diancam hukuman yang berat. Akhirnya Ny. Yanti mengikuti kata-kata pak polisi dan sudah menandatangani blonko kosong yang disodorkan oleh Pak Polisi meskipun tidak tahu maksud dari penandatanganan tersebut. (pen. pada saat diadakan wawancara Ny. Yanti sedang menunggu proses pengajuan BAP ke penuntut umum). Setelah selesai wawancara Ny. Yanti minta kepada pak polisi untuk dibelikan bakso, dan keinginan tersebut dikabulkannya.

Dari penuturan tersebut di atas dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Ada kecenderungan polisi dalam melakukan penangkapan tidak memperhatikan surat tugas penangkapan
2. Ada kecenderungan perlakuan polisi terhadap tersangka wanita sangat baik
3. Ada kecenderungan polisi sering menakut-nakuti tersangka menggunakan penasehat hukum dengan memperberat ancaman hukuman, kecuali dengan penasehat hukum dari kepolisian.
4. Ada kecenderungan dari tersangka menanda tangani blonko kosong yang disodorkan oleh polisi selaku penyidik.

Dari identifikasi tersebut di atas dapat dianalisis bahwa polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan tidak transparan, melanggar hak-hak asasi tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan belum memperlihatkan kemandirian yang

dilandasi sikap tindak yang profesional sebagaimana telah dikemukakan oleh Romli Atmasasmita.<sup>58</sup>

### Kasus 3 (Informasi Tersangka)

Pentutan Udin yang mengaku berasal dari Palembang yang hidup serumah dengan Ny. Yanti (lihat kasus 2), berpakaian seragam tahanan Polres Sleman, berbadan kurus yang mengaku sebagai mantan bos copet yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Menurut penuturannya dia ditangkap di jalan dibawa polisi bersama Yanti di Polres Sleman menjadi tahanan karena sebagai tersangka menyimpan ganja kering 1 kg. Dia mengakui terus terang menjual ganja tersebut karena terpaksa untuk biaya berobat kakinya yang cacat akibat dipukul linggis/dianiaya oleh masa dan dilempar ke slokan, karena tertangkap basah pada saat mencopet di sekitar Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Menurut pengakuan Udin selama di tahanan Polres Sleman diperlakukan baik oleh polisi meskipun tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Dia juga tidak menggunakan penasehat hukum karena menurut pak polisi biayanya mahal dan akan diperberat hukumannya. Pada saat diadakan wawancara dia menagis karena selama di tahanan Polres Sleman belum pernah ada teman seprofesinya yang menengok apalagi keluar yang dari Palembang sehingga dia merasa tidak punya keluarga. Dengan adanya wawancara ini dia merasa senang karena bisa keluar dari tahanan dan bisa makan banyak serta minum teh manis 2 gelas yang tidak pernah mereka nikmati dalam tahanan, karena selama dalam tahanan makan terbatas dan minum saja juga terbatas cuma air putih satu gelas pada pagi hari. Hal ini tampak dari wajahnya meskipun menagis tetapi ada perasaan senang. Penuturan Udin tersebut dikemukakan dihadapan polisi selaku penyidik, dan waktu juga dibatasi.

---

<sup>58</sup>. Kemandirian harus diartikan profesional kepolisian yang mempunyai karakteristik, antara lain: memiliki integritas dan konsisten dalam bertindak dan berperilaku, bertindak dalam batas-batas rambu etika profesi dan tanggungjawab profesi, bersikap transparan dan menjauhi sikap apriori dalam pelaksanaan tugas dan wewangnya, menjunjung tinggi asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam satu paket.

Begitu selesai langsung dibawa masuk dalam tahanan lagi, berbeda dengan Ny. Yanti setelah selesai wawancara dibelikan bakso terlebih dahulu.

Dari informasi tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Ada kecenderungan polisi dalam pemeriksaan terhadap tersangka sengaja tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum.
2. Ada kecenderungan menakut-nakuti tersangka, sehingga tidak menggunakan penasehat hukum.
3. Ada kecenderungan perlakuan yang diskriminatif terhadap tersangka laki-laki dengan wanita.

Dari identifikasi tersebut di atas dapat dianalisis, bahwa perilaku polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum sering melakukan penyimpangan dan mengabaikan aturan hukum. Tersangka tidak mempunyai kebebasan dalam memberikan keterangan dan juga tidak selalu didampingi penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum dianggap sebagai penghalang, yang akan mempersulit penyidikan. Disamping itu perilaku polisi penyidik masih memperlihatkan sikap yang diskriminatif. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yakni menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebelum diuraikan tentang informasi dari informan polisi resepsi yang berkaitan dengan pemeriksaan, perlu diketahui bahwa selama penelitian berlangsung, peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi dari tersangka selain dalam kasus Narkoba. Karena informan-informan tersangka tersebut yang menentukan pihak kepolisian, sehingga peneliti tidak diijinkan untuk wawancara dengan tersangka dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak di wilayah penelitian dan tersangka dalam kasus pembunuhan (misal Kasus Salman)

dengan alasan menjaga kerahasiaan dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa polisi reserve belum transparan dalam mengungkap suatu kasus atau dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

Polisi 1:

Polisi berpangkat Peltu (Ajun Inspektur Polisi I (AIPITU)) di bagian unit serse Polsek Depok, bertugas sebagai penyidik pembantu. Dilihat dari penampilannya, orang tidak menangka bahwa dia sebagai seorang polisi, karena berbuntut gondrong yang tidak rapi. Badan tambun, tinggi dan besar, hanya memakai kaos oblong dan celana jeans yang sudah lusuh, bicaranya lugas dan terbuka. Menurut penuturannya dia berpengalaman menjadi polisi sudah selama 17 tahun yang hanya tamatan SLP, dia merasa percaya diri meskipun belum pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan penataran di bidang kesersean, karena dalam menjalankan tugas banyak belajar dari atasan atau yang lebih senior. Menurut penuturannya dia sering melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan awal terutama dalam kasus yang meresahkan masyarakat seperti curanmor, jelas-jelas sudah ada barang bukti dan ada saksi, dia berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan polisi dan tidak mengaku melakukan pencurian. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi adalah bentakan, tendangan, tempelengan, setelah itu baru mau mengaku melakukan pencurian sebanyak 5 kali. Menurut penuturannya, tindakan tersebut dilakukan karena merasa jengkel setiap hari ada laporan dari masyarakat 1 sampai 3 sepeda motor yang hilang.

Dari informasi tersebut di atas dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Ada kecenderungan dari polisi untuk mengajar pengetahuan menggunakan tidak kekerasan dengan bentakan, tendangan dan tempelengan.

2. Ada kecenderungan dari polisi melakukan tindakan kekerasan dalam pemeriksaan merasa jengkel atau balas dendam semakin maraknya curanmor dan belum banyak yang terungkap, sehingga membuat masyarakat resah.
3. Ada kecenderungan polisi dalam melakukan penyidikan mencontoh dari seniornya atau atasannya.

Dari identifikasi tersebut di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan yang mengarah pada pengakuan, karena adanya keinginan polisi penyidik untuk mempercepat proses penyidikan guna memenuhi target penyelesaian perkara, sehingga menimbulkan praktik-praktik penyiksaan atau tindak kekerasan. Di samping itu kurang menguasai metode penyidikan yang ilmiah, karena belum pernah memperoleh pendidikan keserisan dan dalam melakukan penyidikan hanya mencontoh seniornya yang juga belum pernah memperoleh pendidikan keserisan. Hal ini juga dikemukakan oleh Made Darmawan Weda, praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan polisi penyidik merupakan kendala bagi kepolisian untuk mewujudkan metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*).<sup>59</sup>

#### Polisi 2:

Polisi berpangkat Sersan Satu ( Brigadir Polisi I (BRIP1U)) di bagian serse Polres Sleman, yang berambut cepak serta badan tegap dan kekar memakai kaos oblong dan celana coklat seragam polisi. Menurut penuturannya dalam menjalankan tugas selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam melakukan penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Tetapi terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti curanmor jika pelaku berbelit-belit, sedang barang bukti ada dan saksi ada, dia tidak mengaku melakukan pencurian dengan sangat terpaksa

<sup>59</sup> Made Darmawan Weda: Tantangan Polri Kekerasan dalam Penyidikan, *Kompas*, tanggal 2 Juli 1998, hlm. 4.

melakukan tindakan kekerasan yakni dengan dibentak, dipukul atau ditempeleng yang akhirnya dia mengakui.

Dari penjelasan tersebut dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Ada kecenderungan polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka melakukan tindak kekerasan yang berbentuk bentakan, tempelangan dan pukulan.
2. Tindakan kekerasan sering dilakukan polisi penyidik terutama terhadap pelaku tindak pidana Currammor untuk mendapatkan pengakuan.
3. Tindakan kekerasan dilakukan karena merasa jengkel pelaku tindak pidana yang membikin resah pada masyarakat.

Dari identifikasi tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk mempercepat proses penyidikan khususnya dalam kasus Currammor (salah satu dari *Crime Index*) polisi penyidik sering menggunakan tindak kekerasan guna memperoleh pengakuan. Karena salah satu keberhasilan organisasi kepolisian khususnya dalam bidang penyidikan adalah tercapainya tujuan "*Clearance rate*" atau "*Crime Clearance*".<sup>60</sup> Untuk mengejar tujuan tersebut, kepolisian sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional, tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan tersebut. Pertimbangan rasional ekonomis tersebut adalah:<sup>61</sup>

(1) berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya

<sup>60</sup> Berkaitan dengan masalah tuntutan organisasi kepolisian, I.S. Susanto mengemukakan bahwa salah satu tuntutan organisasi kepolisian dalam menentukan dan efisiensi kerja anggotanya adalah keberhasilannya dalam menyelesaikan laporan kejahatannya yang ada atau yang disebut sebagai "*Clearance rate*". Perlu dicatat bahwa istilah "*Clearance*" tidak selalu dikonotasikan dalam arti hukum. Ini berarti bahwa "*Clearance rate*" sekaligus juga berfungsi sebagai alat kontrol pimpinan terhadap menajemen dan profesional polisi. Dengan demikian tingkat rendahnya "*Clearance rate*" yang dapat dicapai oleh suatu daerah atau wilayah merupakan tolak ukur yang penting dalam menilai aktivitas dan keberhasilan polisi di suatu daerah atau wilayah (Lihat I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang, 19-30 Juli 1993, hlm. 8-7.

<sup>61</sup> I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

sendiri sebanyak mungkin;

(2) berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal beban yang menekan

organisasinya.

Dengan demikian terjadinya tindakan menyimpang atau manipulasi dalam

penyidikan dapat dikatakan sebagai akibat dari pengaruh tuntutan organisasi

kepolisian dalam mengejar "Clearance rate" atau penyelesaian/mengungkap

kejahatan, dan apabila tuntutan organisasi ini tidak tercapai, maka akan membawa

dampak yang negatif baik terhadap eksistensi organisasi maupun terhadap penyidik

sendiri.

Disamping itu, tuntutan masyarakat luas terhadap kasus-kasus pidana yang

sudah tersebar/tersiar kepada masyarakat atau kasus yang mendapat perhatian luas

dalam masyarakat, polisi penyidik mempunyai beban (tanggung jawab) secara moral

kepada masyarakat untuk mengungkap kasus tersebut. Jadi tuntutan masyarakat yang

demikian oleh penyidik dianggap mempunyai pengaruh secara moral bagi penyidik

sendiri dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Karena masyarakat biasanya

akan bereaksi apabila polisi penyidik tidak mampu atau berhasil mengungkap kasus

kejahatan tersebut.

Polisi 3:

Polisi yang berpangkat Mayor (Komisaris Polisi (KOMPOL)) sebagai Kabag Sersum Polda DIY yang berpengalaman rapi asal Menado dengan logat bicara yang keras dan tegas mengakui bahwa tindakan kekerasan dalam penyidikan masih dilakukan terutama dalam kasus curamur. Dia memberikan contoh seorang mahasiswa semester akhir dari PTN terkenal di Yogyakarta melakukan pencurian kendaraan bermotor tertangkap. Namun sebelum proses penyidikan dilakukan atau pemeriksaan awal mengatakan bahwa dia melakukan pencurian karena mempunyai hutang Rp 300.000,- untuk biaya kuliah, dan dia baru pertama kali melakukan pencurian yang dikemukakan dihadapan mayor Polisi tersebut. Karena pertimbangan kemanusiaan

Dari identifikasi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketidak mampuan polisi dalam menangkap suatu kasus khususnya Curramor, sehingga untuk

pengakuan dari tersangka.

3. Ada kecenderungan polisi melakukan tindak kekerasan untuk mengesjar dendam atas perbuatan tersangka yang melanggar hak asasi manusia korban.
2. Ada kecenderungan polisi melakukan tindak kekerasan karena unsur balas jengkel kepada tersangka yang tidak mengakui tindak pidana yang dilakukan.
1. Adanya kecenderungan dari polisi untuk melakukan tindak kekerasan karena

beberapa hal sebagai berikut:

Dari penjelasan informan polisi 3 tersebut di atas dapat diidentifikasi

perbuatannya dan melanggar hak-hak korban kejahatan.

yang telah melanggar hukum yang juga cenderung tidak mau mengakui merupakan sisi lain dari pekerjaan polisi yang setiap hari menghadapi orang-orang berpendapat bahwa kekerasan terhadap tersangka itu merupakan hal yang biasa, dan kendaraan bermotor, apakah pelaku pencurian tidak melanggar HAM. Akhirnya dia tidak melanggar HAM apabila dikembalikan pada korban yang kehilangan pelampiasannya tersangka dikenai tindakan kekerasan. Menurut informan hal tersebut kalau tersangka berbelit-belit wajar jika ia merasa jengkel, sehingga sebagai melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 7 kali. Dalam pandangannya serta tempelengan berkali-kali, akhirnya mahasiswa tersebut mengaku telah terpaksa menggunakan kekerasan fisik dengan bentakan, tendangan dan pukulan menjadi bukti ada dan saksi. Menghadapi hal tersebut mayor polisi tersebut memeriksa dia tidak mengaku melakukan pencurian, pada hal barang-barang yang terjadi mahasiswa tersebut melakukan pencurian lagi, dan pada proses awal mahasiswa dengan korban akhirnya perkara tersebut tidak diproses. Namun apa yang Rp 300.000,- untuk mengembalikan pinjamannya, dan terjadi perdamaian antara dan demi masa depan mahasiswa yang bersangkutan oleh mayor tersebut diberi uang



mempercepat proses penyidikan tindak kekerasan. Di samping itu polisi kurang memahami HAM, karena dalam menghadapi tersangka seperti menghadapi musuh. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku polisi penyidik masih menggunakan pola dan perilaku militer atau belum menunjukkan perilaku polisi sipil.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dilihat pelaksanaan penyidikan baik di Polda DIY, Polres Sleman maupun Polsek Depok menurut pandangan dari penyidik sendiri, dari berbagai identifikasi adanya kecenderungan-kecenderungan dalam pelaksanaan penyidikan dapat ditarik pemahaman bahwa polisi selaku penyidik mempunyai cara sendiri untuk mengungkap suatu kasus kejahatan dan cara itu dianggap yang terbaik, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka ahli di bidangnya. Hal tersebut jika dikaitkan dengan organisasi modern yang birokratis berdasarkan maksud untuk mencapai tingkat rasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber<sup>62</sup>, maka polisi selaku penyidik yang merupakan salah satu unsur dari organisasi/lembaga kepolisian merasa yakin dengan apa yang dikerjakan dan dalam menjalankan pekerjaan/tugas tersebut memerlukan efisiensi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, prinsip efisiensi dalam penanganan suatu kasus merupakan target utama yang tidak dapat ditawar-tawar (*ultimate target*) sehingga dalam proses penyidikan, pola penyidikan, penentuan, pemeriksaan di muka pengadilan diperoleh petunjuk, pola sikap dan perilaku, "lebih cepat terungkap dan selesai, lebih baik, atau lebih cepat disidangkan dan diputus, lebih baik". Prinsip ini telah menjadi pelaksanaan tugas kepolisian sejak lama dianut hampir semua negara. Prinsip ini menghendaki agar

<sup>62</sup> Max Weber, *Batas-batas tentang Birokrasi*, dalam Martin Albrow, Birokrasi, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hlm. 34.

*crime clearance* setinggi-tingginya dan *crime rate* serendah-rendahnya.<sup>63</sup> Sisi negatif dari penerapan prinsip ini ialah, sering rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan dalam KUHAP yang menganut prinsip efektivitas diabaikan, karena rambu-rambu hukum tersebut dipandang sebagai kendala atau rintangan untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi penanganan perkara. Dorongan mengutamakan prinsip efisiensi dan kurang memperhatikan prinsip efektivitas semakin besar karena faktor hierarki dalam struktur kepolisian yang militeristik yang menuntut kewajiban selalu menaati perintah atasan seperti perintah mengenai batas waktu dalam mengungkap suatu kasus, yang sering dipandang lebih penting dibandingkan dengan ditemukannya alat bukti dan barang bukti yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas polisi selaku penyidik, polisi memang dikejar waktu untuk menyelesaikan suatu perkara, jika polisi terlalu lama dalam melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan, maka berarti polisi telah menghambat jalannya suatu peradilan yang berasaskan peradilan yang cepat dan biaya murah sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu efisiensi ini oleh polisi ditafsirkan dengan cara mereka sendiri, yang antara lain terwujud dalam bentuk tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mengajar pengakuan. Penggunaan kekerasan oleh polisi sering disebut sebagai inti dari pekerjaan kepolisian.<sup>65</sup>

Walaupun telah ditentukan dalam KUHAP dan senantiasa juga ditekankan oleh para petinggi Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pengakuan bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti, yang terpenting justru pembuktian secara ilmiah, tetapi dalam realitas polisi dalam melakukan penyidikan masih berpegang pada pengakuan dari tersangka. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari kedudukan polisi sebagai bagian dari struktur organisasi penegak hukum dalam sistem peradilan

<sup>63</sup> Lihat Romli atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan hukum*, BinaCipta, Bandung, 1997, hlm. 4.  
<sup>64</sup> *Ibid.*  
<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru Bandung, tanpa tahun, hlm. 101.

pidana, di mana berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh polisi selaku pemeriksa akan diserahkan ke penuntut umum dalam hal ini di kejaksaan. Pada pemeriksaan di tingkat kejaksaan justru sering terjadi pengembalian berita acara pemeriksaan karena tidak dilengkapi dengan pengakuan tersangka, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan tersangka.

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas, tampaknya merupakan suatu gejala umum yang terjadi di Indonesia, jadi bukan hanya terjadi di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok saja. Untuk itu dalam rangka mengkaji kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, kiranya perlu diperhatikan bagaimana pandangan dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan proses penyidikan, yaitu penasehat hukum dan penuntut umum/jaksa.

#### Penasehat Hukum I

Penuturan seorang penasehat hukum yang berpenampilan sederhana, berbadan kecil dengan logat bicara yang santun yang saat ini menjadi anggota hakim agung. Pada saat diadakan wawancara<sup>66</sup>, informan menyatakan pernah menjadi penasehat hukum Salinan dalam kasus pembunuhan yang dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Berkaitan dengan kasus Salinan, informan mengemukakan bahwa sejak awal penyidik polisi telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan penyidik, dalam pemeriksaan awal Salinan tidak didampingi oleh penasehat hukum sedang kasusnya menuntut hilangnya nyawa seseorang. Disamping itu polisi penyidik menganggap masalah, sering mengancam, memukul dan merekayasa. Dalam kasus Salinan polisi juga tidak mengurikan secara kronologis kejadian yang sebenarnya sebelum terjadi pembunuhan terhadap korban. Lebih lanjut informan mengemukakan bahwa sebelum

<sup>66</sup> Wawancara dengan informan penasehat hukum pada tanggal 19 Juni 2000 di Pusat Studi HAM FH UII Yogyakarta.

1. Ada kecenderungan polisi dalam melakukan pemeriksaan awal disertai dengan tindakan kekerasan.
2. Ada kecenderungan polisi melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka guna mengejar pengakuan.

berikut:

Dari penjelasan informan tersebut dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai

Negeri Sleman menjatuhkan putusan bebas dalam kasus Salman tersebut. Oleh informan bahwa hal tersebut tidak benar. Dan akhirnya oleh hakim Pengadilan gambar-gambar yang terkait dengan kasus Salman juga terputus, sehingga dibantah perlu disidik. Kemudian dalam pemeriksaan rekonstruksi pemeriksaan juga terputus, mengemukakan bahwa dari gambaran tersebut seharusnya pelecehan terhadap agama sebenarnya, itu merupakan kesalahan polisi. Lebih lanjut penasehat hukum ada beberapa seri yang terputus, di mana polisi tidak menunjukkan fakta yang mau diterapkan begitu saja. Pada hal kasus tersebut tentunya panjang, ibarat film dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan pasal pembunuhan tersebut karena polisi tidak menjelaskan kronologis yang sebenarnya, seolah-olah Salman kasus tersebut polisi menerapkan pasal pembunuhan, yang dibantah oleh informan, untuk kerjabakti, guna melawan korban yang berakibat meninggal dunia. Dalam Karena Salman takut dicerca lalu Salman mencabut pisau yang semula digunakan perkelahian antara Salman dengan korban, Salman dilempar batu oleh korban. Iuran listrik dari kelompok korban. Akhirnya Salman jengkel, sehingga terjadi panggilan kambing. Disamping itu Salman dipelakukan diskriminatif tidak ditarik Waka Polres Sleman. Namun yang terjadi korban sering menghinia Salman, dengan umum atau banyak orang oleh korban, dan pada waktu itu sudah didamaikan oleh kriminal. Sebelum terjadi pembunuhan, Salman sering dipermalukan di muka kelompok korban yang bernuansa sara, sedang polisi penyidik menganggap kasus terjadi pembunuhan sudah ada pertentangan antara kelompok Salman dengan

Menurut penuturan dari informan penasehat hukum mengemukakan, bahwa polisi selalu penyidik sering menggunakan kekerasan fisik dan mengesampingkan pendekatan psikologis dalam penyidikan baik dalam penggeledahan, penangkapan, penahanan dan interogasi terutama yang berkaitan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), curtas, currat, pembunuhan dan penyalahgunaan narkoba, guna memperoleh pengakuan dari tersangka. Tindakan kekerasan fisik tersebut sering dilakukan pada saat para tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Sehingga berakibat BAP tidak diakui kebenarannya oleh terdakwa di hadapan hakim/di persidangan dengan alasan karena tersangka dipaksa untuk menandatangani BAP yang sudah disodorkan oleh penyidik. Hal ini terbukti sering kali terjadi para penyidik dijadikan saksi di persidangan untuk membuktikan benar tidaknya alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut. Akibat lain dengan tidak didampinginya tersangka oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan, dalam

## Penasehat Hukum 2

Dari identifikasi tersebut dapat dikemukakan bahwa polisi penyidik dalam melakukan penyidikan belum berperilaku polisi sipil sebagaimana dikemukakan oleh Sajitio Rahardjo dan Nurfazli, melainkan masih menerapkan pola militeristik yakni sering melakukan tindak kekerasan, tidak bersifat transparan, serta menyederhanakan masalah dan sering melanggar HAM tersangka sehingga bertentangan dengan unsur-unsur negara hukum yang demokratis.

3. Ada kecenderungan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat tersangka belum didampingi oleh penasehat hukum.
4. Ada kecenderungan polisi sering mengganggalkan masalah, karena perkara yang begitu rumit disederhanakan.
5. Ada kecenderungan dalam rekonstruksi polisi tidak bersifat akomodatif dan kurang terbuka.

keputusan hakim memberikan putusan bebas. Misalnya bebaskan terdakwa Salman dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman.<sup>67</sup>

Dari penuturan informan penasehat hukum 2 tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Ada kecenderungan polisi dalam melakukan penggeledahan penangkapan dan penahanan serta interogasi tidak menggunakan pendekatan psikologis melainkan pendekatan kekerasan fisik terhadap tersangka.
2. Ada kecenderungan tindakan kekerasan dilakukan polisi pada saat tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum.
3. Ada kecenderungan dari polisi melakukan pemaksaan kepada tersangka untuk menandatangani BAP.

Dari identifikasi tersebut di atas menunjukkan bahwa kesulitan polisi penyidik untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya adalah karena kurangnya kemampuan polisi penyidik dalam teknik pemeriksaan khususnya di bidang psikologi. Perluanya penguasaan beberapa ilmu bantu dalam bidang hukum, khususnya bidang psikologi bagi penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya pemaksaan yang menyalaui pelanggaran hak asasi manusia tersangka sehingga pemeriksaan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Boedi Dwi Yani Sri Marsita G, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang jujur dan benar seorang penyidik dapat menerapkan salah satu bidang ilmu bantu dalam rangka penegakan hukum, yakni khususnya psikologi. Psikologi lebih berpijak pada pengetahuan tentang manusia, khususnya tentang perilaku dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dengan bantuan psikologi, seorang penyidik

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Direktur LKBH UII Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2000 di LKBH UII Yogyakarta.

dapat memperoleh atau "mengorek" keterangan dari tersangka dengan mudah, oleh karena telah dapat dilakukan pendekatan pribadi (*personal approach*) yang manusiawi.<sup>68</sup>

Jaksa

Penuturan dari informan jaksa terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh polisi penyidik mengemukakan, bahwa polisi dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum masih bersifat diskriminatif dalam arti memilih-milih perkara. Contoh kasus yang dialami oleh karyawan Kejaksaan Sleman yang menjadi Wasit PSS Sleman pada saat kejadian karyawan tersebut bertindak sebagai pengawas dalam pertandingan sepak bola. Terjadi keributan pengawas tersebut dipukul pakai batak sampai kelenger dan banyak orang yang menyaksikan bahwa pelakunya adalah si A, B, C, dan D. Secara otomatis dilaporkan kepada kepolisian dengan bukti dan saksi-saksi, tetapi oleh penyidik menyatakan bahwa tersangka/pelaku tidak mengakui pemuksulan. Dan sampai saat ini sudah hampir dua tahun (pen.wawancara) belum ada SPDP/ SPDP tidak pernah dikirim. Pada hal dari kasus tersebut ada barang bukti dan ada saksi. Lebih lanjut informan mengemukakan, bahwa polisi penyidik dalam melakukan penyidikan sering menggunakan kekerasan itu bagi polisi sudah merupakan hal yang biasa dalam mengejar pengakuan dari tersangka.

Dari penuturan informan penuntut umum tersebut dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Ada kecenderungan dari polisi penyidik berperilaku diskriminatif terhadap kasus yang dilaporkan.
2. Ada kecenderungan dari polisi tidak menindak lanjut perkara karena tidak adanya pengakuan dari tersangka meskipun sudah ada barang bukti dan ada saksi.

---

<sup>68</sup> Lihat Boedi Dwi Sri Marsita G: Pentingnya Penguasaan Psikologi bagi Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan (Suatu Tinjauan Yuridis dan Psikologis), Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 43.

3. Ada kecenderungan polisi selaku penyidik melakukan tindak kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Dari identifikasi tersebut di atas menunjukkan perilaku polisi penyidik dalam melakukan fungsi penyidikan pada peradilan pidana masih melakukan pelanggaran terhadap asas penegakan hukum yakni perlakuan yang sama terhadap para pihak yang berperkara. Di samping itu juga bertentangan dengan KUHAP, bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.<sup>69</sup>

#### 4. Perilaku Polisi penyidik dalam proses pengajuan Berita Acara ke Kejaksaan

Berdasarkan informasi dari seluruh informan polisi baik di Polda DIY, Polres Sleman maupun Polsek Depok dapat dikemukakan, bahwa sebelum penyidik melakukan penyidikan, terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan (SPDP). Baru kemudian pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebagai awal dari penyidikan itu sendiri.

Selanjutnya setelah pemeriksaan yang dilakukan polisi dianggap selesai, maka berkas acara pemeriksaan dikirim ke jaksa penuntut umum, yang merupakan bagian dari suatu proses peradilan pidana. Berkas tersebut antara lain berisi laporan polisi, resume penyidikan, berita acara pemeriksaan, surat-surat perintah yang dikeluarkan polisi dalam rangka penyidikan, surat dokter (mengenai kesehatan tersangka dari dokter umum atau dokter jiwa), surat kuasa dari penasehat hukum (kalau ada), Visum (kalau ada), hasil laboratorium forensik (kalau ada), dan daftar saksi maupun tersangka (kalau lebih dari satu).

Berkas pemeriksaan sebelum diajukan kepada penuntut umum terlebih dahulu ditandatangani oleh tersangka, sebagai bukti bahwa proses pemeriksaan

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 52 KUHAP, Dalam Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHAP*, Rineka Cipta, 1998, hlm. 255.



sudah selesai dan tersangka menyetujui apa saja yang tertera dalam berita acara tersebut.<sup>70</sup>

Berdasarkan data yang ada di Polres Sleman menunjukkan berapa banyak berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan Sleman dan data-data lain yang terkait dengan prestasi kerja bagi penyidik dalam menyelesaikan suatu penyidikan. Untuk memperjelas dapat dilihat pada data rekapitulasi hasil penyidikan tahun 2000 pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Data Rekapitulasi Hasil Penyidikan Kesatuan Serse Polres Sleman Tahun 2000.

NO. MATERI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1. SPDP	16	30	27	26	17	45	23	32	20	25	28	30	319
2. SPPP	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
3. P.21	22	18	21	27	27	19	21	25	23	17	25	17	262
4. P.19	9	12	9	7	7	7	5	11	3	6	4	1	81
5. P.18	9	12	8	6	6	7	6	9	3	6	4	1	77
6. BP kirim ke PU 18	30	21	19	19	29	22	30	17	20	34	29	288	
7. BP kirim PU se-9 telah P.18 dan P.19	8	6	4	4	4	4	4	2	2	1	1	49	

Sumber: Polres Sleman.

Keterangan:

1. SPDP: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

2. SPPP: Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.

3. P.21 : Pemberitahuan dari jaksa pada penyidik bahwa berkas acara sudah lengkap.  
4. P.19 : Kode intern kejaksaan yang berisi petunjuk dari jaksa pada penyidik untuk melengkapi berita acara.

5. P.18 : Kode intern kejaksaan tentang pemberitahuan kepada penyidik bahwa

<sup>70</sup> Berdasarkan informasi dari beberapa tersangka, penandatanganan berita acara pemertiksaan oleh tersangka sering kali dilakukan tanpa mengerti secara persis tentang apa yang ditulis dalam berita acara tersebut dan penandatanganan tersebut dilakukan karena paksaan dari polisi selaku penyidik. Informan selain polisi juga melihat penandatanganan BAP yang dilakukan karena adanya paksaan dari polisi selaku penyidik, sehingga sering terjadi polisi selaku penyidik kasus yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi oleh pihak Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil penyidikan tahun 2000 di Polres Sleman tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya secara formal penyidik telah dapat menyelesaikan perkara dalam pengertian telah selesai melakukan penyidikan secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata 27 perkara per bulan yang diberitahukan polisi kepada jaksa, dapat diterima dengan baik oleh jaksa dengan P.21 rata-rata mencapai 22 perkara. Dari gambaran secara umum ini dapat ditafsirkan bahwa penyidik dalam menyusun berkas acara penyidikan cenderung tidak mengalami kesulitan. Artinya, kemampuan penyidik dalam hal ini cukup memadai. Hal ini dimungkinkan yang disebabkan oleh adanya suatu rutinitas dalam menyusun berkas acara, sehingga lambat laun penyidik menjadi mahir dalam bidang tersebut.

Berdasarkan informasi penyidik, dalam menanggapi pengembalian BAP dari jaksa baik yang disertai dengan petunjuk (P.19 maupun P. 18) tersebut, penyidik melakukan *bargaining* atau tawar menawar antara jaksa dengan penyidik. Petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik biasanya mengenai penerapan pasal dan karena kurang/tidak cukup bukti dari adanya suatu tindak pidana. Di samping itu ada kemungkinan, ternyata yang dibuat yang disangka sebagai suatu kejahatan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa terbukti bukan suatu tindak pidana. Atau suatu perkara yang sudah selesai diperiksa polisi, dalam pemeriksaan jaksa, ternyata terdapat alasan kuat untuk dihentikan pemeriksaan lebih lanjut (tersangkanya meninggal), juga dimungkinkan penghentian pemeriksaan yang dipertahankan jaksa karena jaksa mempunyai kepentingan secara pribadi terhadap kasus tersebut.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Menurut beberapa informan polisi penyidik, sering terjadinya pengembalian BAP oleh jaksa penuntut umum sebenarnya terletak pada penerapan pasal yang dilakukan oleh penyidik, misalnya penerapan pasal pembunuhan jaksa memberi petunjuk penerapan pasal pembunuhan berencana. Di samping itu penghentian pemeriksaan suatu perkara oleh jaksa, seringkali disebabkan oleh adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perkara tersebut. Informan jaksa juga melihat adanya penghentian pemeriksaan karena jaksa yang memeriksa berkepentingan terhadap perkara tersebut.

Berhubungan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan adalah penyelesaian perkara oleh polisi atas perkara-perkara yang masuk setiap bulan. Melihat jumlah perkara yang dilaporkan masyarakat Sleman, terlihat bahwa sebagian besar adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan konvensional. Di kepolisian, kejahatan konvensional diklasifikasikan dengan *crime index*, yaitu jenis-jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk *crime index* adalah pembakaran atau kebakaran, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, pembunuhan dan narkoba/psikotropika.

Berkaitan dengan kemampuan polisi untuk menyelesaikan perkara per bulan, data yang ada di Polres Sleman bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2000 kiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, yang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Kemampuan Polisi Penyidik Menyelesaikan Perkara per Bulan

NO. BULAN	JUMLAH PERKARA	CRIME INDEKS (CI)	KASUS SELESAI (CI)
1. Januari	36	27	13
2. Februari	40	33	11
3. Maret	34	23	13
4. April	32	25	9
5. Mei	44	31	19
6. Juni	34	29	8
7. Juli	36	30	12
8. Agustus	45	44	16
9. September	37	34	17
10. Oktober	40	34	14
11. Nopember	54	47	21
JUMLAH	432	357	153

Sumber: Polres Sleman yang telah diolah peneliti.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang dilaporkan masyarakat dalam satu bulan cukup banyak, sebagian adalah kasus-kasus yang berkait dengan pengadilan masyarakat berkait dengan perkosaan, perzinahan,

perbuatan cabul, pnganiayaan (suami istri) dan lain-lain. Terlihat kasus yang menonjol adalah kasus atau perkara yang termasuk *Crime Index* rata-rata tiap bulan adalah 32 kasus atau perkara dan rata-rata 14 kasus yang bisa diselesaikan. Hal ini menjadikan pelaksanaan tugas polisi semakin berat. Keadan tersebut menjadi beban polisi yang sangat berat, karena disamping aparat penegak hukum polisi juga sebagai aparat ketertiban dan aparat keamanan, sering kali terjadi tumpang tindih antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya. Misalnya pada saat polisi sedang melakukan penyidikan, terjadi demonstrasi atau ada perintah untuk menjaga keramaian, atau mengamankan situasi berkenaan dengan kedatangan tamu di kota Yogyakarta. Akibat dari tugas tersebut sering kali terjadi polisi menghentikan penyidikan untuk melakukan tugas lain tersebut yang diberikan kepadanya.

Demikianlah gambaran perilaku polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dan hal-hal yang ikut membentuk perilaku polisi tersebut yang pada akhirnya juga akan membentuk kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Secara umum dapat dikemukakan bahwa bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana belum menunjukkan adanya kemandirian dan belum memperlihatkan kinerja yang profesional.

**b. Kendala yang bersifat eksternal terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.**

Sebagaimana telah dikemukakan kendala yang bersifat eksternal yang dimaksud adalah berasal dari luar perilaku polisi selaku penyidik, yaitu:

1. Instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Intervensi baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

### 3. Keterbatasan Anggaran untuk operasional penyidikan.

#### 1. Instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari peraturan perundang-undangan yang ada selama ini yang mengatur kewenangan penyidik tidak hanya diperuntukkan kepada polisi saja melainkan ada beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik, antara lain:

1) Pejabat Polri (Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

2) PPNS (Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Khusus yang terkait antara lain Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Perwira TNI-AL (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Bertitik tolak dari gambaran tersebut di atas dapat dikemukakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menetapkan tiga pejabat penyidik, yakni Polri, PPNS dan Perwira TNI-AL. Di samping itu dalam kasus korupsi jaksa juga sebagai penyidik Apabila dikaitkan dengan pejabat yang mengangkat pejabat tersebut berbeda, yakni Kapolri untuk polisi, Menteri Kehakiman untuk PPNS dan Pangab untuk Perwira TNI, maka dilihat dari kesatuan

sistem yang integral adanya tiga puncak dan bervariasi mekanisme tata kerja di bidang penyidikan, kurang menggariskan adanya suatu badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Dengan perkataan lain sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memberikan kejelasan tentang struktur organisasi dan mekanisme lembaga penyidik yang mandiri dan terpadu.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan beberapa pejabat selaku penyidik selain polisi sebagaimana telah disebutkan di atas banyak mendapat kritik dari lingkungan Polri sendiri. Agus Lufianto (Kasubag Serse Umum Polda DIY) mengemukakan bahwa meskipun Polri sudah mandiri dalam arti lepas dari TNI sebenarnya hanya ganti baju saja, karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara tegas bahwa urusan penyidik merupakan tugas polisi.<sup>73</sup> Kritik tersebut juga dikemukakan oleh Mariant Kapoli Awaludin Djamin yang dikutip oleh Sigit Riyanto dan Edy O.S. Hiariej mengatakan, bahwa adanya penyidik selain Polri jelas mengurangi sistem yang kurang baik. Korupsi disidik dan kemudian jaksa pula yang menuntut. Kalau begitu siapa yang mengawasi? Hal demikian juga dikemukakan oleh Rusdihardjo (sebelum digantikan Bimantoro) menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Polri dari ABRI, dipastikan akan lebih mampu mengoptimalkan kedudukannya sebagai penegak hukum. Dengan posisi mandiri, Polri dapat menyidik kasus apapun di negeri ini.<sup>74</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa pada hakekatnya Polri menginginkan dirinya sebagai penyidik untuk semua perkara pidana. Tentu saja untuk terwujudnya keinginan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan, melainkan harus ditunjang adanya peningkatan kualitas SDM polisi

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", diselenggarakan oleh FH UNDP, Semarang, 20 Desember 1997, hlm. 8.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan informan polisi di Polda DIY pada tanggal 24 April 2000.

<sup>74</sup> Sigit Riyanto dan Edy O.S. Hiariej, *Fungsi Polri dalam Sistem Peradilan Sipil Pasca Pemisahan TNI-Polri*, Makalah disampaikan dalam Simlok "Implikasi Reposisi TNI-Polri Dalam Bidang Hukum", kerjasama FH UGM-USAD/OTI, Yogyakarta, 22-23 Nopember 2000, hlm. 8.

Sebagaimana telah dikemukakan kemendirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana dapat ditafsirkan mandiri baik organisasi maupun substansi dalam arti sebagai suatu upaya polisi dalam penegakan hukum supaya tidak ada intervensi dari kekuatan militer, politik, ekonomi dan pemerintah yang didandai profesionalisme, serta dilandasi sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebenaran dan rasa keadilan lepas dari pola perilaku serta dominasi militer.

b. Intervensi yang bersifat vertikal dan horizontal

dan kewenangan serta pengawasan terhadap Polri sendiri.

kepolisian secara mendasar, khususnya mengenai struktur organisasi, fungsi, tugas Untuk itu perlu segera diadakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan bertindak dalam pelaksanaan tugasnya khususnya di bidang penegakan hukum. Tentu saja, jika tidak segera direvisi berakibat polisi ragu-ragu/gamang untuk VII/MPR/2000, ketiga Undang-Undang tersebut secara yuridis formal masih berlaku. VI/MPR/2000 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor dari ABRI. Meskipun telah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih meletakkan Polri bagian bagian integral dari ABRI. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Keprajuritan ABRI, Polri merupakan 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dan wewenang polisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun Di samping itu peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan

struktur organisasi dan mekanisme lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. umumnya sebagaimana telah diuraikan sehingga ada suatu kejelasan mengenai mengatur kewenangan penyidik khususnya dan sistem peradilan pidana pada teknis hukum. Untuk itu perlu ditinjau kembali peraturan perundang-undangan yang selaku penyidik sehingga bisa tampil secara profesional dalam penanganan masalah

Selanjutnya informan polisi penyidik mengemukakan, bahwa intervensi yang bersifat ekstern adalah dari masyarakat semakin marak di Polres Sleman. Hal ini terjadi dalam kasus pembunuhan secara masal terhadap pencuri dilakukan dihadapan

tersebut dalam masyarakat.

mengambil keputusan terlebih dahulu mempertimbangkan dampak dari kasus dilakukan sebelum reformasi tidak berani menolak, tetapi setelah reformasi untuk perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Menghadapi hal tersebut, yang perkara atau menghentikan suatu perkara, karena atasan berkepentingan terhadap intervensi yang bersifat intern berasal dari pimpinan terkait untuk memproses suatu penuh, karena masih ada intervensi baik yang bersifat intern maupun ekstern. Penuturan seorang informan polisi selaku penyidik mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan belum

#### Polisi 1

jaksa maupun hakim dalam uraian berikut ini.  
digambarkan penuturan dari beberapa informan baik dari polisi penasehat hukum, Untuk memperjelas intervensi yang bersifat vertikal dan horizontal akan

massal.

“saudara tua” serta masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok atau yakni teman sejawat, kekuatan ekonomi, kekuatan politik/pemerintah dan TNI atau bersifat horizontal adalah intervensi yang dilakukan oleh pihak *extra judicial*, penyidikan yang dilakukan oleh reserse sebagai bawahannya. Sedangkan intervensi yang yang dilakukan oleh atasan yang mempunyai kepentingan secara pribadi terhadap intervensi yang bersifat horizontal. Intervensi yang bersifat vertikal, yakni intervensi Polsek Depok. Intervensi yang dimaksud adalah intervensi yang bersifat vertikal dan keadilan pada peradilan pidana, dalam hal ini di Polda DIY, Polres Sleman dan dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan dari TNI masih sering terjadi intervensi terhadap bekerjanya lembaga kepolisian Dalam realitas meskipun lebih dari 1 tahun terpisahnya Lembaga Kepolisian



kasus yang ditangani oleh bawahan dalam hal ini penyidik. yang dilakukan oleh polisi, karena atasannya mempunyai kepentingan terhadap

1. Ada kecenderungan masih terjadi intervensi dari atasannya terhadap penyidikan

berikut ini:

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai

tahu adalah penyidik.

menghormati dilaksanakannya/tidak perlu diadakan rekonsultasi, padahal yang lebih melakukan tindak pidana. Disamping itu dalam kasus pembunuhan, advokat sering berkaitan dengan penahanan, agar tahanan dilepas atau ditunda karena tidak terbukti mengintervensi yang berkaitan dengan penahanan dan rekonsultasi. Intervensi yang Terhadap advokat atau penasehat hukum, menurut pandangannya sering

kepentingan dengan kasus yang dalam proses penyidikan.

Disamping itu, penuntut umum sering memberikan SP3 karena mempunyai biasa tetapi penuntut umum memberi petunjuk sebagai pembunuhan berencana. bukti, ada saksi, ada pengakuan. Oleh penyidik diterapkan ancaman pembunuhan diberikan sulit dimengerti, pada hal penyidik sudah berusaha maksimal ada barang dimengerti dengan mudah oleh penyidik. Namun juga sering terjadi petunjuk yang dikembalikan disertai petunjuk dari penuntut umum dan petunjuk tersebut bisa membantu dan kadang-kadang menghambat. Dikatakan membantu, jika BAP yang hukum dalam peradilan pidana, untuk terwujudnya kemandirian kadang-kadang Menurut pandangan informan berkaitan dengan catur wangsa aparat penegak

jalan.

penyidik tidak bisa berbuat banyak terpaksa tahanan dilepas meskipun perkara tetap segera dikeluarkan dari tahanan, dan akan melakukan pengrusakan. Akhirnya mendatangi Polres Sleman dengan ancaman minta ditahan, jika temannya tidak tersangka, tetapi masyarakat tidak bisa menerima. Masyarakat satu kampung, Obong". Dalam kasus tersebut polisi menangkap beberapa orang yang menjadi isterinya yang sedang hamil tua, sehingga kasus tersebut dikenal "Kasus Anoman

2. Ada kecenderungan polisi penyidik mempunyai suatu keberanian untuk mempertimbangkan intervensi dari atasan dengan dampak dari kasus yang terjadi dalam masyarakat.

3. Ada kecenderungan intervensi semakin marak berasal dari masyarakat secara massal terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan secara massal yang sedang dalam penyidikan.

4. Ada kecenderungan belum terwujudnya koordinasi antara aparat penegak hukum antara polisi dengan jaksa dan penasehat hukum, sehingga menghambat kemandirian polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana.

5. Ada kecenderungan dari jaksa penuntut umum yang menghambat kemandirian polisi dalam penyidikan yakni dengan mengintervensi karena mempunyai kepentingan pribadi terhadap kasus yang ditangani oleh polisi penyidik

6. Ada kecenderungan dari penasehat hukum yang menghambat kemandirian polisi dalam penyidikan, yakni mengintervensi terhadap penanganan dan rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi penyidik.

Dari identifikasi tersebut di atas menunjukkan bahwa polisi penyidik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum masih sering diintervensi baik dari atasan (vertikal) maupun dari masyarakat, penasehat hukum dan jaksa (horizontal), sehingga menghambat kemandirian polisi dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

## Polisi 2

Penuturan seorang informasi yang berkedudukan sebagai penyidik pembantu bekerja di lingkungan Polres Sleman mengemukakan, bahwa sebagai pembantu penyidik merasa belum pernah diintervensi, karena dalam menjalankan tugas kalau kasus yang ditangani menonjol baru dipanggil oleh wakasat atau kasat, tetapi kalau

wakasat atau kasat ada intervensi tidak tahu. Lebih lanjut informan mengemukakan berkaitan dengan kode 86 (dihentikan) dan kode 87 (pengertian ditunjukkan), hal ini sebenarnya berkaitan dengan masalah uang untuk mengungkap suatu kasus, misalnya untuk menemukan barang yang berkaitan dengan curamur, jika tidak ada uang kode 86 tetapi kalau ada uang kode 87. Lebih lanjut menyatakan, bahwa masyarakat kadang-kadang menawarkan biaya untuk penanganan kasus yang dilaporkan, misalnya barang berada di luar Jawa atau luar DIY, sehingga ada biaya polisi bersedia membantu, karena dari biaya operasional memang sangat kurang. Menurut pandangan informan terhadap komentar advokat, legislatif dan eksekutif yang ada di daerah berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani sebagai pelaksana tidak berpengaruh, tapi kalau kapolres, kasat dimungkinkan bisa berpengaruh, karena tugas kapolres dan kasat tidak sekedar mengawasi penyidik yang ada di lapangan saja melainkan juga menjaga hubungan baik dengan instansi lain/melayani, itu masih ada. Namun yang sering mempengaruhi adalah adanya ancaman dari instansi sampling yakni "saudara tua", karena mempunyai kepentingan dengan kasus tersebut dan masyarakat sipil sering nyebu dan memberi ancaman yang berkaitan dengan kasus penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan secara massal. Masyarakat sering membela tersangka dan menentang penyidik melakukan penggeledahan, akibat dari anggota polisi penyidik yang tidak sebanding, kadang-kadang melakukan diskresi tidak melakukan penggeledahan. Intervensi juga sering terjadi dari pelapor sendiri minta si pelaku agar ditahan, tetapi sebaliknya dari penasehat hukum tersangka minta agar penanganan tersangka ditangguhkan atau tersangka dilepas dari tahanan. Lebih lanjut informan mengemukakan kewenangan tahan menahan adalah kewenangan kasat, barang kali dimungkinkan terjadi (informan memberi isarat non verbal dengan memberi kode memainkan jari-jarinya yang dapat dindikasikan dengan uang).

Dari penjelasan informan polisi selaku penyidik tersebut di atas menunjukkan bahwa:

Polisi selaku informan mengemukakan, bahwa selama ini lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum belum mempunyai kemandirian secara penuh. Namun apabila dibandingkan dengan masa lalu sebelum 1 April 1999 sedikit ada perbedaan. Meskipun kadang-kadang masih ada intervensi dari atasan dalam bentuk "komunikasi" minta kasus yang sedang ditangani untuk dipending. Terhadap permintaan tersebut, ada keberanian untuk mempertimbangkan tidak seperti masa lalu tidak ada keberanian untuk menolak. Terutama dalam hal keterlibatannya dalam kasus narkoba paling-paling hanya membantu untuk mengurangi barang bukti saja. Untuk saat sekarang intervensi yang sangat menonjol justru dari masyarakat, misalnya berkaitan dengan penahanan dan barang bukti. Contoh kasus yang berkaitan dengan penahanan terjadi intervensi dari masyarakat karena pembunuhan

Polisi 3

oleh penyidik polisi.

5. Intervensi juga sering terjadi dilakukan oleh individu baik pelapor maupun penasehat hukum tersangka yang berkaitan dengan penahanan yang dilakukan

penyidik.

4. Sering terjadi intervensi dari masyarakat, terhadap kasus penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan secara massal yang sedang ditangani oleh polisi

oleh polisi.

3. Masih sering terjadi intervensi dari "saudara tua", karena mempunyai kepentingan terhadap kasus yang sedang dalam penyidikan yang dilakukan

baik antara instansi pemerintah dengan lembaga kepolisian.

2. Ada kecenderungan masih ada intervensi dari instansi pemerintah terhadap kasus yang sedang ditangani oleh penyidik, karena untuk menjaga hubungan

biaya yang masih kurang.

1. Ada kecenderungan polisi penyidik untuk diintervensi oleh masyarakat/pelapor dalam mengungkap suatu kasus curamur, karena alasan

yang dilakukan secara massal terhadap pencuri ayam yang terjadi di Sawit Sari Condongcatur, yang merupakan wilayah hukum Polsek Depok. Ada beberapa pelaku pembunuhan yang ditahan, kemudian masyarakat satu kampung berbondong-bondong mendatangi Polsek untuk meminta ditahan semua, karena merasa membunuh. Akhirnya informan tidak dapat berbuat banyak yang berakibat tersangka dikeluarkan dari tahanan, karena tidak mungkin memenuhi keinginan masyarakat satu kampung tersebut untuk ditahan. Lebih lanjut informan mengemukakan, bahwa terhadap intervensi tersebut polisi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Di samping itu apabila terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan laporan /penyerahan masyarakat tetap diproses, kecuali kasus dari teman polisi biasa ada pertimbangan dengan catatan apabila kasus tersebut tidak termasuk kasus yang meresahkan masyarakat. Hal ini dilakukan atas persetujuan dari pihak korban. Jadi langkah pertama yang dilakukan polisi adalah mendamaikan terlebih dahulu.

Dari penjelasan informan polisi penyidik tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Ada kecenderungan intervensi dari atasan terhadap kasus yang sedang dalam proses penyidikan, karena atasan berkepentingan terhadap kasus yang sedang ditangani penyidik sebagai bawahannya.
2. Bentuk intervensi dari atasan berupa komunikasi minta agar kasusnya dipending.
3. Meskipun diintervensi, ada keberanian polisi penyidik untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi dalam masyarakat tidak seperti masa lalu tidak mempunyai keberanian untuk menolak.
4. Ada kecenderungan polisi selaku penyidik mengurangi barang bukti, karena intervensi dari atasan yang terkait dengan kasus narkoba.

Penasehat Hukum

Penuturan seorang informan penasehat hukum mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya polisi dalam penegakan hukum supaya tidak ada intervensi dari pihak lain, baik dari bupati, militer atau TNI atau dari masyarakat sendiri, misalnya masyarakat yang menyogok/kolusif dengan polisi yang mengungkap suatu kasus. Menurut intervensi itu dapat berupa intervensi kekuasaan, ekonomi sehingga polisi tidak menjadi mandiri. Lebih lanjut informan mengemukakan, bahwa kemandirian itu penting karena karakter hukum adalah objektivitas, dimana keadilan itu memerlukan suatu objektivitas, sehingga dalam penegakan hukum tidak bias/melenceng dari kebenaran dan keadilan. Karena kebenaran harus berdasarkan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu kemandirian tersebut sangat penting dalam mencapai keadilan dan kebenaran. Bukan berarti, kemandirian itu tidak ada atasan atau kontrol. Apabila hal itu terjadi, maka kemandirian tersebut dapat berarti anarkhi. Untuk itu penting bagi lembaga kepolisian mempunyai kemandirian dalam hal praktik penegakan hukum yang diatur secara baku di dalam KUHAP, sehingga ada standarnya supaya penyelidikan dan penyidikan, pembuatan BAP, penggeledahan, penahanan dan penyitaan ada standar bakunya. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, bisa saja lembaga

Uraian tersebut di atas merupakan pandangan dari informan selaku penyidik mengenai belum terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Untuk memperjelas gambaran tersebut perlu kiranya dikemukakan pandangan dari aparat penegak hukum yang lain yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana, yakni dari penasehat hukum, penuntut umum (jaksa) dan pengadilan (hakim) berikut ini.

5. Ada kecenderungan polisi selaku penyidik untuk bernegosiasi yang berakibat dimungkinkannya terjadinya kolusi untuk menghentikan kasus yang sedang dalam penyidikan.

- kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan bisa diintervensi, misalnya disogok/diintervensi dari atasannya, karena ada hubungan keluarga dengan atasannya. Menurut pandangan informan sampai sekarang belum ada kemandirian dari polisi dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (masih jauh dari kemandirian) yang terjadi di Yogyakarta (menurut pengalamannya) yang tidak bisa diungkapkan pada saat wawancara dilakukan. Lebih lanjut informan memberikan contoh dalam kasus Udin, di mana polisi tidak ada kemandirian, dalam arti tidak memproses BAP nya itu sendiri, berarti ada intervensi dari aparat militer, dalam hal ini ada penyimpanan yang dilakukan oleh polisi. Dalam praktek banyak juga, ketidak mandirian polisi dari intervensi ekonomi/kekuatan modal, hal ini juga banyak dialami oleh sebagian besar advokat. Informan lebih lanjut memberikan contoh kasus yang dialami sebagai penasihat hukum kasus narkoba, dimana polisi meminta *handphone* dari para tersangka narkoba. Dari kasus tersebut LKBH UII minta agar hal tersebut dipublikasikan. Setelah dipublikasikan *handphone* tersebut dikembalikan pada para pihak/tersangka.
- Dari penjelasan informan tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:
1. Ada kecenderungan polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan diintervensi oleh atasan karena ada kepentingan pribadi terhadap kasus yang ditangani oleh polisi.
  2. Ada kecenderungan polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan diintervensi oleh masyarakat dengan memberi uang sogok.
  3. Ada kecenderungan intervensi dari "saudara tua" (anggota militer) yang berkepentingan terhadap kasus yang sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik.
  4. Ada kecenderungan intervensi dari kekuatan ekonomi

##### 5. Ada kecenderungan polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan diintervensi oleh kekuatan politik.

Jaksa

Informan jaksa mengemukakan, bahwa kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam peradilan pidana maksudnya polisi dalam penyidikan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk atasan. Namun apakah hal tersebut bisa terjadi. Informan lebih lanjut memberikan contoh kasus tentang kecelakaan lalu lintas. Dalam kecelakaan tersebut penyidik telah menyelesaikan penyidikan. Ternyata sopir yang menabrak tersebut bapaknya sebagai guru mengaji atasan penyidik. Setelah kasus tersebut dilanjutkan, kemudian guru mengaji tersebut lapor kepada atasan penyidik. Kemudian atasan penyidik memerintahkan kepada penyidik supaya kasus tersebut tidak dilanjutkan. Karena perkara sudah sampai di Kejaksaan, informan menanyakan kepada penyidik mengapa kasus tersebut tidak boleh dilanjutkan?. Ternyata penyidik menceritakan sebagai berikut: telah diuraikan informan penuntut umum. Sampai sekarang (pen. mengadakan wawancara) penyidik tidak bisa mengirim barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan (kemungkinan tidak dikirim). Lebih lanjut informan mengemukakan, bahwa mandiri itu artinya tidak dipengaruhi oleh pihak lain maupun intern polisi sendiri. Pihak lain yang dimaksud adalah TNI atau dari masyarakat.

Menurut pandangan jaksa intervensi dari masyarakat sering terjadi di wilayah hukum Sleman, sebagai contoh kasus pengroyokan/penganiayaan yang berakibat kematian dilakukan oleh masyarakat satu kampung yang dikenal dengan kasus "Anoman Obong". Dari kasus tersebut ada beberapa orang ditahan sebagai tersangka, tetapi masyarakat satu kampung tidak bisa menerima, karena merasa juga melakukan penganiayaan, apabila mereka ditahan masyarakat satu kampung juga minta ditahan. Akhirnya polisi selaku penyidik bimbang dan ini betul-betul terjadi di Polres Sleman. Akhirnya tahanan tersebut oleh polisi penyidik dilepas dari tahanan, meskipun perkarnya tetap dilanjutkan. Lebih lanjut informan mengemukakan,



Penuntutan seorang informan hakim yang baru bertugas selama 3 (tiga) bulan (pen. saat diadakan wawancara) di Pengadilan Negeri Sleman mengemukakan, bahwa yang dimaksud kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum adalah polisi selaku penyidik dalam peradilan pidana kewenangannya tidak dintervensi baik langsung maupun tidak langsung atau dapat bersifat intern dan ekstern. Intervensi yang bersifat intern adalah intervensi dari instansi terkait, yakni dari atasan, sedang intervensi yang bersifat ekstern berasal dari luar instansi terkait (atasan polisi penyidik). Lebih lanjut informan hakim mengemukakan, bahwa intervensi ekstern biasanya intervensi

Hakim

4. Ada kecenderungan intervensi juga sering terjadi di lembaga kejaksaan.
  3. Ada kecenderungan ada kesulitan dari polisi selaku penyidik dalam hal menghadapi kasus penadap curamnor terlibat "saudara tua".
  2. Ada kecenderungan ketidak mandirian polisi selaku penyidik, karena adanya penganiayaan secara massal oleh masyarakat satu kampung.
  1. Ada kecenderungan intervensi dari atasan terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh polisi, karena atasan mempunyai kepentingan dengan kasus tersebut.
- Dari penjelasan informan penuntut umum tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:
- bahwa intervensi itu tidak hanya dari masyarakat saja tetapi sering terjadi dari "saudara tua", seperti dalam kasus seorang wanita salon yang bekerjasama dengan "pencuri (Curamnor) di mana "saudara tua" sebagai penadap, polisi kesulitan untuk melakukan penyidikan. Informan lebih lanjut mengemukakan, bahwa ketidak mandirian sebenarnya tidak hanya terjadi pada polisi selaku penyidik tetapi juga sering terjadi di lembaga kejaksaan.

Intervensi yang bersifat vertikal ini dilakukan oleh atasan yang mempunyai kepentingan secara pribadi terhadap perkara yang sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh reserse sebagai bawahannya. Terjadinya intervensi yang bersifat vertikal ini, lebih-lebih jika terjadi suatu kasus melibatkan atasan atau keluarganya Cara mengintervensi dilakukan dalam bentuk komunikasi "minta dibantu" atau keadilan pada peradilan pidana.

vertikal maupun horizontal terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan Dari uraian tersebut menunjukkan masih adanya intervensi baik yang bersifat

kode 86 dalam melaksanakan penyidikan.

4. Ada kecenderungan baik dari polisi maupun masyarakat masih berlakunya

penyidik dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.

3. Ada kecenderungan intervensi dari masyarakat terhadap bekerjanya polisi

menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.

2. Ada kecenderungan intervensi dari atasan terhadap bekerjanya polisi dalam

fungsi penegakan hukum belum mandiri.

1. Ada kecenderungan bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan

hal sebagai berikut:

Dari penjelasan informan hakim tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa

karena masih berlaku kode 86 (damai).

mendukung kemandirian, bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum, tentu saja harus profesional. Selama ini masyarakat kurang menciptakan iklim yang pandangan lembaga kepolisian bisa mandiri dalam melakukan penegakan hukum Pengadilan Negeri Sleman dikenal dengan kasus "Anoman Obong". Menurut secara massal, di mana masyarakat main hakim sendiri/mengadili sendiri di untuk menemukan tersangka dalam penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan terhadap kewenangan penyidik dari masyarakat yang bersifat kasuistis, misalnya

Intervensi dari kekuatan ekonomi dalam proses penyidikan, yakni berupa pemberian dana dari masyarakat dan para pengusaha atau badan usaha yang merupakan uang sogok tidak hanya kasus atau yang dilakukan oleh oknum, melainkan praktik resmi di lembaga kepolisian dengan istilah "mencari dana

Intervensi yang bersifat horizontal dilakukan oleh teman sejawat, kekuatan ekonomi dan kekuatan politik, "saudara tua" serta masyarakat pelapor/pengadu baik secara individu maupun secara massa/kelempok. Intervensi dari teman sejawat terjadi jika dalam suatu kasus melibatkan teman sejawat atau keluarganya, sedang intervensi yang bernuansa politis atau kekuatan politik, terjadi jika untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mempunyai kaitan jabatan strategis, sehingga reserve tidak bisa dibuat sesuai dengan prosedur penyidikan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intervensi ini baik bersifat lokal maupun nasional yang selama ini terlalu kuat di lembaga kepolisian yang berasal dari luar lembaga yudisial, sehingga kepolisian secara substansial tidak mempunyai kemandirian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Hal tersebut sampai sekarang belum banyak terlihat adanya perubahan yang cukup berarti, meskipun intervensi secara politis agak menurun tetapi pengaruhnya secara psikologis sepenuhnya belum hilang. Di samping itu ada kewajiban polisi untuk menjalin adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah (lokal). Lebih-lebih jika terjadi kasus yang melibatkan "saudara tua" polisi penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan sehingga menjadi kendala terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

"minta dipending". Menghadapi hal yang demikian munculi delimitasi dari penyidik, sehingga mengambil sikap bersedia membantu sepanjang kasus tersebut tidak membawa dampak yang besar dalam masyarakat, berbeda pada masa sebelum reformasi penyidik tidak mempunyai keberanian untuk menolak.

Keterbatasan anggaran benar-benar dirasakan baik di tingkat Polsek, Polres maupun tingkat Polda. Dari semua informan menyatakan adanya kekurangan anggaran operasional yang pada gilirannya memunculkan sejumlah eksekusi di lapangan karena tugas tetap harus dilaksanakan. Untuk mengatasi dana operasional tersebut dengan meminta pengertian dari masyarakat pelapor/pengadu untuk memberi bantuan atau sumbangan yang dikenal dengan uang "parmas", "susu", dan "komando" sebagai bentuk ucapan terima kasih atas selesainya perkara hukum. Hal ini sering terjadi yang berkaitan dengan kasus dan terkait dengan peninjauan barang bukti. Di samping itu penyelesaian perkara hukum tersebut terutama terkait dengan kewenangan diskresi yang dimiliki polisi. Biasanya masyarakat yang perkaranya didonir akan memberikan ungkapan terima kasih. Ditemukan istilah yang khas untuk hal ini, yaitu "kasus di-86-kan". Artinya sebuah perkara dihentikan penyidikannya. Sebagai imbalan, pihak yang dirugikan dalam perkara memberi imbalan kepada polisi penyidik. Data dari wawancara dengan informan polisi selaku reserse menyatakan bahwa dasar pemberian itu adalah ungkapan tulus perasaan terima kasih dari masyarakat. Data wawancara dengan informan selain polisi selaku reserse menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa pemberian itu karena permintaan

### 3. Keterbatasan anggaran untuk operasi/penyidikan

terhadap isu-isu korupsi dan kolusi.

Penyelebaran di tingkat organisasi/lembaga kepolisian ini menjadi model bagi anggota reserse untuk menyeleksi kewenangannya. Mereka tidak sensitif terhadap masalah/kelompok, terjadi jika dalam kasus melibatkan massa atau kelompok secara masal/kelompok, sedangkan intervensi yang dilakukan oleh masyarakat penanganan dan rekonstruksi, sedangkan intervensi yang dilakukan dengan keluarga tersangka atau penasehat hukum tersangka yang berkaitan dengan intervensi dari masyarakat secara individu sering terjadi jika individu atau

Untuk terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terhadap kewenangan lembaga kepolisian sebagai penyidik yang

1. Aspek Hukum atau Peraturan Perundang-undangan.

9. Aspek Kultur Polisi Penyidik.

8. Aspek Moral Polisi Penyidik.

7. Aspek Masyarakat.

6. Aspek Personil Polisi Penyidik.

5. Aspek Anggaran, Sarana dan Prasarana.

4. Aspek Sumber Daya Manusia Polisi Penyidik.

3. Aspek Pemerintah (*Political Will*).

2. Aspek Struktur Organisasi.

1. Aspek Hukum atau Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa aspek yang berperan menunjang terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada peradilan pidana, yaitu :

## **B. Aspek-aspek Yang Berperan Menunjang Dalam Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian Dalam Menyelenggarakan Fungsi Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Keadilan Pada Peradilan Pidana**

yang memaksa dari polisi reserse baik secara verbal maupun non verbal. Bentuk non verbal polisi selaku reserse akan mempersulit urusan. Kebiasaan tersebut mempunyai efek negatif yang berakibat polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam peradilan pidana tidak mandiri.

Kemandirian Polri mulai muncul pasca-Kemerdekaan Indonesia dan mengalami puncaknya pada periode 1950-1959 (pada masa UDS) yang terlihat di bidang penegakan hukum maupun pembinaan ketika Polri berada di bawah dan

## 2. Aspek Struktur Organisasi

Polri bagian dari ABRI. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menetapkan merupakan bagian integral dari ABRI. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1988 tentang Keprajuritan ABRI Berdasarkan kedua undang-undang tersebut Polri Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok sebagai bagian TNI atau ABRI. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud perundang-undangan yang masih mengkaitkan dengan status dan kedudukan Polri terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan Berkaitan dengan uraian tersebut, kiranya perlu segera dilakukan revisi peradilan umum.

bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan yang diatur dengan undang-undang. Sebaliknya dalam Pasal 7 ayat (4) dinyatakan, berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan umum; (b) Apabila peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 (Pasal 3 ayat (4)), yaitu (a) Prajurit terhadap Polri dan TNI sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Polri dari TNI menyebabkan perubahan dalam yurisdiksi peradilan yang berlaku keberadaan kepolisian yang mandiri dan profesional. Apalagi dengan terpisahnya pidana. Hal ini penting karena salah satu tonggak supremasi hukum adalah mandiri dan terpadu dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan polisi penyidik, menginformasikan berada di bawah Departemen Kepolisian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berbeda dengan informan selain polisi penyidik, untuk

penyidik dan informan selain polisi penyidik sebagai berikut.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai struktur organisasi lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana, perlu kiranya dikemukakan pandangan dari informan polisi

dari Panitia Khusus DPR yang sudah disampaikan kepada Polri.

“Bulogate” terlihat ada keengganan/tidak segera menindak lanjutinya adanya keterangan menangkap Tomi dalam kasus peledakan BJJ dan dalam kasus “Bruneigate” dan aktual mengenai pemberhentian Kapolri Rusdihardjo oleh Presiden karena tidak kasus yang sedang proses penyidikan oleh polisi penyidik. Contoh kasus masih ada intervensi dari eksekutif bila eksekutif mempunyai kepentingan dengan karena Polri hanya bertanggung jawab kepada eksekutif, sehingga dimungkinkan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, kemandirian operasional polisi selaku penyidik dalam menyelenggarakan fungsi Asasi Manusia serta TNI. Hal ini memunculkan permasalahan jika dikaitkan dengan lembaga-lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan Hak dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berarti Polri sejajar dengan Secara kelembagaan kemandirian Polri tampak dari penempatannya di bawah

personil, kualitas profesi, peralatan hingga anggaran dan kesejahteraan.

mengandung makna berbagai hal, dari aspek operasional dan kelembagaan, jumlah VI/MPR/2000 mengawali pembahasan Polri menuju kemandiriannya. Hal ini dapat Nomor 89 Tahun 2000 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Lainnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden

pemerintahan yang terjadi, dan akhirnya diintegrasikan dalam tubuh ABRI.

tahun 1959-1999 karena Polri ditarik kesana-kemasi oleh pergeseran politik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Kondisi tersebut terhenti sejak

<sup>75</sup> Syamsudin Haris: Dipisah dari ABR1, Mengapa Di Dephankam, "Ini Adalah Perceraian Setengah Hati", Dalam Kunarto, *Polri Mandiri*, Cipta Manunggal, Seri: Merenungi Kritik Terhadap Poli, Buku ke 4, Cipta Manunggal, 1999, hlm. 28.

<sup>76</sup> Kunarto, *Beberapa Faktor Penyebab Kultur Poli Permasalahan dan Pemetaan Pemikiran*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Kultur Baru Poli", di UGM, Yogyakarta, 23 September 1999, diselenggarakan oleh PSKP-UGM bekerjasama dengan POLDA Jawa Tengah dan POLDA DIY, hlm. 3.

Kalau peran sebagai penegak hukum kepentingannya dianggap menonjol, maka polisi dikelompokkan menyatu dengan *Criminal Justice System*, polisi akan menjadi bagian dari Departemen Kehakiman. Kalau peran sebagai pembina ketertiban umum kepentingannya dianggap menonjol, maka polisi akan ditempatkan berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Kalau peran sebagai penyelenggara keamanan yang menjadi pertimbangan menonjol, maka polisi akan ditempatkan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas Kunarto mengemukakan, bahwa kepentingan menentukan kelembagaan yang kemudian menentukan kultur Poli.<sup>76</sup> Jika jenis kepolisian sudah pasti ditetapkan selaras dengan demokratisasi suatu negara, penajaman harus dilakukan pada departemen manakah polisi harus diletakkan. Masing-masing negara mempunyai perspektif yang berbeda-beda dan sepenuhnya adalah kepentingan utama pemerintahan/kenegaraan yang mereka pahami.

Sesuai dengan pendapat informan selain polisi tersebut di atas adalah Syamsudin Haris mengemukakan, bahwa dalam konteks luas pemisahan Poli-TNI bukan langkah yang substansial untuk tegaknya hukum. Perubahan yang terpenting justru harus dimulai dari pemisahan peran yang konkrit dari 3 lembaga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tempat polisi ada pada yudikatif akan membantu pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif.<sup>75</sup>

Keberadaan Poli lebih tepat di bawah kekuasaan kehakiman. penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana mewujudkan kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi



Political will dari pemerintah harus betul-betul menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah yang tinggi yang menunjukkan polisi sungguh-sungguh sebagai pintu gerbang peradilan pidana atau merupakan organisasi terdepan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Hal tersebut tentu

### 3. Aspek Pemerintah (political will)

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dan sesuai dengan dicanangkannya penegakan supremasi hukum pada agenda reformasi, maka lebih tepat kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana ditempatkan di bawah kekuasaan kehakiman. Tentu saja yang menetapkan seharusnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ditekankan oleh DPR melalui produk Undang-Undang. Dengan begitu penilaian peran Polisi yang dianggap paling tajam dan dominan benar-benar ditetapkan atas kearifan rakyat yang melalui perwakilannya. Dan tidak ditetapkan oleh pemerintah yang cenderung bermuatan kepentingan penguasa. Penetapan Undang-Undang tersebut sekaligus menghapus semua Undang-Undang yang menyatakan keberadaan Poli sebagai bagian dari ABRI, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketuntasan-Ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Keprajuritan ABRI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun kalau kearifan pemerintah mengingatkan semua fungsi polisi itu dapat dilaksanakan secara terpadu dan penentuan kebijakannya harus dilaksanakan secara seimbang dan terpadu, maka polisi harus diberi kepercayaan mengelola dirinya sendiri secara profesional, Efektif, Efisien dan Modern (PEEM) Dia harus diberi otonomi yang cukup dan mandiri-langsung membawah kepada Presiden, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen seperti Kejaksaan Agung.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia polisi penyidik tersebut ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam rangka kemendiriannya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai polisi selaku penyidik dapat mengatasi perkembangannya kejahatan baru maupun kejahatan konvensional. Demikian halnya dengan pendidikan keilmuan akan membuka dan menghadapi polisi pada pikiran-pikiran yang lebih liberal, artinya tidak sempit dan otoriter. Dengan kecenderungan akan memperluas cakrawala pengetahuan

Sumber daya manusia polisi sebagai penyidik belum memadai terutama pada tingkat Polsek Depok dan Polres Sleman. Meskipun dilihat dari struktur organisasi serse sudah dikelompokkan dalam Bagian (Polda) dan Unit-Unit serse sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang terjadi tetapi dalam melakukan penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan khususnya untuk tingkat Polres dan Polsek belum ditangani sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang bersangkutan melainkan masih ditangani oleh serse umum.

#### 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Penyidik

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas polisi selaku penyidik sehingga menjadi penyidik yang mandiri dan profesional, pemerintah bersama parlemen harus mempunyai kemauan politik, misalnya meningkatkan anggaran. Meningkatkan anggaran polisi merupakan suatu keharusan. Apalagi sekarang ini Polri juga diserahi tanggungjawab menjaga keamanan dalam negeri. Bagaimana seorang polisi bisa melaksanakan tugas sementara kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Dengan demikian *political will* pemerintah mempunyai peran yang penting dalam menunjang kemendirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

saja harus didukung oleh kemampuan dan kualitas polisi selaku penyidik dalam penegakan hukum.

Sebenarnya dari aspek anggaran bukan merupakan hal yang sangat pokok, tetapi juga penting. Kebiasaan mencari dana sendiri dalam menggunakan suatu kasus mempunyai efek negatif. Berkaitan dengan anggaran untuk operasional dari semua informan polisi maupun informan selain polisi menyatakan sangat minim dan sering kali polisi mengeluh. Hal ini dirasakan apabila menggunakan suatu kasus di mana pelakunya berada di luar DIY dalam hal ini berada di Luar Jawa. Pada hal mereka memerlukan, makan, minum, bensin untuk kendaraan. Akibat dari anggaran yang belum memadai mereka minta bantuan kepada korban. Jika hal tersebut berlanjut akan menimbulkan efek yang negatif yakni dikawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang dari polisi penyidik untuk melakukan pemersan kepada korban/pelapor. Untuk itu negara harus memperhatikan anggaran untuk penyidikan

##### 5. Aspek Anggaran, Sarana dan Prasarana

mereka terima itu kedalam pelaksanaan penyidikan.

polisi sebagai penyidik, sehingga polisi dapat meramu sendiri pengetahuan yang

Hal tersebut baru dapat diharapkan jika ada perubahan model penyidikan.

Pendidikan masa lalu, dibangun berdasarkan sendi-sendi sistem pendidikan ABRI, yang bersifat militeristik, sehingga tidak mustahil menghasilkan anggota Polri yang bersifat militeristik. Untuk itu perlu dilakukan perubahan model pendidikan kepolisian yang *civilized*, yang tidak hanya menerima/menunggu perintah saja, represif saja, arogan dan tidak menghargai hak asasi manusia. Khusus untuk pendidikan calon polisi penyidik perlu adanya perubahan pendidikan yang mendasar, yakni lebih ditekankan pendidikan kejuruan dan dimasukkannya pendidikan tentang HAM yang menunjang operasional polisi sebagai penyidik dengan tidak mengesampingkan pendidikan disiplin dari unsur militer. Sedangkan bagi polisi selaku penyidik yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan perlu studi lanjut atau diikuti sertakan dalam pelatihan atau penataran-penataran yang relevan dengan tugas polisi selaku penyidik.

yang dilakukan oleh polisi. Di samping anggaran untuk operasional juga perlu diperhatikan anggaran untuk kesejahteraan polisi. Hal ini juga dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa polisi yang profesional dan kompeten yang kita inginkan hanyalah mungkin, apabila bayaran gaji dan lain-lain memadai. Polisi hendaknya tidak perlu menambah pendapatan di luar gaji yang resmi diterimanya. Apabila kita betul-betul menghargai polisi, hal tersebut harus tercermin dalam gajinya.<sup>77</sup> Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kemandirian pekerjaannya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana diperlukan anggaran operasional yang memadai. Sehingga dengan kesejahteraan yang baik dari polisi selaku reserse, dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana tidak mudah diintervensi dari kekuatan ekonomi dan tidak ada lagi kebijakan lembaga kepolisian untuk mencari dana sendiri dalam penyidikan oleh polisi.

Dilihat dari sarana dan prasarana kurang memadai baik di tingkat Polsek maupun Polres maupun Polda. Demikian juga alat komunikasi yang dimiliki terutama oleh Polres Sleman dan Polsek Depok sangat minim. Sementara pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan tidak lagi secara konvensional melainkan dengan cara yang semakin canggih yang berkembang di wilayah Polsek, Polres maupun wilayah Polda.

## 6. Aspek Personil

Menurut Awaludin Djamin kemandirian Poli dapat diartikan sebagai, pertama, mandiri operasional dan pembinaan (sudah dapat dimulai semenjak di bawah Dephankam sekarang ini). Kedua, mandiri dalam arti cukup jumlah personil (misalnya menuju pada 1: 750), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian,

<sup>77</sup> Frans Magnis Suseno, *Polisi, Negara Hukum dan Demokrasi Sebagai Catatan Dari Sudut Filsafat*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia V tentang Peran Polisi Sebagai Akselerator Demokrasi Masyarakat Indonesia, Yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Kepolisian FH UNDIIP-Polda Jawa Tengah, Semarang, 22 Nopember 2000, hlm. 10.

ketrampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri dan sebagainya yang tentunya akan memerlukan waktu yang lebih panjang.<sup>78</sup>

Dari aspek personil Polri dikelompokkan sebagai organisasi yang besar, hal ini dilihat dari jumlah anggota Polri yang sudah mencapai 200 ribu di Indonesia Namun jumlah personil tersebut dihadapkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 220 juta orang sehingga ratio perimbangan masih berkisar 1 Polisi : 1.100. Padahal ratio perimbangan ideal adalah sekitar 1 Polisi : 500 penduduk, sehingga dilihat dari segi jumlah kekuatan polisi saat ini masih kurang.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas ratio polisi dengan jumlah penduduk di DIY tidak ratioanl, yakni 1 : 725, Wilayah Polres Sleman 1 : 825 dan Wilayah Polsek Depok 1 : 2005, sehingga dilihat dari ratio perimbangan jumlah penduduk dengan polisi di wilayah DIY, Sleman dan Depok masih sangat kurang. Demikian juga rasional reserse dengan perkembangan kejahatan yang terjadi di DIY tidak rasional. Hal ini terlihat dari jumlah reserse baik di Polda DIY (52 personil), maupun di Polres Sleman (48 personil) dan Polsek Depok (20 personil). Oleh karena itu perlu penambahan personil reserse guna menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana khususnya untuk Polres dan Polsek.

<sup>78</sup> Awaludin Djamin, *Kemandirian Polri Pascapemisahan Dari dephankam*, Dalam Jurnal Polisi Indonesia, tahun: 1, September-April 2000, Program Pascasarjana kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bersama Dengan yasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 11.  
<sup>79</sup> Ahwil Luhutan, *Pemisahan TNI-POLRI Problematika dan Prospek*, Makalah disampaikan dalam Semiloka: Implikasi Reposisi TNI-POLRI Di Bidang Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 22-23 november 2000, hlm. 13.

## 7. Aspek Masyarakat

Aspek masyarakat dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi kepercayaan masyarakat dan segi kesadaran hukum masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kemandirian polisi dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Tetapi akhir-akhir ini sering terjadi masyarakat tidak terkendali sehingga tindakannya seperti anarkhi atau suka main hakim sendiri. Sebagaimana yang terjadi di Sawit Sari Wilayah Hukum Polsek Depok seorang pencuri ayam dibunuh secara massal oleh masyarakat sekampung, pencuri sepeda motor dibakar di depan istrinya yang sedang hamil oleh masyarakat sekampung yang dikenal kasus “Anoman Obong” seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Sleman. Hal ini sebagai akibat prustasi sosial masyarakat antara lain melihat kenyataan tidak berubahnya hukum, penegakan hukum oleh polisi masih diskriminatif dan sebagian dari masyarakat belum bisa menerima dengan adanya sistem peradilan modern yang prosedural, birokratis. Di samping itu masyarakat merasa jengkel terhadap aparat penegak hukum terutama polisi. Hal ini sesuai informasi yang dikemukakan oleh informan penasehat hukum, bahwa banyak kliennya (90% klien LKBH adalah orang-orang/masyarakat yang tidak mampu) yang beranggapan bahwa dalam kasus yang dilaporkan kepada polisi dengan harapan segera tertangkap dan pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman tidak peduli ada barang bukti atau tidak, ada saksi atau tidak yang penting kasusnya cepat diungkap dan pelakunya dihukum berat. Tetapi kenyataannya prosesnya lama, paling-paling dijatuhi hukuman 3 bulan, keluar, mencuri lagi, lebih baik diadili sendiri saja.

Untuk itu dalam rangka kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana, perlu adanya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Hal ini dapat terwujud jika ada konsistensi polisi dalam proses pelaksanaan tugas dan wewenangya melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada peradilan pidana, sehingga tidak terjadi

intervensi dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam hal ini polisi selaku penyidik.

Sehubungan dengan arti pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum tersebut Farouk Muhammad mengemukakan, bahwa:

“kepolisian tidak mungkin berhasil menjalankan tugas untuk mencapai tujuan tanpa dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat akan datang jika: a) ada kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat lahir jika Polri mampu menyajikan layanan jasa kepolisian dan melalui proses hukum, dan b) kepolisian disenangi oleh masyarakat, untuk itu Polri dituntut dari sudut sosial kultural untuk berperilaku dalam melaksanakan tugas”<sup>80</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas Antonius Suyata mengemukakan, bahwa kemandirian suatu institusi semestinya dibangun oleh institusi itu sendiri melalui *performance* yang benar-benar prima. Kemandirian yang dibentuk dari dalam (*from within*) akan bersifat substansial serta hakiki sehingga pada akhirnya memperoleh pengakuan dari luar. Lebih lagi pengakuan tersebut akan mencerminkan nilai-nilai kewibawaan.<sup>81</sup>

Sependapat dengan kedua pendapat tersebut Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa:

“menegakkan wibawa hukum berarti mengembalikan kembali wibawa kepercayaan masyarakat, sehingga warga masyarakat tidak menghinai/menjaui aparat-aparat penegak hukum tetapi justru mempercayakan penyelesaian masalahnya kepada aparat/badan penegak hukum. Dalam hubungan inilah patut dimaklumi himbuan Kongres PBB ke-5 Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Geneva agar tidak menjadikan dirinya sebagai “cold and distant representative of authority” (anggota penguasa yang acuh dan tidak ramah), tetapi justru harus menjadikan dirinya sebagai “friends, partners and defenders of citizens”. Dan pada kongres ke-6 di Caracas sewaktu membicarakan masalah “recruitment and training” aparat penegak hukum, antara lain dinyatakan

---

<sup>80</sup> Farouk Muhammad, *Perubahan Perilaku Dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000-September 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI Bekejasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 31.

<sup>81</sup> Antonius Suyata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 143.

perluanya meningkatkan "mutual trust between police and the public" ("saling kepercayaan antara polisi dan masyarakat").<sup>82</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tegaknya hukum di Indonesia ini salah satu aspek yang terpenting terletak pada partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu polisi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat setempat di mana polisi menjalankan tugasnya.

Di samping kepercayaan masyarakat sebagaiimana telah dikemukakan, kesadaran hukum masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam rangka mewujudkan kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Namun demikian aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik juga harus koskuen, jangan hanya menuntut masyarakat menegakkan hukum, tapi justru dirinya mengabaikannya, misalnya bersedia untuk diintervensi dengan cara mereduksi perkara karena minta imbalan dari tersangka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum harus dimulai dari aparatnya sendiri. Sistem pengawasan secara internal harus lebih diefektifkan disamping itu perlu adanya pengawasan dari masyarakat baik oleh DPRD, media massa maupun oleh LSM. Oleh karena itu perlu segera direalisasi adanya Komisi Kepolisian yang secara khusus mengawasi perilaku polisi selaku penyidik. Karena dalam kasus pidana, polisi selaku penyidik merupakan ujung tombak dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus. Apabila polisi selaku penyidik tidak bersih yang merupakan bagian dari lembaga kepolisian dapat berakibat lembaga kepolisian juga tidak bersih, sebab meskipun yang tidak bersih hanya oknum polisi tetapi yang dikenal masyarakat adalah lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian yang tidak bersih akan menghambat kemandirian

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 6-7.



bekerjanya lembaga kepolisian itu sendiri dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat (termasuk aparat polisi khususnya polisi penyidik). Karena tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat (termasuk polisi penyidik), kemandirian tersebut sulit untuk diwujudkan.

#### 8. Aspek Moral

Dalam rangka terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum, moral dari aparat penegak hukum akan berpengaruh terhadap penegakan hukum. Dewasa ini sangat dirasakan adanya gelombang pasang penyimpanan moral, kebenaran selalu dalam posisi terancam untuk tenggelam. Penyimpangan moral selalu menjauihi dan mengingkari kebenaran.

Mengikuti pendapat Franz Magnis-Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikkannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan selaku peran tertentu dan terbatas.<sup>83</sup>

Moral merupakan pusat orientasi sikap dan perilaku manusia. Dalam hal ini, manusia diposisikan sebagai subjek yang bergerak, beraktualisasi, dan bereksistensi melalui berbagai peran sosialnya. Ini dari seluruh dinamika manusia adalah moral. Karena itu tinggi rendah moral seseorang menentukan tinggi rendah kualitas kepribadian sebagai manusia. Demikian juga halnya tinggi rendahnya kualitas polisi selaku aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan juga ditentukan oleh tinggi rendahnya moral yang mereka miliki. Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi tentu saja dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dengan yang tidak benar, sehingga dalam melaksanakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum

tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan apapun dan dari manapun. Dengan demikian aspek moral mempunyai peran yang penting untuk terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam peradilan pidana.

## 9. Aspek Kultur

Polisi yang hidup dalam suatu masyarakat juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dalam budaya kepolisian yang akan menjadi lingkungannya. Dalam kultur polisi terdapat beberapa tanda-tanda khusus, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Jacob Chwast yang dikutip oleh Artidjo Alkotsar: *The uniform, ceremonials, etiquette, power and authority, a unique set of duties, strong kinship and solidarity among policemen, a sense of isolation from the rest of the community and other occupations, and dangers that are shared by all police.*<sup>84</sup> Jadi adanya pakain seragam, seremonial, etiket, kekuasaan serta otoritas dan lain sebagainya yang dipunyai oleh polisi memberi ciri khas kepada organisasi kepolisian menerima dan memperkenalkan budaya polisi.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas polisi secara universal, polisi mempunyai karakteristik budaya tersendiri. Robert Reiner dalam bukunya *The Politics of The Police*, mengambil ide-ide Skolnick (1966) mengenai karakteristik budaya polisi yang menyebutkan:

1. Budaya polisi diwarnai oleh pelaksanaan tugas polisi yang bersifat perseorangan (*the policemen's "working personality"*), yang diwarnai oleh lingkungannya (*society generated culture*).

---

<sup>84</sup> Artidjo Alkotsar, *Membangun Kultur Polri Berpostur Sipil*, Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional "Membangun Kultur Baru Polri" oleh Pusat Studi Keamanan Dan Perdamaian UGM Yogyakarta, 23 September 1999, Hlm. 3.

2. Pelaksanaan tugas polisi berkaitan dengan peran polisi yang menganut dua variabel prinsip, yaitu bahaya dan kewenangan (*danger and authority*).
3. Lingkungan yang membangun budaya polisi adalah "the pressure put upon individual policemen to produce to be efficient rather than legal when two norms are in conflict".<sup>85</sup>

Ketiga hal tersebut merupakan karakteristik budaya polisi lebih banyak diwarnai oleh kualitas dan integritas pribadi petugas polisi. Pada hal dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menilai polisi bukan sebagai perseorangan tetapi sebagai suatu lembaga. Tidak jarang kesalahan seorang anggota polisi digeneralisir sebagai kesalahan lembaga polisi secara keseluruhan. Oleh karena itu budaya seorang anggota polisi harus bisa dikendalikan dengan budaya organisasi.<sup>86</sup>

Ruang lingkup fungsi dan tugas polisi tersebut mencakup persoalan-persoalan umum maupun khusus yang sangat sensitif. Berbeda dengan penegakan hukum, tugas polisi lebih banyak berlangsung di lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat. Di samping itu dalam pelaksanaan tugasnya, polisi dilengkapi dengan hak untuk menggunakan kekuatan-kekuatan penekan. Hak dan wewenang ini dapat ditemukan di seluruh kepolisian negara modern, baik di negara yang menganut sistem politik yang terbuka atau demokrasi maupun yang tertutup dan otoriter. Namun perlu ditekankan bahwa penggunaan hak dan wewenang oleh polisi harus mengikuti standar universal yang berlaku bagi setiap aparat penegak hukum di seluruh dunia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa wewenang dan hak polisi memiliki dimensi universal dan bersifat baik secara politik maupun moral.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Bibit S. Rianto, *Membangun Budaya Polri Yang Berorientasi Madani*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Kultur Polri" oleh Pusat Studi Keamanan Dan Perdamaian di UGM, Yogyakarta, 23 September 1999, hlm. 4.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>87</sup> Ahwil Luthan, *Reorientasi Pemenuhan Kebutuhan Aparat Penegak Hukum Yang Handal*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Penegakan Hukum Di Indonesia, FH-UGM, Yogyakarta, 20 Maret 2000, hlm. 5.

Pelaksanaan kedua kekuasaan yang melahirkan tiga fungsi yang ada pada polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Dalam hal penegakan ketertiban umum polisi lebih menekankan pada aspek preventif. Sementara dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang represif lebih ditonjolkan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi polisi diatas apabila kita kaitakan dengan fungsi dan tugas polisi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun kondisinya sangat memprihatinkan. Tugas pelayanan dan memberi rasa teduh di masyarakat serta tugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bercampur baur dengan tugas-tugas dalam bidang pertahanan yang bersifat militeristik. Inilah penyebab utama mengapa polisi menjadi tidak mempunyai kemandirian dan profesional dan jauh dari masyarakat. Hal ini dikarenakan struktur organisasi Polri yang berintegrasi penuh dengan TNI di bawah komando ABRI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997.

Pada hal jika dilihat dari fungsi dan tugasnya, penggabungan Polri ke dalam jajaran ABRI sangat kontradiktif. Di satu pihak Polri sebagai penegak hukum dan pemelihara ketertiban masyarakat, di lain pihak Polri berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang *behavior*-nya sangat berbeda, yang satu bersifat komunikatif - persuasif, sedangkan yang satunya bertabiat represif. Keadaan inilah yang menimbulkan "*double manipulative*" Polri.<sup>88</sup>

Ketidak mandirian Polri sebagai akibat belenggu undang-undang tersebut mengakibatkan Polri tidak utuh memerankan tugas institusionalnya yang hakiki. Dalam posisinya yang demikian, Polri tidak leluasa untuk mengaplikasikan mandat hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Di mana kultur politik tersebut banyak bercirikan sentralistis kekuasaan, pada hal watak dasar tugas dan wewenang

---

<sup>88</sup> Samsudin, *Posisi Polri (tinjauan Restrospektif)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Kultur Polri" diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Yogyakarta, 23 September 1999, hlm. 1.

Polri adalah tegaknya hukum, bukan melindungi kewibawaan atau kekuasaan seorang penguasa. Jadi perlu adanya perubahan paradigma nilai dan perangkat undang-undang yang menyangkut Polri agar Polri berperan sesuai dengan hakikat keberadaannya.

Keluarnya Polri secara struktural kelemabgaan dari TNI sejak 1 April 1999 dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2000 di mana Polri terpisah dari Departemen Pertahanan dan berada di bawah Presiden dan ditegaskan lagi pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Polri pisah dari TNI. Terpisahnya Polri dari TNI tersebut tentu saja kita sambut dengan gembira dengan harapan Polri menjadi mandiri baik dari segi organisasi, operasional maupun dari segi pembinaan.

Secara universal perlunya kemandirian Polri dari setiap negara merupakan suatu keharusan objektif dalam masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain setiap masyarakat demokratis menuntut polisi yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum, demi tegaknya hukum, hak asasi manusia dan hak-hak demokrasi rakyat yang harus dilindungi.<sup>89</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan Kunarto, bahwa dalam suatu negara demokrasi biasanya menempatkan Polisi sangat terhormat. Karena Polisi selalu dianggap sebagai faktor penyeimbang, pendamai dan penengah setiap pertikaian politik dan harus bebas dan tidak berpolitik agar tidak memihak dan dapat berlaku adil. Tidak ada di dunia ini, yang menempatkan polisinya di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Nurfaizi, *Membangun Kultur Polri Yang Berorientasi Publik (persepsi dan komitmen Polri)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Kultur Polri Di UGM, Yogyakarta, 23 September 1999, hlm. 5.  
<sup>90</sup> Kunarto, *Polri Mandiri*, Seri: Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku ke 4, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 38.

Oleh karena itu dalam suatu kehidupan yang demokratis dalam masyarakat, perlu adanya kemandirian Polri dalam pelaksanaan tugas. Hanya Polri yang tahu bagaimana problema keamanan harus disadari dan dituntaskan, berapa kekuatan yang dibutuhkan dan bagaimana kekuatan harus diatur sesuai dengan problema yang dihadapi. Hanya Polri yang tahu teknik dan teknik tindakan kepolisian. Itu semua adalah jiwa dari profesionalisme Polri. Untuk menyelenggarakan semua itu dengan baik, sudah sewajarnya apabila diberi kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa menghadapi hambatan struktur pemerintahan.

Mengingat perkembangan zaman sudah berubah sehingga mau tidak mau harus mengikuti irama perubahan tersebut. Di mana masyarakat menuntut Polisi untuk bersikap profesional dan untuk itu harus lepas dari militer. Di samping itu tuntutan terbesar saat ini adalah menciptakan masyarakat madani atau *Civil Society*. Untuk itu diperlukan polisi yang melindungi, mengayomi dan menjamin tegaknya hukum yang bersuara kebenaran dan keadilan yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak berperilaku militer melainkan perilaku yang berwatak sipil. Polisi yang berwatak sipil harus dekat dengan rakyat atau masyarakat yang dilayaninya, banyak berkomunikasi, berdialog dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk mendekatkan polisi kepada masyarakat yang menjadi lingkungannya adalah dengan membuatnya bertanggung jawab (*accountable*) terhadap masyarakat di mana ia bertugas.<sup>91</sup>

Seirama dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Bibit S. Rianto mengemukakan, bahwa seiringa dengan alur perubahan dalam era reformasi, kultur Polri yang akan dibangun harus *compatible* dengan sistem demokrasi dan pembentukan masyarakat madani/*civil society* di Indonesia. Ditentukan dua hal yang harus dikembangkan, yaitu budaya Polri yang berorientasi pada nilai-nilai madani dan budaya Polri yang berorientasi pada publik, di mana Polri berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan bernegara secara beradap, yang menggunakan

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 14.

metode dan pendekatan yang bercorak non militeristik, non kekerasan serta memberikan penghormatan pada hak asasi manusia sebagai suatu *corporate culture* Polri, yang memperhatikan aspek-aspek dan dinamika lokal serta menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas Polri tersebut, Pratikno mengemukakan adanya dua aliran, yang dikutip dari pendapat Peters.<sup>93</sup> Pertama, pendekatan kultural yang lebih menekankan pada tanggung jawab personal (*personal obligation*) dalam akuntabilitas publik. Dalam perspektif ini, esensi pengembangan akuntabilitas publik terletak pada pengembangan komitmen dan moralitas individu, etos kerja dan etika organisasi yang kondusif bagi pengabdian lembaga kepolisian kepada masyarakat. Dengan kata lain, kunci akuntabilitas kepolisian kepada publik adalah pengembangan kultur pengabdian kepada publik dalam tubuh kepolisian sebagai sekelompok individu dan sebagai lembaga yang menjadi dasar kebijakan dan perilaku kepolisian.

Pendekatan kedua lebih menekankan pada aspek-aspek eksternal. Dalam konteks ini, akuntabilitas kepolisian kepada publik sangat ditentukan oleh tekanan-tekanan eksternal yang memaksa dan mengkondisikan kepolisian untuk mengabdikan kepada kepentingan publik. Pendekatan ini lebih tidak mempercayai pada komitmen dan nilai-nilai normatif dan dokmatik sebagai basis bagi akuntabilitas kepada publik. Meskipun tidak menolak pentingnya pengembangan kultur, pendekatan ini lebih menekankan mekanisme kontrol eksternal kepada kepolisian.

Menurut Hartristuti Harkrisnowo untuk mendapatkan *trust, respect and obedience* dari masyarakat adalah melalui *institutional and capacity building*

---

<sup>92</sup> Bibit S. Rianto, *Membangun Budaya Polri Yang berorientasi Madani*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh PSKP-UGM, Yogyakarta, 23 September 1999, hlm. 2.  
<sup>93</sup> Pratikno, *Kelambagaan Polri*, Makalah disampaikan dalam Semiloka yang diselenggarakan oleh FH UGM dan OTI-USAD di Yogyakarta, 22-23 November 2000, hlm. 2.

dengan mengkaji kembali beberapa hal dalam rangka menegaskan citra dan kinerja Polri dewasa ini, yaitu meliputi:<sup>94</sup>

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih *civilian oriented* daripada "*military oriented*" dalam penataan kelembagaan.
2. Manajemen kepolisian yang lebih memfokuskan diri pada pelayanan ke bawah, pelayanan masyarakat, *instead of* pelayanan ke atas (an), atau lebih *community-oriented*.

3. Kinerja yang lebih berorientasi pada problem solving

4. Personil yang lebih mengatasi masalah masyarakat dengan pendekatan pelayanan daripada pendekatan keamanan.

5. Restrukturisasi sistem pendidikan kepolisian yang tidak lagi menitik beratkan pendidikan yang *military cultur*.

6. Pengawasan eksternal yang harus dibuka untuk lebih memperoleh *input* dari masyarakat melalui *public participation* dan tidak hanya sekedar *internal control and monitoring*, hal mana dapat dilakukan dengan pembentukan Komisi Pemandau Polri (*serupa civilian review board* di negara lain).

7. Ketentuan pengawasan yang tidak lagi membawa nuansa militer dalam hal terjadinya penyimpanan oleh personil Polri, karena sebagai warga sipil selayaknya ia juga tunduk pada hukum sipil dan bukannya hukum militer, termasuk kelembagaan yang akan menaunginya.

Sementara itu berkaitan dengan luasnya fungsi dan tugas Polri serta dalam rangka membuat Polri lebih tanggap dan memiliki tanggung jawab kepada kepentingan masyarakat (akuntabilitas publik) terutama dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Menurut Sigit Rianto dan Eddy O.S. Hiariej pada dasarnya

---

<sup>94</sup> Hartisnuri Harkrisnowo, *Redefinisi Tindak Pidana Dalam lingkup Peradilan Militer Masalah Yurisdiksi*, Makalah disampaikan dalam Semiloka: redefinisi Polri dan TNI-ABRI, yang diselenggarakan oleh FH UGM dan OTI USAID di Yogyakarta, 22-23 Nopember 2000, hlm. 4.



ada tiga kategori akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh Polri, yaitu akuntabilitas internal, eksternal dan internasional.<sup>95</sup>

Akuntabilitas internal memiliki relevansi dengan tanggung jawab individual setiap anggota Polri untuk menghormati dan mentaati semua prasyarat hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti harus ada mekanisme supervisi secara internal dalam organisasi kepolisian untuk menjamin efektivitas kinerja polisi.

Akuntabilitas eksternal memiliki hubungan dengan evaluasi terhadap kinerja Polri oleh masyarakat. Pengakuan hukum bukan merupakan urusan yang menjadi domain eksklusif suatu lembaga (kepolisian), sehingga pemerintah (lokal dan nasional), lembaga peradilan dan masyarakat dapat melakukan pengawasan.

Akuntabilitas internasional memiliki makna bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Polri harus mencermati norma-norma hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini perlu ditegaskan karena apabila dalam praktik penegakkan hukum oleh lembaga kepolisian suatu negara melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat internasional, maka dapat berimplikasi terhadap akuntabilitas negara di hadapan komunitas dan badan internasional yang berwenang.

Berkaitan dengan akuntabilitas Polri kepada publik sebenarnya sudah ideal apabila disandarkan kepada internal individu dan lembaga kepolisian saja tanpa harus melibatkan paksaan-paksaan eksternal. Namun demikian realitas selama ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dogmatis dan normatif, mulai dari agama, sumpah jabatan sampai dengan kode etik, tidak pernah menjadi acuan baku bagi individu polisi dalam berperilaku khususnya dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu berkaitan dengan tugas polisi selaku reserse dalam menyelenggarakan fungsi

---

<sup>95</sup> Sigit Rianto dan Eddy O.S. Hiariej, *Fungsi Polri Dalam Sistem Peradilan Sipil Pasca Pemisahan TNI-Polri*, Makalah disampaikan dalam acara Semiloka "Implikasi Reposisi TNI-Polri Dalam Bidang Hukum", kerjasama FH UGM dan OTI-USAIID, Yogyakarta, 22-23 November 2000, hlm. 19.

<sup>96</sup> Menurut semua informan polisi, dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam peradilan pidana hanya bertanggungjawab kepada atasan dan tidak bertanggungjawab kepada masyarakat pelapor atau pengadu disamping bertanggungjawab kepada atasan. Oleh <sup>96</sup> dan keadilan pada peradilan pidana hanya bertanggungjawab kepada atasan. Oleh polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum karena itu untuk terwujudnya akuntabilitas polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka memuhi tuntutan masyarakat madani demi terwujudnya polisi sipil perlu segera ditindaklanjuti adanya perubahan terhadap Petunjuk Pelaksana No. Pol: Juklak/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana tersebut.

<sup>97</sup> Koespramono Irsan: Upaya Menyajikan Polisi Profesional, Dalam Kurnarto, *Polri mandiri*, seri: Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku ke 4, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 86-87.

penegakan hukum perlu mengembangkan metode dan pendekatan yang tidak militeristik (polisi sipil), tidak dengan kekerasan serta menghormati hak-hak asasi manusia tersangka maupun korban serta memperhatikan aspek-aspek dan dinamika lokal serta menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas baik yang bersifat internal, eksternal maupun yang internasional sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk itu polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana perlu adanya pertanggungjawaban polisi kepada masyarakat pelapor atau pengadu disamping pertanggungjawaban kepada atasan. Karena yang selama ini terjadi baik di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana hanya bertanggungjawab kepada atasan. <sup>96</sup> Oleh karena itu untuk terwujudnya akuntabilitas polisi dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka memuhi tuntutan masyarakat madani demi terwujudnya polisi sipil perlu segera ditindaklanjuti adanya perubahan terhadap Petunjuk Pelaksana No. Pol: Juklak/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana tersebut.

Berkaitan dengan uraian tersebut, Koespramono Irsan <sup>97</sup> mengemukakan, bahwa suatu badan penegak hukum yang harus di luar konteks militer. Jadi ia bersifat "Civilian". Karena: pertama, ditinjau dari aspek kultural polisi bertugas melindungi, mengayomi dengan cara menegakkan hukum di masyarakat. Kedua,

aspek kesetaraan diantara 5 komponen aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*, yakni komponen penyidik (Polisi), komponen penuntut umum (Jaksa), komponen pengadilan (Hakim), komponen penghukuman (Lembaga Pemasyarakatan) dan komponen pembela (Pengacara). Dari lima komponen tersebut tidak ada satu pun unsur militer. Untuk itu polisi sebaiknya menjadi sipil. Ketiga, Aspek Internasional Polisi, polisi mempunyai aspek internasional yang jelas. Artinya polisi mempunyai kewajiban internasional yang tidak bersifat militer.

Sehubungan dengan Polisi yang berwatak sipil dalam penegakan hukum tentu saja perlu adanya perubahan dari penampilan fisik sampai perubahan perilaku. Untuk perubahan fisik kita sudah berubah yakni adanya perubahan seragam dan kepangkat. Sedangkan untuk perubahan perilaku,<sup>98</sup> perlu adanya perubahan rekrutmen dan pendidikan untuk calon reserse. Untuk perubahan perilaku harus dimulai dari komandan atau kepala/pimpinan dari lembaga kepolisian itu sendiri, karena komandan/pimpinan selalu dijadikan suri tauladan oleh bawahan dalam hal ini polisi selaku penyidik.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Menurut semua informan polisi, meskipun satu tahun lebih polisi terpisah dari TNI, perilaku polisi sebagai penyidik masih diwarnai militeristik, karena sulit untuk merubah dengan waktu yang singkat, kecuali untuk masa yang akan datang di mana rekrutmen dan pendidikan polisi selaku penyidik yang dilakukan setelah reformasi kemungkinan ada perubahan dari kultur militer menjadi kultur sipil.

<sup>99</sup> Menurut semua informan polisi, meskipun belum pernah memperoleh pendidikan kejuruan di bidang reserse, dalam melaksanakan tugas penyidikan sering belajar atau mencontoh atasan atau seniornya dalam hal ini kadit reserse, kasat reserse dan kanit reserse.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum di Polda DIY Polres Sleman dan Polsek Depok dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis formal diakui bahwa dari segi kelembagaan sudah mandiri dalam arti terpisah dari TNI sejak tanggal 1 Juli tahun 2000 yakni dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 sejak tanggal 18 Agustus 2000. Namun secara substansial/operasional kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana belum dapat terwujud, karena masih terdapat beberapa kendala yang merintanginya baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern. Kendala yang bersifat intern berasal dari lembaga kepolisian itu sendiri, yakni perilaku polisi selaku penyidik belum memperlihatkan perilaku sipil melainkan masih memperlihatkan perilaku yang bersifat militernis cenderung menggunakan kekerasan, melakukan pelanggaran hak-hak tersangka, diskriminatif, tidak transparan dan tidak akomodatif serta belum memperhatikan kinerja yang profesional, terutama pada kegiatan penindakan dan pemeriksaan. Sedangkan kendala yang bersifat ekstern berasal dari luar perilaku polisi penyidik, yakni belum memadainya instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana/ belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme dan organisasi lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Di samping itu masih sering terjadi intervensi baik yang

- bersifat vertikal maupun horizontal. Intervensi yang bersifat vertikal berasal dari atasannya yang berkepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani polisi penyidik, dalam bentuk komunikasi "minta dibantu" atau "minta dipending". Sedangkan intervensi yang bersifat horizontal berasal dari kekuatan ekonomi, "saudara tua", teman sejawat dan dari masyarakat secara individual maupun massal. Kendala yang paling besar adalah keterbatasan anggaran yang digunakan untuk operasional penyidikan, karena selama ini anggaran yang diterima berasal dari ABRI. Akibatnya timbul ekscs di lapangan karena tugas tetap harus dilaksanakan, sehingga timbul penggunaan istilah dana "kemitraan" atau "parmas" (partisipasi masyarakat) atau "susu" (sumbangan suka rela).
2. Aspek-aspek yang berperan dalam menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana, antara lain:
- a. Aspek hukum atau peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana sangat diperlukan. Hal ini penting karena salah satu tonggak supremasi hukum adalah keberadaan lembaga kepolisian yang menyelenggarakan fungsi penyidikan yang mandiri ditandai profesionalisme atau keberadaan lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu.
  - b. Aspek struktur organisasi, untuk menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana lebih tepat tidak diletakkan di bawah presiden melainkan diletakkan di bawah kekuasaan kehakiman. Dengan peletakan polisi selaku penyidik di bawah presiden masih dimungkinkan terjadi intervensi jika presiden terlibat dalam kasus yang sedang dalam penyidikan.

- c. Aspek pemerintah (*political will*), pemerintah harus betul-betul menunjukkan adanya kemauan politik yang tinggi yang menunjukkan lembaga kepolisian sungguh-sungguh sebagai pintu gerbang peradilan pidana atau merupakan organisasi terdepan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
- d. Aspek sumber daya manusia polisi penyidik, sebagian besar masih kurang pengetahuan baik di bidang manajemen maupun identifikasi terutama pada Polres Sleman maupun Polsek Depok. Dalam melakukan penyidikan terhadap semua jenis kejahatan belum dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian khusus yang terkait dengan jenis-jenis kejahatan yang terjadi melainkan dilakukan oleh serse umum. Dalam rangka meningkatkan sumber daya polisi penyidik peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan baik formal maupun non formal mempunyai peranan yang penting dalam rangka kemandiriannya.
- e. Aspek anggaran, sarana dan prasarana. Anggaran, sarana dan prasarana mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan. Untuk itu diperlukan anggaran operasional yang memadai dan perlu ditingkatkan kesejahteraan anggota reserse dengan gaji yang memadai, sehingga tidak mudah diintervensi dari kekuatan ekonomi.
- f. Aspek personil. Dilihat dari aspek personil tidak rasional antara personil polisi dengan jumlah penduduk baik di Polda DIY (1 : 725), Polres Sleman (1 : 810) dan Polsek Depok (1 : 2005), sementara rasio polisi dengan jumlah penduduk yang ideal 1 : 500. Demikian halnya dengan personil polisi reserse dengan perkembangan kejahatan yang terjadi di Polda DIY, Polres Sleman dan Polsek Depok tidak rasional, terlihat dari personil reserse yang dimiliki baik di Polda ( 52 reserse), Polres (48 reserse) dan Polsek (20 reserse). Oleh karena itu perlu penambahan jumlah personil reserse khususnya di tingkat Polres maupun Polsek yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

g. Aspek Masyarakat, yakni adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana-  
naan tugas polisi selaku penyidik dan adanya kesadaran hukum dari  
masyarakat baik korban, pelapor/pengadu maupun aparat penegak hukum  
khususnya polisi selaku penyidik. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat  
terhadap polisi dalam menjalankan penyidikan dan tanpa adanya kesadaran  
hukum masyarakat (termasuk polisi), kemandirian bekerjanya lembaga  
kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan sulit untuk  
diwujudkan.

h. Aspek moral, mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan  
kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi  
penegakan hukum pada peradilan pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang  
mempunyai integritas moral yang tinggi dapat membedakan antara yang baik  
dan yang buruk, antara yang benar dengan yang tidak benar, sehingga dalam  
melaksanakannya fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan  
pada peradilan pidana tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan apapun dan  
dari mana pun.

i. Aspek kultur, sesuai dengan tuntutan masyarakat yakni terciptanya masyarakat  
madani atau *civil society*, maka diperlukan polisi yang melindungi,  
mengayomi dan menjamin tegaknya hukum yang bersuara kebenaran dan  
keadilan. Untuk itu perlu pengembangan metode dan pendekatan yang tidak  
berifat militeristik (polisi sipil), tidak dengan kekerasan dan menghormati  
hak asasi manusia tersangka maupun korban, terbuka dan profesional. Di  
samping itu perlu memperhatikan aspek-aspek dan dinamika masyarakat  
sebagai lingkungannya dengan menjalankan prinsip akuntabilitas  
polisi selaku penyidik kepada korban/pelapor/pengadu/ masyarakat di  
samping akuntabilitas kepada atasan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah dikemukakan di atas, perlu kiranya dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana langkah-langkah yang perlu dipayakakan adalah mengatasi kendala baik yang bersifat intern maupun ekstern. Untuk mengatasi kendala yang bersifat internal, perlu segera dilakukan oleh Polri tidak hanya sekedar ganti baju dan ganti pangkat saja tetapi dengan wajah baru yakni harus melakukan reformasi total yang mencakup dimensi/aspect kultur yang menyangkut sikap dan perilaku polisi penyidik dari militer menjadi polisi sipil. Disamping itu perlu segera mewujudkan adanya komisi pengawas terhadap kinerja polisi selaku penyidik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, perlu dilembagakannya pelaporan dari polisi penyidik baik kepada korban/pelapor/ pengadu/masyarakat yang terkait dengan penyidikan yang dilakukan, dan menampilkan polisi penyidik yang bersahabat serta meningkatkan moralitas anggota polisi secara global.

2. Untuk mengatasi kendala yang bersifat ekstern, perlu segera diadakan reformasi total yang mencakup aspek instrumen dan struktur yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Untuk itu perlu segera dilakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan pelaksanaan serta undang-undang yang terkait dengan polisi sebagai bagian dari ABRI, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan ABRI, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997



tentang Kepolisian Negara RI dan perlu segera diwujudkan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan peran kepolisian yang merupakan tindak lanjut dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Di samping itu perlu adanya kemauan pemerintah yang terkait dengan anggaran, sarana dan prasarana yang menunjang terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana serta meningkatkan kesejahteraan polisi selaku penyidik dengan pemberian gaji dan tunjangan yang layak untuk kehidupannya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia polisi penyidik, perlu segera diadakan perubahan kurikulum pendidikan yang lebih ditekankan pada pendidikan kejuruan kesersean dan memasukkan HAM dengan tidak mengesampingkan pendidikan disiplin dari unsur militer. Di samping itu juga perlu segera diadakan perubahan rekrutmen calon polisi penyidik minimal berperan didikan sarjana hukum. Perlu juga segera dilakukan penambahan jumlah personil polisi reserse khususnya di tingkat Polres dan Polsek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah perlu segera ditumbuhkan kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat (termasuk aparat penegak hukum khususnya polisi) terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Albrow, Martin, *Birokrasi*, Terjemahan: M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.
- Alkostar, Aritdjo, *Tuntutan Peran Polisi Dalam Mengatasi Perkembangan Kejahatan, Dalam Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, Mei 1987.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Arikunto, Harsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- , *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997.
- Bahtiar, W. Harsya, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, PTIK-Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Baker, Tomas; Carter, David L, *Penyimpangan Polisi*, Terjemahan: Kumarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Bayley, David H, *Polisi Masa Depan*, Cipta Manunggal, 1998.
- Biau, Peter M; Marshall, W Meyer, *Birikrasi dalam Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, UI-Press, 1987.

- Djamin, Awaludin, *Menuju Polri Yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Masyarakat*, Cetakan Kedua, YKTI, Jakarta, 2000.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polri (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- , *Formal-formal Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- , *KUHAP DAN KUHAP*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, 1998.
- Haris, Syamsudin, Dipisah dari ABRI, Mengapa di Dephamkan, "Ini Adalah Perceiraian Setengah Hati", Dalam Kunarto, *Polri Mandiri*, seri: Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku ke 4, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Hartono, Dimiyati M., *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Ind. Hill-Co, Jakarta, 1997.
- Husein, Harun M., *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law)*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Irsan Koespramono: Upaya Menyajikan Polri Profesional, Dalam Kunarto, *Polri Mandiri*, seri: Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku Keempat, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Karyadi, M., *Polisi (Filisafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Politea, Bogor, 1978.

- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Kelima, PTK-Gramedia Widiasarana Indonesia 1994, Jakarta, 1994.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Buku I, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- , *Perilaku Organisasi POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , *Tri Brata Catur Prasetya Sejarah-Perspektif dan Prospeknya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , *Ham dan Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , *Polri Mandiri*, Seri: Merenungi Kritik terhadap Polri, Buku ke 4, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- , *Polisi Dan Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 1998.
- , *Kapita Selekta Binteman Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- , *Batu Sandungan*, Seri: Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku Ketiga, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Mahendra, Oka. A.A, *Undang-undang Kejaksaan RI Memantapkan Kedudukan Dan Peranan Kejaksaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPM-Universitas Bandung, Bandung, 1995.
- Marita, Boedi Dwi Yani Sri, Sekilas Lintas tentang Penyidikan, Psikologi dan Hak-Hak Asasi Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Menurut KUHAP, Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Miles, Matthew B, Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 1992.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muliadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- , *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1997.
- Nasution, Garuda Abdul Hakim. dkk, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Nurfaizi, Peningkatan Kualitas Profesi Penyidik, Dalam Kunarto, Polisi Dan Masyarakat, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- , *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, 1998.
- Ovears, David; Friedmann, Jonathan L; Deplan, L. Anne, *Psikologi Sosial*, Terjemahan. Michael Adyanto; Savitri Soekrisno, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jarta, 1986.
- Projohamidjojo, Martiman, *Seri Pemerintahan Keadilan 2 Penyelidikan Dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982.
- , *Seri Pemerintahan Keadilan 4 Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Quinney, Richard, *Who is the Victim*, dalam Israel Drapkin dan Emilio Viano, eds. *Victimologi* (Lexington: D.C. Heath and Co., 1975).
- Rahardjo, Satjpto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.
- , *Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Bandung, 1996.

- Rahardjo, Satipio, Tabah, Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Reksodipoeetro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH, 994.
- Singarimbun, Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, UI-Press, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- , *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekarton, Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Soemtro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1988.
- Souryal, Sam S, *Etika Dalam Peradilan Pidana*, Terjemahan: Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, 1986.
- Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta, 2000.
- Susanto, I.S, *Menciptakan Lingkungan Yang Nyaman*, Pidato Dies Natalis pada Rapat Senat Terbuka UNDIP, dalam rangka memperingati Dies Natalis UNDIP Ke 40, Semarang, 15 Oktober 1997.

-----, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Senat Terbuka UNDP, Disajikan pada Upacara Penyerahan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada FH UNDP, Semarang, 12 Oktober 1999.

-----, *Kriminologi*, FH UNDP, Semarang, 1995.

Reksodipoepto, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH, 994.

Tabah, Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

-----, *Polisi Budaya dan Politik*, Cetakan Kedua, Sahabat, Klaten, 1996.

Weber, Max, *Batas-Batas Tentang Birokrasi*, Dalam Martin Albrow, *Birokrasi*, Terjemahan: Rusli Karim dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.

Makalah, Laporan Penelitian, Jurnal dan Majalah.

Alkostar, Artidjo, *Mem bangun Kultur Polri Yang Berwawasan Masyarakat Madani*, Makalah Seminar Nasional: *Mem bangun Kultur Polisi Indonesia Yang Berkarakteristik Sipil*, PSKP-UGM, Yogyakarta, 23 September 1999.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan P engaturan Hukum Pidana Yang Integral*, Makalah Seminar Nasional tentang Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, FH UNDP, 20 Desember 1997.

Atmasasmita, Romli, *Kemandirian Polri Dalam P enegakan Hak Asasi Manusia*, Makalah dalam Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, diselenggarakan ata Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), Forum Komunikasi Kriminologi (FORKKRIM), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Bandung, 3-4 Agustus 1998.

-----, *Kedudukan Dan Perana Kepolisian Republik Indonesia Dalam C. J. S.*, Makalah Seminar tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, SESPTM POLRI, Lembang Bandung, 29-30 Juli 1998.

HPY-POSTAK-UNDP

Djamin, Awaludin, *Perkembangan Kepolisian Dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Makalah dalam Diskusi Panel "Reformasi Kepolisian di Indonesia", PSK FH UNDP, Semarang, 27 Juni 1998.

-----, *Kemandirian Polri Pasca Pemisahan Dari Dephankam*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 1, september 1999-April 2000.

Hadjon, Philipus Mandiri, *Norma Hukum KUHP sebagai Norma Kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Rakyat (tersangka/terdakwa)*, Makalah Seminar: Dwi Windu KUHAP, Problematika dan Penegakannya, Surabaya, 20 Desember 1997.

Harahap, Yahya, *Suatu Tinjauan Penyidikan Dikaikan Dengan Pembuktian*, Makalah Seminar Nasional "Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", FH UNDP, Semarang, 20 Desember 1997.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Redifinisasi Tindak Pidana dalam Lingkup Peradilan Militer Masalah Yurisdiksi*, Makalah disampaikan dalam semiloka: Redifinisasi Polri dan TNI-ABRI, diselenggarakan oleh FH UGM-OTI USAID di Yogyakarta, 22-23 November, 2000.

Kepala Kepolisian RI, *Isu-isu Strategis Dalam Penegakan Hukum dan Peluang Umum Serta Pemekaran Kamadagri Berdasarkan Visi, Misi, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Yang Dimiliki Oleh Polri*, Makalah Seminar Nasional: Polisi Indonesia V tentang Peran Polri Sebagai Akselarator Demokrasi Masyarakat Indonesia, Diselenggarakan atas Kerjasama PSK UNDP-Polda Jateng, Semarang, 22 Nopember 2000.

Kerjasama Dinas Penelitian Dan Pengembangan markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan Pusat Studi Keamanan Dan Perdamaian UGM, *Studi Eksploratif Profesionalisme dan Kinerja Polri*, Laporan Hasil Penelitian, Yogyakarta, Tanpa tanggal April 1999.

Kunarto, *Perkembangan Kepolisian Dalam Sistem Administrasi Negara Pada Era Reformasi*, Makalah Seminar tentang Kepolisian negara RI di Sespim Polri Lembang, 29 Juli 1998.

-----, *Beberapa Faktor Penentu Kultur Polri, Permasalahan dan Pemetaan Pemikiran*, Makalah Seminar Nasional tentang Membangun Kultur Baru Polri, UGM, Yogyakarta, 23 September 1999.



- Lutan, Ahwil, *Reorientasi Pemenuhan Kebutuhan Aparat Penegak Hukum Yang Handal*, Makalah Seminar tentang Penegakan Hukum Di Indonesia, FH-UGM, Yogyakarta, 20 Maret 2000.
- , *Pemisahan TNI-POLRI Problematika dan Prospek*, Makalah Semiloka: Implikasi reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum, UGM-UAD, Yogyakarta, 22-23 Nopember 2000.
- Muhammad, Farouk, *Perubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 2, April 2000-September 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI-Yayasan Obor, Jakarta, 2000.
- Nurfaizi, *Memangun Kultur Polri Yang Berorientasi Publik (Presepsi dan Komitmen Polri)*, Makalah Seminar Nasional tentang Memangun Kultur baru Polri, PSKP-UGM, Yogyakarta, 23 September 1999.
- , *Hambatan dan Kesiapan Menuju Polri Berpostur Sipil*, Makalah Seminar Nasional: Memangun Polri Indonesia Yang Berkarakter Sipil, PSK-FH UNDP, Semarang, 8 Juli 1999.
- Pratikno, *Kelembagaan Polri*, Makalah Semiloka: Implikasi Reposisi TNI-OLRI di Bidang Hukum, FH UGM-USAD, Yogyakarta, 22-23 Nopember 2000.
- Rahardjo, Satipto, *Tinjauan Sosiologis Reorientasi Kepolisian Negara RI Dalam Mengantisipasi Era Globalisasi*, Makalah Seminar Kepolisian Negara RI, Markas Besar Kepolisian Negara RI Sekolah Staf Dan Pimpinan, Lembang, 29 S/D 31 Juli 1998.
- , *Polisi Berwatak Sipil*, Makalah Seminar Nasional: Memangun Polri Baru Indonesia, PKP-FH UNDP, Semarang, 8 Juli 1999.
- , *Polisi Indonesia Mandiri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun:1, September 1999-April 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI-Bekerjasama Dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Rianto, Bibit S, *Memangun Budaya Polri Yang Berorientasi Madani*, Makalah Seminar Nasional: Memangun Kultur Polri, PSKP-UGM, Yogyakarta, 23 September 1999.
- Riyanto, Sigit, Hiariej, Edy O.S, *Fungsi Polri Dalam Sistem Peradilan Sipil Pasca Pemisahan TNI-POLRI*, Makalah Semiloka: Implikasi Reposisi TNI-

Kompas, 1 April 1999.

Kompas, 5 Mei 1999.

Kompas, 5 Mei 1999.

Kompas, 16 Juni 1999.

Kompas, 20 Juni 1999.

Kompas, 1 Juli 1999.

Kompas, 9 Agustus 1999.

Kompas, 5 Nopember 2000.

#### Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemishan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

OFF-POSTAL INDIE

Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
undang Hukum Acara Pidana.